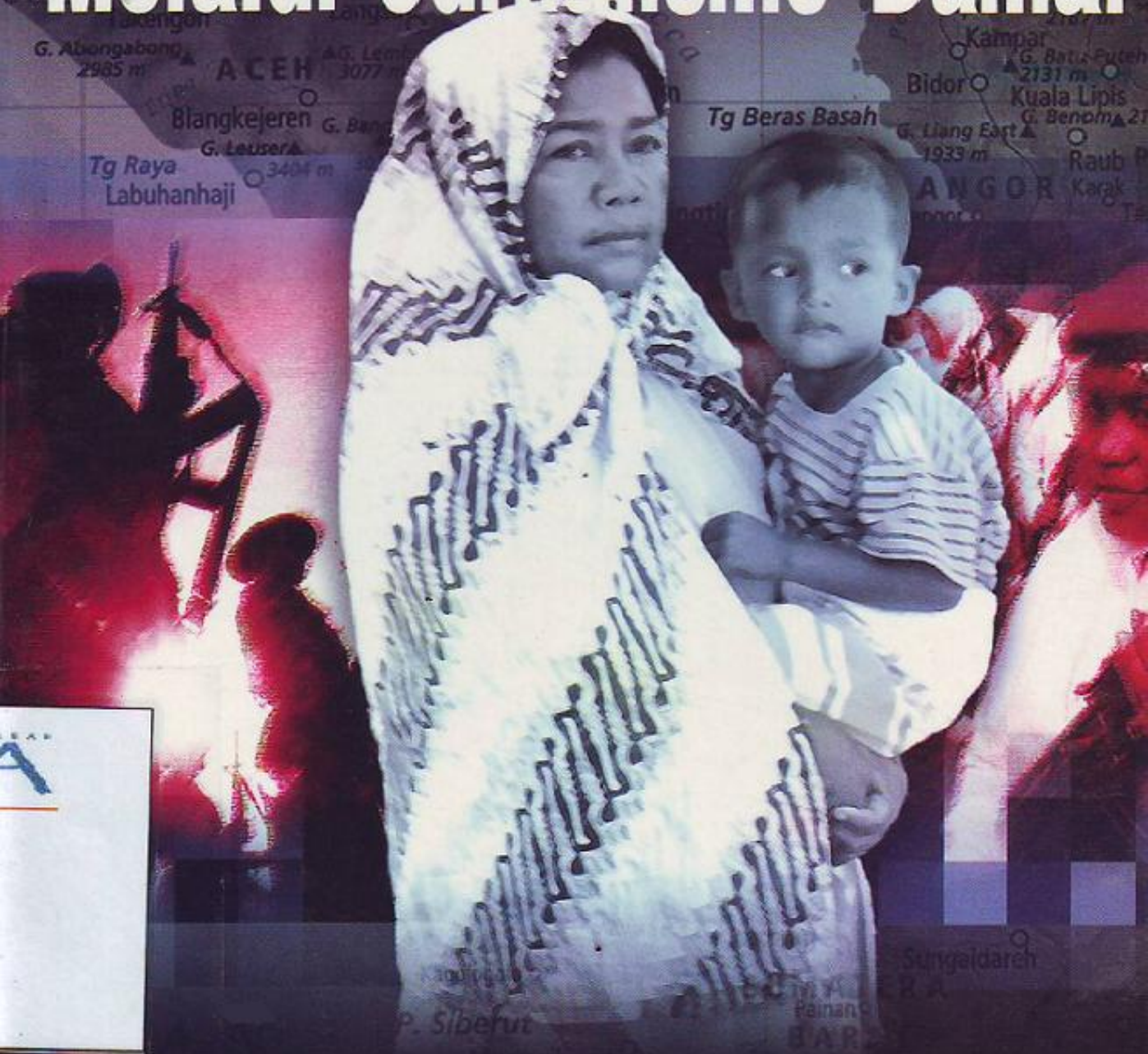


Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai



antara D... misi NAB dan
perlu untuk menghindari benturan penafsiran atas
kesepahaman Helsinki sekaligus untuk
tenggat waktu bisa terpenuhi.

disahkan hanya karena beda pe-
mahaman atas naskah nota ke-
sepahaman yang menjadi acuan
pembuatan undang-undang itu.
undang baru tersebut
memberikan rin-
mu

kawai, termasuk anggo
intens dengan anggo
Dewan Perwakilan D
Mawardi mengin
alaman DPRD NAB
yang aktif saat per
cangan undang-ur
khusus Aceh, te
mengajukan dra
pemerintah pu
dipahami, belu
nantu disepak
dar bulat," ka
i unda

Pokok Bahasan 1:

Tipologi Wartawan di Wilayah Konflik

Meliput peristiwa konflik (khususnya fakta kekerasan), pada dasarnya merupakan hal yang biasa bagi wartawan. Salah satu kriteria untuk mengukur apakah suatu peristiwa layak diberitakan atau tidak adalah kandungan unsur konflik dari suatu fakta. Semakin keras fakta konflik itu, semakin tinggi nilai beritanya. Rumus seperti ini, masih banyak dianut di kalangan wartawan.

Akibatnya ketika meliput suatu konflik, orientasi liputan dominan terbingkai dalam apa yang disebut jurnalisme perang (*war journalism*). Liputan wartawan lebih berorientasi pada peristiwa kekerasannya itu sendiri. Misalnya pada arena atau tempat dimana konflik itu terjadi. Atau seperti berapa jumlah korban yang mati, penderitaan fisik yang dialami korban, rumah yang hancur atau harta benda yang ludes terbakar. Dengan kata lain, jurnalisme perang lebih mengeksploitasi *the visible effect of violence*, dibanding korban-korban yang tidak tampak.

Akibatnya jurnalisme perang secara tidak sadar, lewat fakta media yang dihadirkan ke publik, ikut menggiring publik untuk memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Ini terjadi karena jurnalisme perang selalu menggunakan kacamata "kita-mereka" secara hitam putih. "Kita" adalah yang benar, dan "mereka" adalah yang salah.

Secara teoritik, ada tiga posisi wartawan ketika memberitakan konflik. *Pertama*, wartawan sebagai pendorong *issue intensifier*, dimana fakta media yang dihasilkan memiliki sumbangan untuk mempertajam konflik dalam realitas sosiologis. Dengan kata lain lain, wartawan melakukan *blow-up* realitas sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. *Kedua*, wartawan berperan melakukan *conflict deminisher*, dimana fakta media yang ditulis menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja wartawan meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan institusi media di mana ia bekerja. Entah kepentingan ideologis atau pragmatis-ekonomis. *Ketiga*, wartawan juga bisa berfungsi sebagai pengarah *conflict resolution*, yakni ketika fakta media yang dimunculkan, mampu memberikan "pencerahan" bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengarahkan penyelesaian konflik secara damai.

Pada bagian ini, fasilitator mengajak peserta untuk mengenali peran mereka selama mereka menjalankan profesi jurnalistik di wilayah konflik Aceh. Apakah berita-berita mereka tergolong berposisi sebagai pengobar konflik, menenggelamkan fakta konflik atau berperan mendorong bagi proses resolusi konflik.

Fasilitator diharapkan mampu memberikan perspektif baru kepada peserta tentang peran lain yang dapat dilakukan jurnalis yang bertugas di wilayah konflik.

TUJUAN

- Peserta mengenali peran dirinya sebagai wartawan berdasarkan pengalaman mereka selama melakukan liputan-liputan di daerah konflik Aceh.
- Peserta mengenali perspektif yang digunakan lewat berita-berita yang telah mereka hasilkan selama bertugas di wilayah konflik Aceh.
- Peserta dapat merefleksikan tentang peran yang selama ini dilakukan dan dapat mengambil peran baru dalam melakukan liputan di wilayah konflik Aceh untuk menunjang proses resolusi konflik secara damai.

SUB POKOK BAHASAN

Peran/posisi Wartawan dalam meliput di wilayah konflik Aceh

METODE

- Curah pengalaman peserta tentang pengalaman melakukan liputan di Aceh; mulai dari perencanaan liputan, peliputan di lapangan, sampai penulisan hasil reportase;

- Diskusi tentang kesaksian seorang jurnalis yang telah menyadari tentang arti pentingnya menerapkan perspektif jurnalisme damai dalam meliput konflik di Aceh.

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- Lembar contoh Curah Pengalaman Bahtiar Gayo, Wartawan Waspada di Aceh Tengah
- Kertas plano, spidol;
- LCD

PROSES

- Fasilitator memberikan penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan.
- Fasilitator meminta kepada peserta satu per satu untuk menceritakan pengalaman mereka ketika melakukan liputan (mulai dari penentuan *angle* pemberitaan, penentuan narasumber, sampai masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan ketika melakukan liputan);
- Fasilitator melakukan identifikasi *angle*, narasumber liputan dan masalah yang dihadapi di lapangan ke dalam kertas plano dan kemudian mendiskusikan kecenderungan peran wartawan berdasarkan penuturan peserta;
- Fasilitator kemudian membuat perbandingan dengan hasil riset KIPPAS terhadap kecenderungan pemberitaan konflik Aceh yang dimuat di harian Kompas.
- Untuk membandingkan kesimpulan umum diskusi, fasilitator kemudian meminta peserta untuk mendiskusikan pengalaman Bahtiar Gayo, seorang wartawan Waspada yang bertugas di Aceh Tengah.
- Fasilitator meminta peserta untuk melakukan refleksi umum, apakah mereka akan tetap mengambil posisi seperti yang sudah diambil selama ini, atau akan mengambil peran lain agar fakta media yang dihasilkan dapat menyumbang untuk proses resolusi konflik di Aceh.

Bahan Bacaan Pokok Bahasan 1: Curah Pengalaman Wartawan

Bahtiar Gayo, Koresponden Waspada di Aceh Tengah

Upaya Mengugah Pihak yang Bertikai

Sebagai manusia, wajar jika muncul perasaan berdosa apabila melakukan kesalahan, walau kesalahan itu tanpa disadari. Namun seyogyanya begitu mengetahui ada kesalahan, sewajarnya pula jika segera diperbaiki. Tentu, agar tidak terulang kesalahan yang sama. Itulah gambaran perasaan yang ada di bathin saya, setelah mengikuti pelatihan jurnalisme damai yang diselenggarakan KIPPAS tahun 2004 silam.

Sebelum mengikuti pelatihan, perasaan berdosa juga sebenarnya telah bersarang di bathin saya. Saya teringat, pada medio Juli 2001, ada sebuah berita, yang tanpa disadari telah menambah panjang daftar korban. Walau berita tersebut merupakan fakta yang saya dapatkan di lapangan. Judul berita itu “Menghadapi Provokator, Rakyat Belajar Ilmu Magic.”

Dampak pemuatan berita itu, membuat paranormal ketakutan. Apalagi yang tinggal di kawasan perkampungan seputaran pegunungan. Memang setelah berita itu terbit, ada dua paranormal yang dibantai. Apakah karena tulisan itu, atau karena faktor lain, saya memang

tidak bisa memberikan jawaban pasti. Namun kebetulan paranormal yang dibantai itu, semasa operasi jaring merah (DOM) merupakan panah aparat (GAM menyebutnya cuak). Pembantaian cuak sedang berlangsung.

Sejak itu saya sangat hati-hati dan setiap pembuatan berita, walau itu fakta, sangat diperhitungkan dampaknya.

Selama menjadi wartawan di daerah konflik Aceh Tengah (termasuk Bener Meriah, ketika itu masih bergabung dengan Aceh Tengah), tidaklah berlebihan, hanya saya satu-satunya wartawan di daerah ini yang paling sering turun ke lapangan. Maaf rekan-rekan yang lain, mungkin dengan segala pertimbangan, enggan turun ke lapangan.

Saya tujuh kali ditangkap dan diinterogasi oleh mereka yang bertikai. Empat kali ditangkap aparat keamanan dan tiga kali ditangkap GAM. Mereka semuanya melepaskan saya, setelah mengetahui identitas yang ada di dalam dompet. Secara jujur saya haru mengakui, ketika itu saya bagaikan orang yang tidak punya harapan hidup di masa depan. Saya sudah ikhlas mati dalam menjalankan tugas. Sering saya berdoa “Ya Allah, sekiranya umurku telah tiba waktu Engkau jemput, demi rakyat banyak aku telah siap. Namun bila umurku, ada manfaatnya untuk orang banyak, maka selamatkanlah aku dari cobaan ini.”

Sikap mental inilah yang membuat saya nekad ke lapangan, melakukan tugas jurnalistik. Ketika aparat melakukan kesalahan, dengan berbagai pertimbangan berita itu tetap ditulis. Walau mereka memberikan konfirmasi yang bertolak belakang dengan fakta yang saya temukan di lapangan. Namun akibatnya setelah dimuat, banyak pihak yang kurang suka. Namun demikian, dengan beberapa petinggi militer saya tetap membina hubungan baik. Bahkan ketika mereka melakukan operasi, saya sering diikuti. Otomatis ketika itu, keterangan versi mereka lebih banyak muncul dalam berita yang saya buat. Dampaknya GAM marah dan memberikan statemen yang membantah keterangan aparat keamanan.

Sejak itu saya rasakan, menerima statemen dari kedua belah pihak membuat posisi saya yang sering turun ke lapangan sedikit aman. Walau tidak menjamin saya bebas dari *sweeping* kedua belah pihak.

Kalau pun ada yang saya sesali sebagai wartawan, seharusnya saya mengedepankan hati nurani ketika daerah saya benar-benar diamuk konflik. Namun saat warga tewas bersimbah darah, sebagai wartawan saya malah menjumpai keluarga yang ditinggalkan, menanyakan kronologis kejadian, siapa yang membantai atau bagaimana drama pembantaian itu terjadi.

Masih Berorientasi Konflik yang Berdarah-darah

Saya tidak menanyakan bagaimana anak yang ditinggalkan korban. Bagaimana masa depan mereka, apalagi ada yang dituduh sebagai GAM, apakah mereka dikucilkan masyarakat? Aceh Tengah memang berbeda dengan kawasan Pesisir Aceh. GAM di daerah ini lebih dimusuhi rakyat, bila dibandingkan dengan aparat keamanan. Waktu itu, liputan saya lebih terfokus tentang yang terlihat mata, yakni perang dan hasil dari peperangan itu. Dampaknya memang ada saya tulis, tetapi belum fokus pada jurnalisme damai.

Seperti berita pembantaian di Bur Lintang pada 8 Maret 2003, dimana ada 11 Mobil dan 5 sepeda motor dibakar, serta dua orang tewas ditembak. Insiden ini hanya berselang sepekan (3 Maret 2003) setelah massa membubarkan JSC (Joint Security Committee) di Aceh Tengah. Mungkin GAM marah dan membalas dendam dengan insiden JSC sebagai cikal bakal bubarnya Joint Security Committee di Aceh. Pada saat tragedi 3 Maret tersebut, saya memang berada di lapangan bersama masyarakat yang tengah melakukan amuk. Proses pembubaran JSC itu saya tulis secara runut. Saya menggambarkan kemarahan rakyat kepada GAM, lengkap dengan yel-yel rakyat yang mendukung aparat keamanan.

Rakyat dan mereka yang berpihak ke NKRI sangat senang dengan berita yang saya buat tiga hari bersambung. Namun GAM sangat terpukul dengan pemberitaan itu. Walau GAM sendiri memberikan bantahan, namun berita yang saya buat lebih banyak menceritakan kisah di lapangan. Dampaknya sepekan kemudian, GAM melakukan balas dendam dengan munculnya insiden di Bur Lintang. Ketika itu saya langsung melakukan wawancara dengan korban dan

kebetulan saat itu saya ditemani sejumlah wartawan dari Banda Aceh yang datang meliput ke Aceh Tengah.

Inti pertanyaan dan tulisan saya menceritakan bagaimana drama pembantaian itu berlangsung, dan menggambarkan kesadisan aksi pembantaian tersebut. Demikian juga dengan peristiwa pembakaran 7 buah mobil dan penembakan yang menewaskan tiga orang di Ise-Ise, Aceh Tengah. Saya menjumpai sumber utama, menuliskan kerugian matril, serta kronologis kejadian. Selang dua hari kemudian, yaitu pada 15 Juli 2003, aparat keamanan berhasil menembak GAM yang melakukan pembakaran dan pembunuhan di Ise-Ise. Fokus dan *angle* berita yang saya angka lebih pada bagaimana aparat keamanan berhasil mendapatkan GAM di dalam hutan itu.

Mulai Berfokus pada (Kronologi) Korban

Walau saya banyak membuat berita yang terfokus pada konflik, tidak berarti bahwa saya tidak pernah membuat berita dengan fokus penderitaan korban. Ada sebuah berita yang saya anggap sudah mulai menggiring kepada jurnalisme damai, namun masing kurang fokus dan dominan ke jurnalisme perang. Kebetulan media lain tidak mengangkatnya, namun saya menggarapnya di lapangan dan mendapatkan berita yang eksklusif bersambung awal Januari 2004. “2 bulan disandera GAM, Melahirkan Dalam Bayang-bayang Maut”, itu judul yang saya pilih.

Namun isi berita itu selain menggambarkan kesedihan 18 jiwa (5KK) warga Samar Kilang yang disandera GAM selama 2 bulan, juga memfokuskan pada cerita keberhasilan aparat keamanan yang membebaskan warga dari penyanderaan GAM. Waktu itu, aparat keamanan dari pasukan 512 Muara Bunta yang membebaskan ke 18 warga pedalaman tersebut.

Ketika saya melacak berita “Wanita Hamil Tua diperkosa 10 tentara GAM,” di desa Kuyun Kecamatan Silih Nara (2/12-2004) posisi saya benar-benar terjepit. Tidak ada media lain yang mengungkapkan peristiwa itu. Padahal saya menulisnya bersambung. Orang-orang GAM sempat marah. Bantahan dari petinggi GAM di Kuala Tripa Banda Aceh, sedikit meredakan ketegangan di lapangan antara saya dengan personil GAM. Dan akhirnya mereka kembali “bersahabat.”

Berita pemerkosaan ini saya buat juga masih berfokus ke jurnalisme perang. Kepada korban saya tanyakan kronologis kejadiannya. Apa yang diungkapkan korban dalam batas masih tidak melanggar kode etik, semuanya saya tulis. Namun dampaknya korban akhirnya eksodus ke Binjai, Sumatera Utara untuk mengamankan diri. Hingga saat ini suami korban dan korban sendiri belum kembali menggarap kebun kopi miliknya di Kuyun, Aceh Tengah.

Ketika Tgk. Bantaqiyah dibantai bersama pengikutnya, berita untuk harian *Waspada* saya *follow up* dari Aceh Tengah, walau lokasi kejadian berada di Aceh barat. Sayalah wartawan yang pertama masuk ke sana bersama masyarakat yang mencari rotan. Namun sayang karena dijaga ketat aparat keamanan, terpaksa identitas diri dan alat wartawan saya rahasiakan. Saya ketika itu benar-benar menjadi petani yang mencari rotan. Padahal untuk masuk ke sana dari Aceh Tengah saya berjalan kaki selama 7 jam.

Tetapi tulisan saya tentang Tgk. Bantaqiyah, masih terfokus pada jurnalisme perang. Saya yakin dari tulisan itu, kelompok yang dirugikan oleh pembantaian itu akan mendidih darahnya ketika membaca berita bagaimana mayat bergelimpangan di mana-mana, sampai di dalam sungai.

Demikian juga dengan berita saya yang berjudul “Aparat Mengamuk di Pusat Kota Takengon, 3 Tewas, Empat luka-luka.” Berit itu mengisahkan seorang anggota aparat keamanan pada 25 Januari 2004, yang melepaskan tembakan membabi buta kepada siapa saja yang ditemukannya di pusat pasar. Akibat pemberitaan itu, pasukan aparat yang merasa nama baiknya tercemar mencari saya. Sempat terjadi perang mulut dengan aparat, walau akhirnya menjadi dingin, setelah pihak keluarga yang tertimpa musibah dapat menerima dengan ikhlas.

Sekedar catatan, konflik di Aceh Tengah berbeda dengan perang di daerah Aceh pesisir. Di sini masyarakat ada yang membuat senjata rakitan, mereka beralasan untuk mempertahankan diri dari serangan GAM. Kadang kala sulit untuk membedakan mana masyarakat yang

mempunyai senjata rakitan, dan mana yang GAM. Aksi masyarakat membuat senjata rakitan dipicu setelah GAM memporak-porandakan wilayah Bandar (kini kabupaten Bener Meriah). Sangat sulit bagi wartawan untuk mendapatkan keterangan dari rakyat yang bangkit ini dan dari sinilah lahir cikal bakal front perlawanan rakyat di Aceh.

Tidaklah berlebihan, bila rekan pers dari luar daerah yang akan menemui masyarakat di lapangan(khususnya mewawancara mereka yang memiliki senjata rakitan) harus saya dampingi dulu baru berani ke sana. Dan memang kenyataannya demikian.

Sebelumnya saya juga sempat ditangkap oleh masyarakat yang mempergunakan senjata rakitan ini. Namun karena mayoritas mereka etnis Jawa dan banyak yang berasal dari Medan, walau telah beranak pinak di Gayo, ketika mendengar nama *Waspada*, mereka akhirnya bershabat. Dampak dari aksi rakyat ini, wartawan *Serambi Indonesia* yang bertugas di Aceh Tengah, Ampuh Devayan terpaksa mengungsi ke Banda Aceh. Berita senjata rakitan ini juga telah saya buat, namun seperti dijelaskan di atas, angle dan fokusnya bukan dalam perspektif jurnalisme damai.

Akhirnya aparat militer pada bulan Juni dan Juli 2001 menyita senjata rakitan milik masyarakat. Sebanyak 1.324 unit senjata rakitan itu dimusnahkan. Acara pemusnahan berlangsung di halaman makodim 0106 Aceh Tengah.

Sebenarnya masih banyak tragedi berdarah-darah di negeri dingin, Gayo, Aceh Tengah. Namun tidak semuanya dapat ditulis di sini. Semua tulisan itu orientasinya jelas, belum mengarah ke jurnalisme damai.

Dampak konflik untuk Aceh Tengah saja sejak tahun 2000, sampai dengan akan memasuki darurat militer, yang meninggal dan hilang mencapai 1.562 jiwa. Data dari Pemda sesuai dengan bantuan yang mereka salurkan jumlah anak yatim mencapai 2.472 jiwa. Rumah yang dibakar 4.292 unit, di dalamnya sudah termasuk sekolah, gedung pemerintah.

Rakyat Aceh Tengah dan Bener Meriah mengandalkan hidupnya dari berkebun kopi. Otomatis kopi ditanam di kawasan pegunungan dan medan yang penuh logistik ini, membuat GAM dan aparat keamanan memperebutkan wilayah yang strategis. Dampaknya 27.000 hektar lebih kebun kopi rakyat diterlantarkan dari 63.747 hektar lebih kebun kopi yang ada. Sumber hidup itu kini sebagian telah kembali digarap kembali, setelah kondisi keamanan relatif membaik.

Berubah 100 Derajat

Secara jujur harus saya akui, pelatihan Jurnalisme damai yang saya ikuti di Medan pada akhir November 2004, membuat orientasi pemberitaan saya mulai berubah. Saya mencoba mengamalkan jurnalisme damai, dengan harapan apa yang saya tulisa mampu menggugah, walau mungkin sedikit, agar mereka yang betikai segera menghentikan pertikaianya.

Saya merasa jurnalisme damai, cocok dengan nurani saya, yang menginginkan Aceh Tengah damai. Setiap ada kejadian konflik, fokus liputan saya kini lebih kepada korban. Saya kini lebih banyak mengungkapkan penderitaan korban daripada menceritakan kronologis konflik itu sendiri.

Ketika melakukan wawancara dengan salah seorang serdadu GAM di Aceh Tengah, Ungel, saya misalnya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada upaya-upaya damai yang dilakukan narasumber. Saya tidak lagi menggali kisah-kisah kegagalan Ungel selama menjadi GAM. Misalnya berapa tentara yang berhasil ditembak dan seperti apa pengalaman bertempur dengan aparat keamanan. Tidak. Saya tidak melakukan itu lagi.

Ungel, ketika itu saya giring untuk berbicara secara hati nurani. Ternyata Ungel pun menginginkan Aceh damai! Ungel dapat merasakan bagaimana penderitaan rakyat akibat perang. Banyak keluarga yang terlantar, anak yatim bertambah, hidup masyarakat centang prengang. Saya giring pula pertanyaan bagaimana upayanya agar Aceh itu damai, maka keluarlah tulisan saya: "Ungel Serdadu GAM: Berhentilah Berperang, Aceh Sudah Hancur."

Selain bertemu langsung dengan beberapa korban dalam berbagai insiden yang muncul, berbagai liputan dengan obyek penderitaan masyarakat juga terus saya munculkan di kotan tempat saya bekerja. Jujur pula saya akui, kadang kala saya sempat menangis, mendengar kisah

pilu rakyat yang tak berdosa akibat perang. Penderitaan rakyat itu terekam dalam memori dan hingga kini sulit dilupakan.

Ketika badai tsunami melanda Aceh, saya menggunakan momen ini untuk lebih melantangkan perlunya perdamaian di Aceh. Saya misalnya mewawancarai seorang tokoh budaya Aceh yang tengah berbaring sakit di Kesrem, Lhoksuemawe terkena tsunami. Namanya Adnan PMTOH, tokoh hikayat Aceh ini benar-benar saya ketuk hatinya untuk mengeluarkan statemen tentang musibah tsunami tersebut. Apakah penderitaan rakyat Aceh masih harus ditambah lagi dengan perang? Akhirnya keluarlah tulisan saya di *Waspada* yang berjudul: “Simpanlah Peluru Itu, Pikirkan Mereka Yang Selamat.”

Saya juga membuat liputan tentang penderitaan kaum nelayan akibat konflik. Termasuk kehidupan para petani kopi di Gayo yang mendiami kawasan pegunungan. Saya telusuri jalan hidup mereka yang semakin susah akibat konflik. Keluarlah tulisan saya secara bersambung: “Bintang itu Semakin Redup” dan “Kapan Mereka Akan Bangkit”. Kedua tulisan itu mengisahkan penderitaan korban akibat konflik Aceh. Bagaimana pergolakan bathin seorang ayah yang tak mampu lagi menyekolahkan anaknya, karena sumber hidupnya hancur. Bagaimana keadaan keluarga yang lain, bagaimana sikap GAM dan aparat keamanan selama konflik. Alhamdulillah, tulisan tersebut ditanggapi positif oleh pemerintah daerah setempat, bahkan orang nomor satu di negeri dingin itu mengakui tidak bisa tidur setelah dia membaca tulisan tersebut.

Ketika Medan Media Center (MMC) menyelenggarakan pelatihan untuk membuat reportase lapangan pasca tsunami dan konflik Aceh, proposal yang saya ajukan juga menggunakan perspektif jurnalisme damai. Pada pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan AJI ini, awal Juli 2005, proposal saya diterima untuk melakukan investigasi di Meulaboh, Aceh Barat. Saya menghasilkan dua buah tulisan dari kegiatan tersebut.

Pertama yang berjudul: “Janda Korban Tsunami itu Bangkit, Karena Hutang Suami”. Kemudian yang satu berjudul: “Dihantam Konflik, Diamuk Tsunami, Kapan Mereka akan Bangkit?” Demikian juga ketika ada seorang janda tua yang menderita tumor ganas. Janda miskin ini korban konflik dan tsunami. Semua penderitaannya saya tulis. Alhamdulillah Pemkab Aceh Tengah menanggapi serius setelah tulisan itu dibacanya. Seluruh biaya operasi dan obat-obatan ditanggung pemkab.

Sebuah Harapan

Semoga tulisan saya dimasa lalu, ketika awal-awal konflik Aceh, bisa dimaafkan jika menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Yang jelas, sebagai wartawan saya tidak mempunyai niat untuk mengobarkan konflik waktu itu. Kalau pun berita-berita saya waktu itu mem-blow up konflik, semata karena saya belum melihat ada perspektif lain dalam menulis fakta konflik. Namun jauh dalam sanubari saya, ketika itu sudah ada upaya mengiring untuk menghasilkan berita yang mampu menimbulkan inspirasi bagi proses perdamaian. Namun saya masih belum terarah.

Harapan saya semoga berbagai pihak yang peduli terhadap perdamaian di Aceh, dapat mendorong rekan-rekan wartawan lain di Aceh, agar lebih mewartawakan kabar-kabar perdamaian. Amin.

Bahan Bacaan 2 Pokok Bahasan 1:

Ketika Ruang untuk Korban Makin Sempit

Mayoritas warga masyarakat mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa baik karena waktu dan letak geografis yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan informasi itu. Dalam kondisi tersebut, keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik tidak tergantikan untuk menjembatani jarak antara informasi dan khalayak.

Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Aceh akan sangat kecil gaungnya dan tidak akan mendapatkan legitimasi tanpa pelibatan media massa, sebab tanpa media massa sebuah konflik hanya akan diketahui oleh segelintir orang. Berkat media massa, sebuah berita konflik akan dengan cepat diketahui dan tersebar luas. Apalagi jika peristiwa konfliknya itu sendiri terjadi di kawasan yang secara geografis terletak jauh dari khalayak.

Sementara di sisi lain, liputan mengenai kontroversi atau konflik yang terjadi di Aceh tersebut dapat diibaratkan “tambang emas” bagi media massa itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena peristiwa konflik Aceh selalu mengandung nilai berita serta layak jual karena dianggap mampu mengangkat rasa keingintahuan publik.

Atas dasar itulah, maka sejak Juni 1999 hingga Juni 2002, Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) yang berkedudukan di Medan melakukan sebuah penelitian tentang berita konflik di Aceh. Penelitian yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) tersebut telah mengambil 456 item berita sebagai sampelnya.

Sampel-sampel itu diambil dari empat media terbitan Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yakni 115 pokok berita (25,22 persen) dari harian *Serambi Indonesia*, harian *Waspada* sebanyak 148 berita (32,45 persen), 118 berita atau 25,88 persen dari harian *Analisa*, dan sisanya dari harian *Radar Medan* sebanyak 73 pokok berita (16,45 persen). Berita-berita yang diambil sebagai sampel dalam penelitian tersebut adalah berita yang terkait dengan konflik di Aceh yang berada di halaman utama serta halaman khusus NAD di keempat media tersebut.

Penelitian yang sama berangkat dari kenyataan bahwa hampir setiap hari halaman surat-surat kabar yang terbit di Aceh dan Sumatera Utara itu selalu diisi oleh korban-korban konflik Aceh yang berjatuh baik dari pihak TNI/Polri, GAM, atau masyarakat biasa. Kondisi itu seakan-akan memberikan gambaran bahwa konflik di Aceh tidak akan mereda meskipun sebenarnya telah diberikan adanya upaya penyelesaian konflik tersebut, terutama melalui jalur diplomasi.

Hasil penelitian tersebut dipresentasikan dalam sebuah seminar yang bertajuk “Konflik Aceh dalam Pemberitaan Media Pers: Menggagas Jurnalis(me) yang Berpihak pada Rakyat Korban Konflik” oleh beberapa analis media dari Yayasan Kippas, yakni Pemilianna Pardede, Lisna Sari, dan Diana Irena di Medan, Rabu (24/72002) lalu.

Dalam perjalanannya, penelitian tersebut menyoroti beberapa hal yang mengemuka dalam pemberitaan keempat media massa tersebut dengan konflik yang terjadi di Aceh. Hal-hal utama yang disoroti antara lain adalah topik berita, orientasi liputan, obyektivitas pemberitaan dan kategori berita.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa secara kuantitas, topik berita yang paling banyak diberitakan adalah mengenai upaya penyelesaian konflik di Aceh baik yang datang dari masyarakat umum, tokoh GAM, maupun pihak pemerintah dan militer. Topik berita yang dominan diangkat adalah mengenai dialog damai antara RI dan GAM di Geneva, pemberitaan otonomi khusus untuk Aceh, atau kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga ikut mencari solusi dari konflik Aceh tersebut.

Selama penelitian tersebut dilakukan, terdapat 109 berita yang memuat topik tentang upaya penyelesaian konflik Aceh. Topik tentang upaya penyelesaian konflik Aceh paling banyak dimuat di harian *Analisa* dengan 36 berita (33,03 persen), 29 berita (26,61 persen) dari *Waspada*, dari *Serambi Indonesia* sebanyak 24 berita (22,02 persen), dan sisanya 20 berita (18,35 persen) dari *Radar Medan*.

Dalam laporannya, tim peneliti KIPPAS tersebut menyatakan bahwa meskipun topik tentang upaya penyelesaian konflik Aceh masih menjadi pilihan media, tetapi uniknya, berita tentang konflik bersenjata antara TNI/Polri dan GAM justru tidak berkurang. Berita konflik bersenjata tersebut tercatat sebanyak 71 berita dari keempat media tersebut yakni 22 berita dari *Waspada*, 21 dari *Analisa*, serta masing-masing 14 berita dari *Serambi Indonesia* dan *Radar Medan*.

Berturut-turut, topik-topik berita yang masih dimuat dalam pemberitaan keempat media tersebut adalah mengenai kekerasan oleh GAM, ekses konflik Aceh, kekerasan oleh TNI/Polri, HUT GAM, jeda kemanusiaan, dan seruan mogok oleh GAM.

Sementara dalam hal orientasi liputan, penelitian yang sama menyimpulkan bahwa keempat surat kabar tersebut belum berperan banyak dalam mencari tahu dan mengungkap akar permasalahan konflik secara menyeluruh. Media-media tersebut dinilai belum kritis terhadap fakta-fakta yang mereka peroleh di lapangan.

Kippas, dalam laporan penelitiannya itu, menyatakan bahwa latar belakang dan akar permasalahan dari konflik Aceh sangat sukar ditemukab dalam pemberitaan keempat media tersebut. Setiap kasus yang terjadi cenderung dikaitkan dengan konflik antara TNI dan GAM, padahal bisa saja kasus tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedua pihak yang sedang bertikai itu. Misalnya, kasus meninggalnya seorang warga sipil yang kemudian disebutkan sebagai korban pembunuhan GAM atau TNI.

Kippas menyatakan bahwa belum melihat keberpihakan keempat media tersebut terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik di Aceh. Mereka nilai tidak mampu memberikan tempat yang memadai serta menyuarakan kaum yang yang memang tak bersuara seperti perempuan, anak-anak, dan orangtua korban konflik Aceh.

Kajian Kippas yang sama juga telah menilai bahwa keempat media tersebut masih belum memberikan akses yang sama kepada kedua pihak yang bertikai dalam konflik di Aceh, yakni TNI/Polri dan GAM. Dari hal ini masih ada dominasi TNI/Polri dalam pemberitaan keempat media tersebut.

KIPPAS memang hanya membatasi kajian keberimbangan beritanya (*cover both sides*) tersebut pada berita-berita konflik yang melibatkan TNI/Polri dengan GAM. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa karena baik TNI/Polri maupun GAM merupakan pihak yang seharusnya sama-sama didengar dalam upaya menyelesaikan konflik di Aceh.

Ketidakberimbangan berita tersebut telah tampak dari hasil penelitian itu bahwa dari 178 berita tentang konflik antara TNI/Polri dengan GAM, ternyata hanya sebanyak 51 berita atau 28,66 persen saja yang ditulis secara berimbang, sedangkan sisanya sebanyak 127 berita atau hanya 71,34 persen dinilai masih belum berimbang.

Keberimbangan berita menjadi salah satu pokok yang diteliti oleh KIPPAS mengingat hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban media terhadap masyarakat pembaca. Berita yang tidak obyektif akan menyesatkan khalayak sehingga hal tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran yang paling nyata terhadap etika jurnalistik.

Penelitian KIPPAS ini juga menunjukkan bahwa penempatan berita konflik Aceh mendapatkan perhatian yang cukup besar dari keempat media tersebut. Hal itu dimungkinkan dengan melihat peletakan berita-berita konflik tersebut yang banyak diletakkan dibagian *headline* surat kabar tersebut.

Dari 456 pokok berita yang menjadi sampel, terdapat 49 pokok berita yang ditempatkan sebagai berita utama, sedangkan sisanya disimpan di halaman *non headline*. Secara umum, harian *Serambi Indonesia* yang terbit di NAD merupakan harian yang paling banyak mengangkat masalah konflik Aceh. Hal tersebut dimungkinkan mengingat *Serambi Indonesia* memiliki kedekatan secara psikologis maupun geografis dengan pusat konflik Aceh itu.

Lebih dari itu, *Serambi Indonesia* dan *Analisa* lebih banyak memuat berita tentang upaya penyelesaian konflik Aceh dihalaman utamanya sebagai *headline*. Sementara itu, Radar Medan lebih banyak menampilkan berita peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi, sedangkan Waspada ternyata lebih berimbang, yakni selain masalah penyelesaian konflik Aceh, juga memuat peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata pada halaman utamanya. (OIN)

(Sumber: *Kompas*, Senin 26 Agustus 2002).

TNI/POLRI PALING BANYAK DIJADIKAN NARASUMBER

MENURUT penelitian Yayasan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Surnatera (KIPPAS), ternyata, TNI/Polri merupakan yang paling banyak dijadikan narasumber, yakni 136 kali kemunculan (periode Juni 1999-2002). Sementara narasumber dari pihak GAM sendiri hanya muncul 68 kali. Surat kabar yang paling dominan menggunakan TNI/ Polri sebagai narasumber adalah *Serambi Indonesia* dan *Waspada*.

Terkait dengan narasumber lapangan yang sering digunakan oleh keempat surat kabar tersebut, penelitian KIPPAS menyebutkan tiga hal. Pertama, pada umumnya wartawan tidak berada di tempat terjadinya peristiwa konflik. Hal tersebut disebabkan mereka memerlukan bantuan dari pihak lain seperti TNI/ Polri, GAM, atau masyarakat di sekitar tempat kejadian. Fakta kedua yang diangkat oleh hasil penelitian ini adalah menonjolnya peranan TNI/Polri sebagai narasumber. Hal tersebut dimungkinkan sebab akses wartawan terhadap TNI/ Polri secara institusional mudah dihubungi dibandingkan dengan pihak GAM yang berada di hutan-hutan.

Ketiga adalah adanya kepercayaan pada diri wartawan beserta editornya bahwa TNI/ Polri memiliki informasi berharga dan media cenderung mempercayai pernyataan tersebut sebagai kenyataan.

TOPIK	SERAMBI INDONESIA	WASPADA	ANALISA	RADAR MEDAN	*
• Upaya Penyelesaian Konflik Aceh	24	29	36	20	129
• Konflik Senjata TNI/Polri-GAM	14	22	21	14	71
• Kekerasan oleh GAM	19	25	11	10	65
• Ekseks Konflik Aceh	11	11	10	7	39
• Kekerasan oleh TNI/Polri	12	20	2	3	37
• HUT GAM	7	14	4	4	29
• Jeda Kemanusiaan	4	5	8	2	19
• Seruan Mogok GAM	5	7	5	1	18
• Referendum	6	1	3	5	15
• Peranan Aparat Aceh	-	4	7	1	12
• Pengungsi	3	3	4	2	12
• Pembebasan Sandera GAM	3	1	1	1	6
• Dukungan LN terhadap RI	1	1	2	1	5
• Pelanggaran HAM	1	1	-	2	4
• Dukungan Masyarakat terhadap RI	-	1	1	1	3
• Penilaian Aparat terhadap GAM	-	-	2	-	2
• Tambahan Kekuatan GAM	-	1	-	-	1
• Lain-lain	5	2	1	1	9
• Jumlah	115	148	118	75	456

Keterangan: * Total
Sumber: Yayasan Kippas

SECARA umum, hasil penelitian KIPPAS tersebut telah mengungkapkan bahwa ruang publik untuk rakyat Aceh yang menjadi korban selama konflik di daerah itu adalah masih sempit. Hal itu menunjukkan keberpihakan media massa yang masih rendah untuk mengungkap penderitaan yang sesungguhnya oleh masyarakat yang lebih banyak dibandingkan dengan dua kubu yang tengah bertikai, yakni TNI/Polri dan GAM, misalnya.

Seperti yang dikatakan Saur Hutabarat, seorang praktisi media yang juga wartawan senior, kecenderungan media massa di sekitar konflik Aceh untuk selalu memberitakan informasi yang bersifat elitis ketimbang mengangkat penderitaan masyarakat sipilnya merupakan bentuk dari jurnalisme perang.

Jurnalisme perang tersebut cenderung melihat permasalahan dari segi menang atau kalah, hanya menonjolkan hal-hal yang tampak oleh penglihatan, serta mencerminkan pesan-pesan pihak yang berkuasa.

Sejak tahun 1970-an, kata Hutabarat, muncul sebuah pihhan lain dengan harapan agar semua hal yang terkubur oleh gema kekuasaan, yakni penderitaan warga sipil di tengah konflik dapat terungkap. Alternatif itu berbentuk jurnalisme perdamaian yang pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung, seorang profesor Studi Perdamaian dan merangkap sebagai Direktur Trancend Peace and Development Network.

Galtung mengambil acuan dari liputan kesehatan ketika pertama kali memperkenalkan istilah jurnalisme perdamaian tersebut. Kemudian gagasan jurnalisme perdamaian tersebut

dikaji dalam Forum Konflik dan Perdamaian yang berkedudukan di Buckinghamshire, dekat Kota London. Hasilnya adalah pemisahan yang jelas antara jurnalisme perdamaian dan jurnalisme perang.

Hutabarat menegaskan, salah satu bagian utama dari jurnalisme perdamaian ini adalah mengambil orientasi liputan pada tingkatan masyarakat biasa bukan penguasa. Dasar jurnalisme ini adalah siapa pun yang terlibat konflik dan apa pun yang menyebabkannya, selalu ada tiga unsur yang menjadi korban dalam masyarakat. Ketiganya adalah anak-anak, ibu-ibu, dan orangtua usia lanjut. Merekalah menjadi subyek liputan dan narasumber yang tidak mampu bersuara.

Lebih dari itu, jurnalisme perdamaian mengambil fokus pada akibat yang tidak terlihat, misalnya, trauma, kerusakan struktur, dan kebudayaan masyarakat. Hal itu sangat kontras dengan jurnalisme perang yang selalu mengangkat hal-hal yang kelihatan seperti jumlah korban tewas atau terluka serta kerusakan material.

Jurnalisme perdamaian memberikan ruang bagi semua orang yang berada dalam sebuah konflik. Jurnalisme jenis ini juga sangat menyadari bahwa bukan hanya dua pihak yang berkonflik, tetapi melibatkan banyak pihak.

Sayangnya, ujar Hutabarat, jurnalisme perdamaian ini masih mempunyai kendala, yakni belum dikenal luas, hal itu juga diperparah karena tidak banyak buku yang mengulasnya.

"Untuk menerapkannya, pasti diperlukan sebuah pelatihan yang intensif. Ia juga memerlukan kesabaran di lapangan. Hal yang masih tergolong mewah bagi sebagian pers. Karena itu, untuk menerapkan jurnalisme perdamaian, diperlukan dukungan manajemen dan kebijakan redaksional yang kuat," kata Hutabarat. (OIN)

(Sumber: *Kompas*, Senin 26 Agustus 2002).

Permainan Energizer (Berpikir Lateral)

TUJUAN

- Melalui permainan ini peserta diajak untuk mengenali pentingnya berpikir atau melangkah secara lateral

PROSES

- Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok
- Kemudian meminta satu orang dari setiap kelompok untuk keluar dari kelompoknya yang selanjutnya akan diminta sebagai pengamat.
- Fasilitator menggambar rangkaian 9 kotak bujur sangkar di lantai, lalu, meminta kepada peserta secara berurutan untuk melewati kotak-kotak itu dalam 8 langkah hingga mereka bisa keluar.
- Setiap peserta yang akan memulai langkahnya dipandu oleh pengamat yang berasal dari kelompoknya dengan menganggukkan kepala jika langkah itu tepat dan menggeleng jika salah.
- Sebelum dimulai, kepada masing-masing pengamat dari kelompok itu dipanggil secara terpisah dan diberi kunci jawaban.
- Permainan dapat dimulai dari peserta pertama kemudian berurutan hingga berakhir.
- Setelah permainan berakhir, fasilitator memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, misalnya, apakah anda menemukan kesulitan. Mengapa hal itu terjadi. Apakah anda merasa "seharusnya" melangkah sesuai dengan kotak-kotak yang ada. Setelah

jawaban dibuka dan ternyata ada langkah yang keluar dari kotak, apa pendapat anda. Apakah hal itu penting dilakukan atau justru tidak karena "seogyanya memang harus melangkah sebagaimana lazimnya" dst.

- Menjelang berakhir sesi ini, fasilitator menyimpulkan permainan itu dengan merangkum pendapat-pendapat yang disampaikan peserta

Pokok Bahasan 2: Pemetaan Konflik Aceh

“Dalam banyak hal kita pertama-tama tidak melihat baru kemudian menerangkan, lebih condong kita menerangkan dulu dan kemudian baru melihat,” ungkapan klasik Walter Lippmann, wartawan politik AS termashur itu, mengingatkan para wartawan tentang pentingnya penguasaan fakta awal yang dibutuhkan ketika wartawan hendak melakukan perencanaan sebuah liputan.

Wartawan hendaknya tidak terjebak dalam pola pikir yang stereotipik. Cara berpikir stereotipik hanya menunjukkan kemalasan wartawan semata untuk menggali berbagai fakta, yang dibutuhkan agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas sosiologis.

Misalnya tentang para pihak (*stake holder*) yang terlibat dalam konflik Aceh. Kecenderungan pemberitaan pers seolah menyederhanakan konflik Aceh semata sebagai konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) versus TNI/Polri. Padahal setiap konflik selalu juga melibatkan anak-anak, kaum ibu maupun kaum bapak, walau mereka dalam posisi korban. Demikian juga ketika menulis berita konflik yang bersifat *hot news*, wartawan misalnya kerap kali abai terhadap korban-korban sipil yang terus-menerus bertambah setiap kali terjadi muncul konflik. Berbagai upaya resolusi konflik yang telah dilakukan, juga gagal dihadirkan sebagai latar, sehingga berita-berita *hot news* terkesan kering. Tidak membangun nuansa pentingnya menyudahi konflik yang berdarah-darah dan memprovokasi pentingnya perdamaian.

Namun yang jelas, pemahaman tentang peta konflik Aceh, akan menolong agar jurnalis tidak menggunakan kacamata kuda dalam merekonstruksi konflik Aceh.

TUJUAN

- Jurnalis memperoleh pengetahuan periodisasi konflik Aceh
- Jurnasi memperoleh pengetahuan tentang pihak-pihak yang terlibat konflik di Aceh
- Jurnalis memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab konflik di Aceh
- Jurnalis dapat mengetahui proses resolusi konflik yang berlangsung selama ini di Aceh

WAKTU

- 120 Menit

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan
- Pada sesi ceramah, narasumber diminta untuk memaparkan mengenai periodisasi konflik di Aceh, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Aceh (*stakeholder*), faktor-faktor pemicu konflik di Aceh (*trigger conflict*), serta proses-proses resolusi konflik yang selama ini telah dilakukan di Aceh.
- Setelah narasumber memaparkan makalahnya, lanjutkan dengan sesi diskusi sesuai dengan topik yang dibawakan narasumber, dengan tujuan peserta bisa lebih memahami mengenai pemetaan konflik di Aceh, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Aceh, faktor penyebab timbulnya konflik di Aceh. Pada sesi ini peserta diharapkan aktif untuk saling bertukar pikiran maupun melontarkan pertanyaan atau tanggapan sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok bahasan yang dibawakan.

Pemetaan Perang Aceh

**** Catatan untuk jurnalis yang meliput konflik Indonesia-Aceh***

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak

Tentunya, bukanlah sekedar bersikap naif bila jurnalis yang hendak meliput konflik tidak terlebih dahulu mempelajari peta dan sejarah konflik di suatu tempat. Karena, hasil atau konstruk-onstruk berita yang diproduksi jurnalis tersebut pasti akan menguntungkan, atau merugikan para pihak, terutama pihak masyarakat sipil. Bila sebuah konstruk berita merugikan –dalam artian memanipulasi kebenaran faktual—maka seorang jurnalis justru menjadi pembunuh kedua setelah korban tewas di tangan penjahat kemanusiaan. Jurnalis menjadi penghapus jejak pelaku kejahatan kemanusiaan yang sesungguhnya sehingga “tanpa disadari” bekerja untuk atau menjadi bagian dari mata rantai impunitas.

Apa yang saya ingin katakan adalah sebuah konstruk berita yang diproduksi atau pun direproduksi oleh seorang atau sekelompok jurnalis memiliki peluang menimbulkan korban, menambah mata rantai pekerja impunitas, dan memperpanjang atau memperdalam konflik yang berdarah sehingga menghasilkan roda gila spiral kekejian terhadap manusia. Jurnalis demikian, menurut Jake Linch,¹ adalah mereka yang memiliki pemahaman bahwa konflik sama halnya dengan kekerasan. Padahal konflik dapat memiliki makna positif dan konstruktif bila membuka jalan untuk merubahnya melalui pengelolaan yang efektif. Jadi pemahaman apa yang dimaksud dengan konflik menjadi sangat fatal.

Pengetahuan tentang peta konflik, sebenarnya bisa dibangun oleh jurnalis secara bersama-sama. Namun, untuk jurnalis di daerah konflik sering menghadapi persoalan sebagaimana halnya dengan masyarakat awam. Di mana muncul sikap saling mewaspadaai satu sama lainnya. Bisa jadi, saat diskusi di warung saja, begitu pembicaraan dimulai, maka ada rekan jurnalis yang langsung mencegat dengan klaim-klaim: kamu pro GAM, pro RI dan seterusnya –sehingga diskusi segera berakhir. Wacana tentang konflik tidak berkembang. Peta konflik pun menjadi bersifat sangat individual yang hanya dimiliki oleh seseorang semata. Pada pertemuan berikutnya, masing-masing jurnalis sudah mengetahui label yang dilekatkan pada dirinya, dan label yang bisa ia tempelkan pada rekan jurnalis lainnya. Akhirnya, jurnalis terjebak ke dalam konflik internal di dalam kaumnya sendiri.

Sebenarnya, setiap jurnalis yang sudah lama meliput konflik adalah sangat kaya dengan berbagai informasi, bahkan rincian-rincian peristiwa yang menyangkut siapa pelaku, siapa pemicu dan siapa yang menjadi korban bila ia bisa langsung berada di lokasi peristiwa. Akibatnya, jurnalis juga menjadi rebutan para pihak yang berperang agar bekerja sebagai mata-mata, informan atau cuak bagi satu pihak tertentu, atau sebagai pemformat opini publik yang menguntungkan bagi pihak tertentu sehingga publik pun menjadi bersikap menurut yang dikehendaki oleh pihak tersebut.

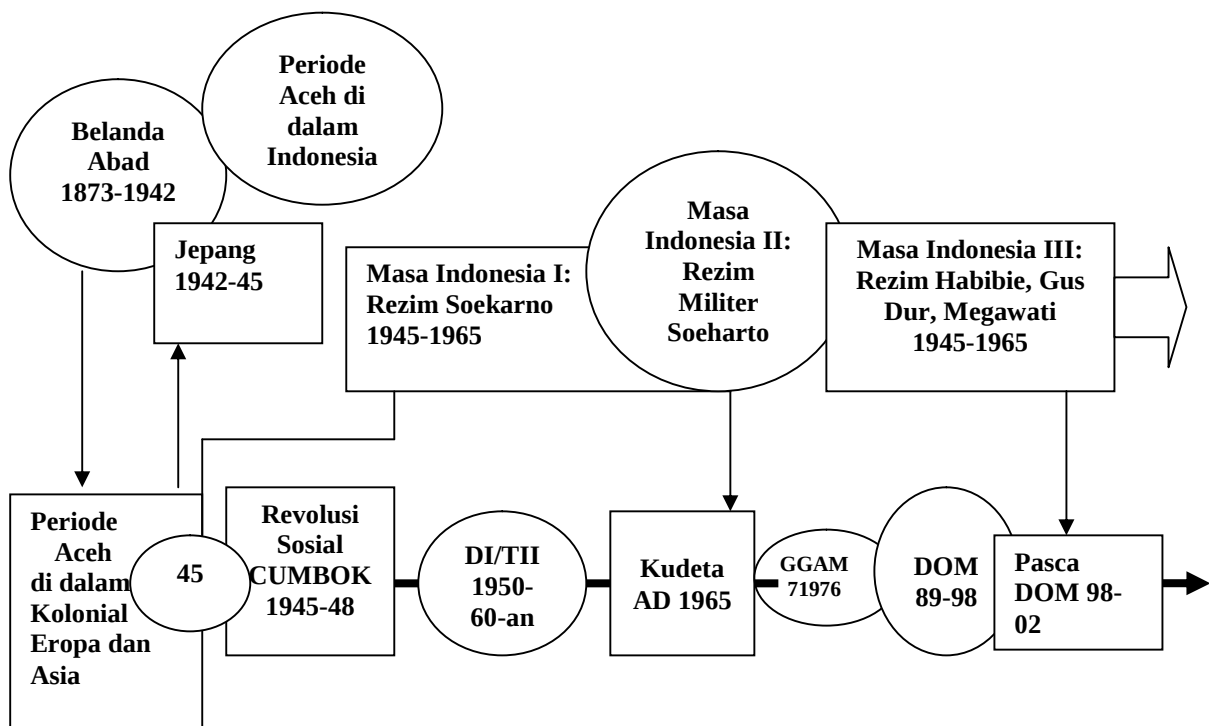
Namun, kekayaan informasi tersebut bisa bersifat parsial dan bias, terutama jurnalis yang menjadi penjaga kapling berita yang bersumber dari kantor atau narasumber tertentu semata. Jurnalis yang mentongkrongi sebuah sumber adalah jurnalis yang lama kelamaan memasang kacang mata kuda bagi dirinya sendiri, di satu pihak. Pada saat yang bersamaan juga merasa paling mengetahui tentang peta konflik karena sudah terjebak pada rasa percaya pada sumber informasinya. Padahal, nara sumber tersebut memberikan informasi atau peta konflik sekedar untuk merusak peta faktual yang sudah dimiliki oleh para jurnalis itu sendiri - yang terbentuk justru sebelum bertemu dan memiliki hubungan yang erat dengan narasumber tersebut.

¹ Jake Linch, *Reporting The World, Part 1. For Conflict & Peace Forum*, 1999.

Takdir Sejarah

Hampir dapat dipastikan bahwa hanya segelintir umat manusia yang menyenangi konflik dengan ujung melakukan aksi kekerasan. Mereka yang termasuk dalam katagori ini adalah yang dilatih untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, teologi, ras, dan cita-cita politik. Mereka yang, dalam pemahaman sekarang, merupakan para penganut paham militerisme. Demikian pula dalam masyarakat Aceh, sekalipun mereka hidup di dalam kurun waktu yang panjang di dalam peperangan melawan penguasa politik, bukanlah berarti mereka senang untuk mencari gara-gara agar bisa berperang.

Gb I: Rentang Konflik di Aceh Abad 19-21



Keterlibatan rakyat Aceh di dalam konflik bersenjata sejak Belanda mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Perang Aceh di masa kolonial Belanda – baik perang antara negara Aceh dan Belanda, maupun perang antara rakyat Aceh dan negara Belanda – terentang dari tahun 1873 hingga 1942. Setidak-tidaknya, satu generasi hidup sepenuhnya di dalam peperangan. Mereka lahir, besar dan berakhir syahid di dalam perang. Mereka juga mereproduksi generasi berikutnya di dalam peperangan dengan kerajaan Jepang (1942-1945). Dalam periode kolonial asing selama 72 tahun ini sudah menunjukkan ada 2 generasi yang lahir dan besar dalam konflik bersenjata. Merekalah yang merupakan generasi pelopor bagi terbentuknya karakter resisten yang sangat kuat dan liat.

Dalam periode Aceh di dalam Indonesia, katakanlah sejak 1945 hingga 2002 ini, maka ada sebuah generasi lagi yang sudah berusia sekitar 57 tahun yang mengalami masa revolusi sosial Cumbok (1945-1948), gerakan independen DI/TII (1953-1963). Masa di mana Indonesia berada di bawah rezim Soekarno. Baru turun gunung, maka generasi ini masuk ke dalam periode Indonesia di bawah rezim militer Soeharto karena keberhasilan serdadu Angkatan Darat meng kudeta Soekarno dan membasmi para pendukungnya dengan mengedepankan musuh bersama yang disebut Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Dalam periode ini, sebuah generasi Aceh merasakan betapa keji operasi militer Indonesia. Paling tidak, generasi ini

terkenang dengan aksi eksekusi kilat ala Westerling terhadap rakyat sipil di dua desa yang dikenal dengan pembantaian Pulot-Cot Jeumpa.

Di dalam Indonesianya Soeharto, ulama Aceh yang berharap akan terjadi pasang naik bagi kehidupan muslim di Aceh, karena Soeharto mempropaganda sentimen Islam versus Komunisme, ternyata mengalami tekanan politik yang luar biasa sejak awal 1970-an, atau tepatnya terbukti dalam Pemilu 1971.² Mereka membuat perhitungan politik yang keliru, rupanya. Kehendak untuk melakukan perlawanan terhadap akumulasi sikap politik rezim Indonesia pun digagas oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 dengan memproklamirkan kemerdekaan Aceh, dan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Hasan Tiro sendiri adalah prototipe sebuah generasi yang hidup di dalam zaman konflik bersenjata, sejak paruh akhir masa kolonial Belanda, lalu Jepang, dan masuk ke periode Indonesia dengan Revolusi Sosial Cumbok dan gerakan DI/TII. Generasi ini juga sangat kaya dengan pengalaman politik bernegara.

Bayangkan saja, nenek saya yang termasuk dalam katagori orang awam, di masa DOM pernah mengatakan: Serdadu sekarang jauh lebih buas daripada serdadu di masa Belanda, Jepang maupun DI/TII.³ Pada level rakyat, generasi ini memiliki pengalaman yang luar biasa tentang konflik politik dan ekonomi yang berkembang menjadi peperangan, atau melahirkan operasi militer. Akibatnya, generasi ini pun bisa membuat sebuah perbandingan tentang kebuasan kaum serdadu dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Aceh dari zaman ke zaman.

Adalah menjadi sebuah realitas sosial, bila pengalaman politik yang dimiliki oleh lapisan elite Aceh mengkristal menjadi sebuah cita-cita politik dan kesadaran akan nasionalisme keacehan dengan spirit untuk independen –jika dilihat dari sisi Aceh; atau untuk memberontak, memisahkan diri atau separatis bila dilihat dari kacamata politik Indonesia. Namun, Hasan Tiro telah merumuskan ideologi GAM, yang menurut Mette Lindorf Nielsen, “sebagai korban dari ‘neo-kolonialisme’.”⁴

Adalah menjadi kenyataan kerakyatan, bila pengalaman kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh rakyat mengkristal menjadi sebuah sikap perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman sekali pun dianggap sah oleh entitas politik yang berkuasa. Namun, di dalam setiap diri individu Aceh berkecamuk, atau terjadi kontradiksi antara keharusan melawan kezaliman sebagaimana dituntut oleh Tuhan dan eksistensi hidup dan martabatnya dengan sikap harus berhadapan dengan sebuah entitas politik yang sah, yakni negara -- yang kadangkala mendapat pengukuhan dari fatwa ulama berupa anjuran untuk tunduk.

Pertemuan antara kedua realitas di atas adalah dasar yang fundamental bagi kesamaan nasib dan aksi sebagian besar rakyat Aceh dewasa ini. Pengalaman generasi tersebut selalu diwariskan ke generasi berikutnya. Begitu sebuah generasi sudah melek politik, maka sikapnya merefleksikan sikap generasi sebelumnya.

Karena itu, adalah menjadi sangat bersifat propaganda kosong bila menggembarkan gerakan independen Aceh merupakan keberhasilan dari segelintir elite yang frustrasi dalam memprovokasi sebagian kecil generasi muda putus sekolah yang menganggur. Perihal yang terakhir ini, kita masih bisa melihat dari kacamata Tim Kell dalam bentuk rumusan bahwa sebagian besar elite Aceh, atau kaum menengah ke atas telah berhasil mengalami Indonesianisasi melalui metode birokratisasi segala sisi pemenuhan kebutuhan hidup dan pendekatan militeristik rezim Soeharto.

² Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion*, 1989-1992. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1995.

³ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik I*. Jakarta: Cordova+LSPP+Yappika, 2000. Halaman 139.

⁴ Mette Lindorf Nielsen, “Questioning Aceh’s Inevitability: A Story of Failed National Integration?”. 2002. www.globalpolitic.net.

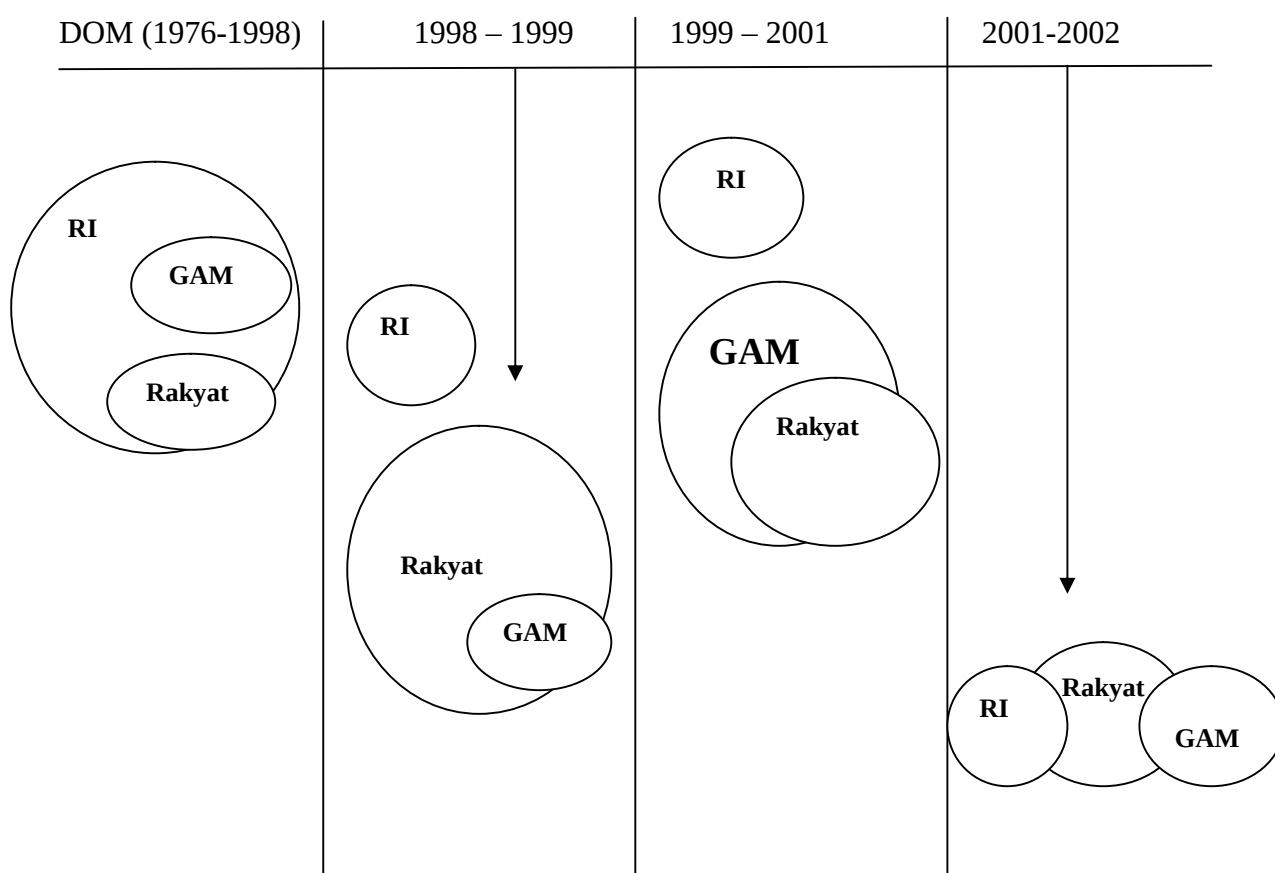
Perebutan Dominasi 1976-2002

Setiap kekuatan yang terlibat dalam konflik mengalami pasang-surut dalam mendominasi kekuatan politik lainnya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam periode 1976-1998, rakyat masih dalam kondisi belum terorganisasi, kecuali dalam bentuk lama, yakni organisasi massa yang cenderung memiliki afiliasi politik pada partai tertentu. Sementara GAM sebagai sebuah entitas politik yang masih embrionik (kecil) dan tidak dikenal, kecuali pada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu Negara RI dengan mudah dapat mendominasi Aceh, baik dengan pendekatan represif terhadap rakyat atau masyarakat sipil maupun operasi kontra-gerilya terhadap anggota politik dan para gerilyawan GAM.

Baru setelah lahir gerakan reformasi di Aceh sejak Maret 1998, mulai muncul kekuatan organisasi masyarakat sipil baru yang merupakan hasil persilangan antara para aktivis mahasiswa (ekstra kampus dan ekstra ormas) dengan para aktivis NGO yang transformatif. Mereka merupakan embrio dan pionir gerakan masyarakat sipil di Aceh dengan karakteristik yang baharu karena memiliki jaringan dengan komunitas nusantara dan internasional, respek terhadap demokrasi dan HAM, berpihak pada rakyat serta memiliki spirit perlawanan dengan metode non-kekerasan terhadap kezaliman rezim militer Soeharto. Gerakan kaum muda ini memantik –bersamaan dengan kejatuhan rezim militer Soeharto—gerakan massa hingga status DOM dicabut oleh Jenderal TNI-AD Wiranto pada 7 Agustus 1998.

Sejak Agustus 1998, massa sipil yang cair –yang sejak 1976-1998 menghadapi aksi kejahatan kemanusiaan oleh pihak Indonesia-- mulai mengorganisasikan dirinya sehingga ratusan organisasi masyarakat sipil (OMS) muncul di seluruh Aceh dengan berbagai fokus perhatian: HAM, kemanusiaan, pemberdayaan korban kejahatan kemanusiaan, pengamanan kampung dan penuntutan politik yang cenderung berberbentuk gerakan independen yang bersifat non-kekerasan. Aksi ini mengambil momentum perlawanan rakyat Indonesia terhadap rezim militer Soeharto. Para inisiatornya adalah segelintir aktivis mahasiswa yang terlibat dalam organisasi non-kampus dan bekerjasama dengan segelintir aktivis NGO. Mereka mengawali gerakannya di kampus Universitas Syiah Kuala karena merupakan wilayah yang masih tersedia ruang kebebasan publik. Akibat gerakan di seluruh nusantara itu, maka pada periode 1998-1999, praktis Negara RI bangkrut secara politik yang secara otomatis terjadi degradasi heroisme di dalam tubuh serdadu Indonesia, khususnya dari kesatuan Kopassus yang selama ini dianggap oleh rakyat, khususnya para aktivis mahasiswa, HAM dan kerabat para korban bertanggungjawab terhadap segala aksi kejahatan kemanusiaan di seluruh nusantara. Sementara di Aceh bukan saja tersedia ruang publik yang sangat luas, namun GAM juga mengambil momentum tersebut untuk mengembangkan eksistensi dirinya hingga mulai berkembang dengan pesat.

Dinamika Dominasi di Aceh 1976-2002



Catatan: Baik RI maupun GAM dilihat sebagai sebuah entitas politik. Sementara rakyat adalah entitas non-politik dalam artian masyarakat sipil (MS) yang di dalamnya terdapat sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS).

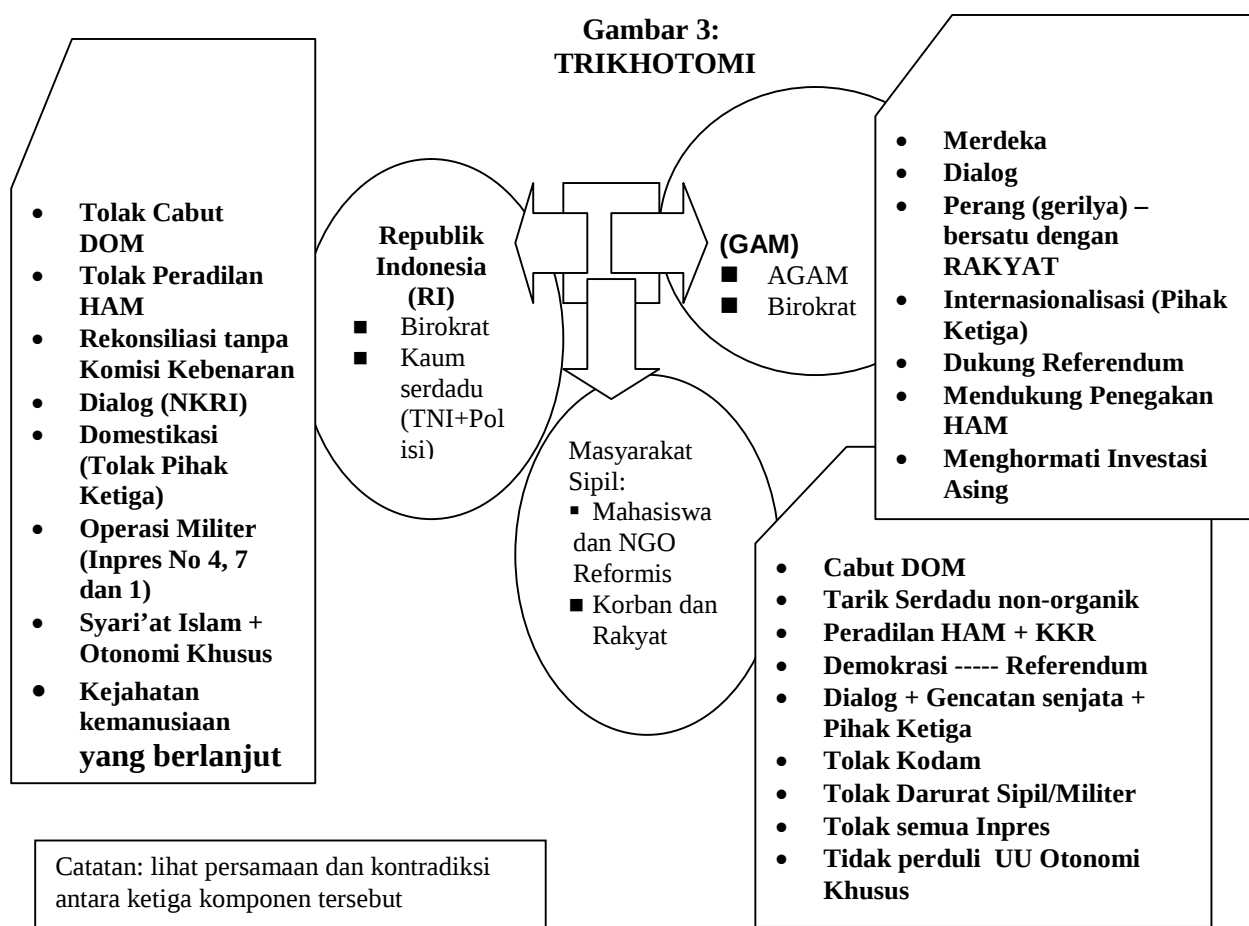
Pada periode ini OMS mendominasi GAM dan, mereka melawan Negara RI dengan tuntutan (1) jatuhkan rezim militer Soeharto; (2) cabut status DOM; (3) penegakan hukum terhadap para serdadu Indonesia yang menjadi pelaku (penanggungjawab komando dan eksekutor di lapangan) kejahatan kemanusiaan di Aceh. Akibat pengabaian rezim Indonesia terhadap tuntutan tersebut –dan spirit demokrasi yang kuat serta mendapat inspirasi dari penyelenggaraan referendum di Timor Leste— maka OMS di Aceh (dengan inisiator pelajar, pemuda dan mahasiswa yang membentuk SIRA) masuk ke dalam tuntutan politik, yakni referendum.

Puncak tuntutan tersebut digelar pada 8 November 1999 dengan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Aceh, khususnya para korban dan kaum muda. Kaum elite, seperti ulama yang tergabung dalam HUDA, juga menuntut referendum. Pihak GAM yang pada awalnya tidak setuju dengan tuntutan tersebut, tiba-tiba mengambil kebijakan untuk sepakat karena didukung oleh rakyat di seluruh Aceh. Namun, kaum politisi dan birokrat – yang merupakan lapisan menengah atas di Aceh, tetap mengambil sikap ragu-ragu untuk mendukung, dan akhirnya diam. Mereka mengajukan tuntutan politik yang kemudian melahirkan UU NAD. Bahkan, dalam periode ini, keamanan kampung dikontrol langsung oleh rakyat. Patroli normal polisi tidak dibutuhkan, bahkan dianggap justru mengacaukan ketentraman saja.

Itulah puncak dominasi masyarakat sipil di Aceh. Selanjutnya, GAM (1999-2001) mengambil alih posisi dominasi politik di Aceh. GAM berhasil melakukan restrukturisasi pemerintahan desa, dan menghentikan roda pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga Indonesia berarti sebatas pagar pendopo dan kantor Bupati dan Gubernur Aceh, berikut barak-barak serta pos-pos serdadu militer dan polisi Indonesia. Di sisi lain, setiap dinamika

masyarakat sipil harus berhadapan dengan GAM. Bahkan GAM mengambil alih isu-isu demokrasi, HAM dan pola-pola gerakan perlawanan masyarakat sipil, seperti: boikot, mogok, pengungsian dan investigasi pelanggaran HAM, yang kemudian dikampanyekan melalui internet. Pada periode ini GAM mengontrol seluruh kehidupan di Aceh.

Kekuatan GAM yang demikian besar –serta MP GAM yang telah disusup oleh para desertir AGAM, cuak dan serdadu di tingkat lapangan (di Aceh) sehingga tidak bisa berkembang— secara otomatis perundingan harus dilakukan oleh pihak RI dengan GAM. Meskipun GAM memanfaatkan “Jeda Kemanusiaan” untuk merekrut dan mengkonsolidasi kekuatan militernya, sebenarnya perundingan Jenewa yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 itu, juga merupakan momentum bagi pihak Indonesia untuk menyusupkan kembali pasukannya di Aceh. Pendirian pos-pos serdadu yang berada di pedesaan, patroli normal polisi yang intensif, program Tentara Masuk Desa adalah fenomena yang menunjukkan Indonesia mulai menguasai Aceh kembali.



Dalam periode (2001-2002), bukan saja kontak senjata mulai meningkat, tetapi kejahatan kemanusiaan kembali meningkat pesat. Operasi militer bukan saja untuk menyergap GAM, tetapi juga digunakan untuk mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Dalam lain kata, musuh Indonesia di Aceh, bukan saja GAM, tetapi juga organisasi masyarakat sipil yang telah tumbuh di seluruh Aceh. Awal sikap permusuhan Indonesia terhadap masyarakat sipil yang dilakukan secara terbuka adalah penghambatan Kongres I Para Korban Kejahatan Kemanusiaan di Kutaraja pada 4 November 2000. Selanjutnya pelarangan penyelenggaraan peringatan Referendum pada 8 November 2000. Serdadu Indonesia melakukan pemblokiran massa yang berkonvoi ke Kutaraja di antara pos-pos serdadu Indonesia yang tersebar di sepanjang jalan utama Kutaraja-Medan (di kawasan pantai Utara-Timur) dan Kutaraja-Singkel (di kawasan pantai Barat-Selatan). Serdadu Indonesia kembali melakukan kejahatan kemanusiaan yang masif dan serentak di seluruh Aceh (lihat lampiran daftar korban yang dikeluarkan oleh NGO di Aceh). Bahkan massa yang mencoba masuk ke Kutaraja melalui jalur

laut ditembak kapalnya layatnya, dan diusir agar kembali ke laut lepas tanpa perduli dengan penderitaan penumpang kaum perempuan dan anak-anak.

Dalam periode ini terbentuk trikotomi antara RI, GAM dan Masyarakat Sipil Aceh (Gambar 3). Sekalipun masyarakat sipil semakin terjepit, namun gerakan mereka telah menjadi salah satu target penghancuran Indonesia. Dalam lain kata, Indonesia, sebenarnya, sudah memiliki 2 musuh, yakni masyarakat sipil dan GAM. Sebaliknya, Aceh menghadapi satu musuh, yakni Indonesia. Sebab ada kesamaan-kesamaan penderitaan, dan akhirnya tujuan politik antara GAM dan masyarakat sipil di Aceh.

Kelemahan Jurnalis Dalam Mewartakan Konflik

Oleh: Hasudungan Sirait

Harus diakui bahwa media massa kita umumnya punya sejumlah kelemahan manakala mewartakan konflik. Ada yang gemar memelintir berita karena memang punya *conflict of interest*. Jadi posisinya partisan. Kalau kantor redaksi mereka ini sampai diduduki oleh kelompok yang merasa dirugikan itu mudah dimengerti. Ada yang pewartaannya cetek. Dalam arti simplistik, reduksionis, fragmentatif (sepotong-sepotong), kurang menjaring fakta dan lebih mengedepankan *talking news*. Ditambah lagi: sarat dengan opini. Jenis seperti ini yang paling jamak.

Kelemahan lain yang merupakan penyakit umum adalah sifat yang raksioner. Yaitu mewartakan hanya jika ada peristiwa. Contohnya: pers hanya menulis tentang konflik Aceh kalau terjadi kontak senjata TNI/Polri-GAM. Atau menulis soal konflik Maluku manakala bom meledak lagi di sana. Yang digarisbawahi dalam model reportase yang reaksioner ini adalah aspek 5 W + 1H kejadian terbaru itu, dengan mengabaikan latar historis konflik itu dan tahap resolusinya. Ketika memberitakan soal aksi mahasiswa atau buruh pola serupa ini yang dipakai. Yang diangkat sebatas kelompok mana yang unjuk rasa, berapa massanya, apa tuntutan mereka, dan apakah mereka bentrok dengan tentara/polisi. Persoalan mendasar apa sebenarnya yang menyembul di balik aksi unjuk rasa itu jarang ditonjolkan media terutama yang sajiannya berformat *straight/hard news*. Manakala kontak senjata atau aksi unjuk rasa itu sudah menjadi rutinitas, yang ditonjolkan media massa, kalau masih mewartakannya, adalah aspek *magnitude*-nya: berapa yang tewas atau berapa peserta demonstrasi dan berapa banyak yang terluka saat bentrok.

Bukti bahwa media massa di negeri ini cenderung simplistik, reduksionis, fragmentatif dan kurang menjaring fakta bisa kita lihat dalam pemberitaan soal konflik besar selama empat tahun terakhir. Konflik bisanya digambarkan seakan hanya melibatkan dua pihak, pokok masalahnya sederhana dan persoalannya berdimensi tunggal. Kasus Aceh misalnya. Dalam penggambarannya seolah yang bertikai hanya TNI/Polri dan GAM, dengan pokok masalah: kehendak GAM untuk memerdekakan Aceh yang kemudian direspons Jakarta dengan pengerahan angkatan bersenjata.

Tentu saja penggambaran seperti ini lemah dan jauh dari lengkap. Karena dalam kenyataannya baik *stakeholders* maupun pokok masalah jauh lebih rumit atau majemuk. Kalau diibaratkan sebagai sebuah bangun, sebuah konflik punya struktur dan dimensi yang berunsur banyak. Jadi, tidak seperti penampakan di permukaan. Realitas kemajemukan unsur bangun konflik inilah yang sering tidak tampak dalam pemberitaan media massa yang terbit di negeri ini. Apa pasal? Kemungkinan besar karena jurnalis peliputnya tidak mengerti hakekat konflik tersebut dan tidak mengenal petanya.

Resolusi Konflik

Jurnalis biasanya lebih tertarik pada dinamika dan eksekusi konflik. Aspek *magnitude* (besaran) seperti jumlah korban yang tewas atau terluka, harta benda yang binasa lebih menjadi perhatian para peliput. Kemudian suasana konflik, seperti jalannya pertempuran, sistem persenjataan, strategi yang diterapkan. Adapun upaya-upaya damai atau resolusi kurang menarik bagi jurnalis. Alasannya, publik yang menjadi khalayak sasaran media massa tak suka berita-berita tentang perundingan atau gencatan senjata. Publik menginginkan berita-berita yang panas (itu sebabnya, misalnya, di hari AS melancarkan 'serangan gurun' (*desert storm*) dalam Perang Teluk oplah *Suara Pembaruan* kabarnya sampai setengah juta eksemplar).

Seperti yang kerap dikritik Johan Galtung, jurnalis biasanya mereportase konflik serupa dengan melaporkan pertandingan sepakbola. Dalam reportase pertandingan sepakbola yang lazimnya digarisbawahi adalah hasil (kalah-menang atau imbang), skor, pencetak gol, jalannya pertandingan, momen-momen yang menarik (termasuk yang mendebarkan) dan, terkadang, animo penonton serta jumlah mereka. Reportase akan menarik kalau dibumbui dengan komentar di sana sini.

Tak bisa dipungkiri bahwa konflik merupakan jenis liputan yang ‘seksi’ bagi jurnalis. Sebab aspek layak beritanya (*magnitude, prominence, proximity, human interest, timeliness* dan *significance/impact*) biasanya ada dan bernilai tinggi. Pasar pun menginginkan sajian-sajian semacam ini. Pertanyaan kemudian muncul: apakah jurnalis hanya akan melihat aspek ‘keseksian’ berita saja serta permintaan pasar? Bagaimana dengan nestapa banyak manusia—yang sebagian perempuan dan kanak-kanak tak berdosa—yang merupakan korban konflik? Apakah akan dikesampingkan saja? Rasanya tidak tepat dan tak etis kalau sampai jurnalis menginginkan keberlanjutan dan keparahan konflik hanya karena mereka mendambakan objek liputan yang laku-jual.

Seyogyanya jurnalis memberi perhatian yang sama besar juga pada proses penyelesaian atau resolusi konflik. Kendati pun memang proses ini sering makan waktu, terseok-seok dan menjemukan. Denganewartakan secara serius resolusi konflik jurnalis telah berkontribusi dengan kehadiran perspektif damai.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika hendakewartakan resolusi konflik. Yakni yang akan menentukan lamban tidaknya proses damai berikut pencapaian di setiap tahapan. Antara lain adalah:

- Sejarah pihak-pihak yang bertikai
- Nilai-nilai yang mereka hayati bersama
- Forum-forum manajemen konflik yang bisa diterima semua pihak
- Pandangan para pihak tentang keadilan
- Komunikasi para pihak

Pokok Bahasan 3:

Perspektif Jurnalisme Damai

Apa sebenarnya jurnalisme damai? Apakah ia merupakan genre baru dalam jurnalisme, atau sekadar perspektif? Apa arti penting atau sumbangan jurnalisme damai sehingga perlu diperkenalkan, dipahami dan menjadi landasan kerja jurnalistik para jurnalis, terutama bagi mereka yang meliput konflik seperti yang terjadi di Aceh? Apa yang salah dengan jurnalisme yang diterapkan kebanyakan jurnalis saat ini, dan apa pula keunggulan jurnalisme damai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban di tengah beragamnya pandangan tentang jurnalisme damai. Di Indonesia isu ini cukup signifikan untuk diperbincangkan, mengingat peristiwa konflik adalah isu yang seksi dan selalu diliput media. Namun, beberapa aktivis HAM keberatan dengan penerapan jurnalisme damai karena produk jurnalisme dikhawatirkan justru akan "menghilangkan" para pelaku pelanggaran HAM. Jurnalisme damai diartikan sebagai liputan jurnalis tentang hal-hal yang damai atau menyejukkan, konflik ditutup-tutupi, bahkan bila perlu tidak diberitakan sama sekali. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa jurnalisme damai artinya persoalan SARA dikuburkan.

Sebagai "barang baru", jurnalisme damai memang masih menimbulkan banyak interpretasi, apalagi kelahirannya juga bukan digagas dan dikonsepsikan oleh para pekerja pers kita. Tapi yang jelas, di tengah maraknya konflik bersenjata di Aceh yang banyak menimbulkan penderitaan, pelanggaran HAM, problem-problem sosial-ekonomi, psikologis, rasa aman yang hilang, sebuah Kompas dibutuhkan para jurnalis yang meliput konflik Aceh. Tujuannya agar liputan yang dihasilkan bukan makin mengobarkan konflik, tetapi menyumbang pada proses resolusi konflik.

Namun perspektif dan aspek ketrampilan teknis seperti apa yang harus dikuasai jurnalis untuk meliput konflik Aceh dengan menggunakan perspektif jurnalisme damai?

TUJUAN

- Jurnalis dapat mengenali perbedaan yang mendasar antara Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
- Jurnalis mampu membedakan berita yang berperspektif Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
- Jurnalis mengetahui esensi perspektif Jurnalisme Damai dalam peliputan konflik

POKOK BAHASAN

METODE

- Ceramah
- Diskusi

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- LCD
- Laptop
- Transparansi bagan perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
- OHP

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan

- Sebelum sesi ceramah dimulai, sebagai pengantar minta tiap-tiap peserta untuk menjelaskan tentang apa itu jurnalisme damai menurut versi mereka. Kepada mereka dimintakan juga pandangan mereka terhadap perspektif jurnalisme damai.
- Lanjutkan kegiatan tadi dengan sesi ceramah di mana narasumber diminta untuk memaparkan tentang sejarah dan latarbelakang jurnalisme damai, mengapa bisa muncul. Kemudian tentang perbedaan antara jurnalisme damai dengan jurnalisme mainstream (jurnalisme perang) serta pentingnya peranan jurnalisme damai dalam menyumbang pada proses resolusi konflik.
- Setelah ceramah narasumber selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi sesuai dengan topik yang dibawakan narasumber, dengan tujuan peserta bisa lebih memahami mengenai perspektif jurnalisme damai dan hakekatnya dalam menyumbang resolusi konflik. Pada sesi ini peserta diharapkan aktif untuk saling bertukar pikiran maupun melontarkan pertanyaan atau tanggapan sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok bahasan yang dibawakan.

Bahan Bacaan -1 Pokok Bahasan 3:

Jurnalisme Perdamaian, Sebuah Pilihan

Oleh: Saur Hutabarat

Meliput konflik, bagi pers Indonesia pada umumnya, tidak berbeda dengan meliput berita pada seumumnya. Yang berlaku ialah kriteria nilai berita seumumnya, dengan sudut pandang liputan dan pemberitaan yang juga seumumnya. Jurnalisme, seperti diketahui, dalam keseharian profesi ini, adalah berwatak seperti meliput perang. Ia menonjolkan aspek-aspek yang dramatis, yang *magnitude*-nya besar, yang melibatkan tokoh. Semakin berdarah-darah, semakin banyak korban, semakin menyangkut elit semakin tinggi nilai berita.

Lalu apa sebenarnya yang bisa disumbangkan jurnalisme pada situasi konflik? Jawabannya seperti yang dikemukakan Johan Galtung, Profesor Ilmu Perdamaian dan Direktur TRANCEND Peace and Development Network yang mengamati bahwa di dunia ini ada dua macam jurnalisme yaitu jurnalisme perang dan jurnalisme damai. Apa yang digunakan pers dan dibaca khalayak setiap hari adalah hasil dari liputan dengan perspektif jurnalisme perang. Jurnalisme perang bercirikan, pertama, semakin besar jumlah korban, semakin tinggi nilai beritanya. Jadi kalau ada kecelakaan di jalan raya dengan jumlah korban satu orang maka nilai berita peristiwa tersebut kecil. Namun jika bus sekolah yang berisi puluhan siswa masuk jurang, maka nilai beritanya tinggi. Jadi semakin kecil jumlah korban, semakin kecil nilai beritanya. Kedua, dalam jurnalisme perang, yang disorot adalah dampak yang terlihat, bukan dampak yang tidak terlihat.

Meliput olah raga adalah seperti meliput perang. Tidak ada orang yang melihat dari sisi kekalahan salah satu pihak, tapi yang lebih ditonjolkan adalah dari sisi pihak pemenang. Jurnalis juga memiliki kecenderungan serupa ketika meliput konflik. Berita yang muncul di koran adalah berapa pihak yang mati di kedua belah pihak yang berkonflik. Jurnalisme perang selalu menggunakan perspektif bipolar, kau di sana, aku di sini. Karena itu Johan Galtung datang menawarkan bahwa sebenarnya meliput konflik itu bukan menggunakan jurnalisme perang, tapi yang digunakan adalah *peace journalism*, atau jurnalisme perdamaian.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang dimaksud dengan jurnalisme perdamaian ini? Pertanyaan seperti ini muncul karena, memang, jurnalisme Indonesia, boleh dibilang, belum merasa disentuh oleh jurnalisme perdamaian. Bahkan sesungguhnya, jurnalisme perdamaian masih merupakan jurnalisme yang aneh bagi kebanyakan kita.

Jurnalisme damai adalah jurnalisme yang mengambil teladan dari liputan kesehatan. Misalnya meliput kesehatan mengenai penderita kanker. Karena kanker itu akan menghabiskan tubuh si penderita dari waktu ke waktu hingga akhirnya meninggal, sang jurnalis akan menceritakan apa penyebab dari kanker, meliputi gaya hidup, lingkungan, faktor keturunan, kemungkinan penyembuhan serta memaparkan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah penyakit kanker.

Ini berarti dalam meliput konflik jurnalis harus menggeser perspektifnya dalam melihat suatu konflik. Yang pertama harus digeser dan dibuang habis-habisan adalah prinsip atau pikiran yang memaknakan bahwa yang terlibat konflik itu hanya dua pihak. Hal tersebut jelas tidak benar, karena sejatinya konflik selalu melibatkan banyak pihak. Dengan prinsip multipolar maka sebelum melakukan peliputan jurnalis sebelumnya sudah harus melakukan pemetaan konflik. Sebagai contoh, apakah yang membunuh TNI itu selalu saja GAM? Mungkin bisa saja pelakunya adalah Brimob. Atau apakah yang membunuh Brimob itu selalu GAM? Belum tentu. Begitu seterusnya.

Yang kedua jurnalisme perdamaian selalu mengemukakan apapun penyebab munculnya konflik atau latar belakang konflik, selalu ada pihak yang tidak menang, yaitu korban konflik itu sendiri. Ini berarti jurnalisme perdamaian tidak mengutamakan sumber informasi dari pihak elit, misal ke Komandan Korem atau ke Kodam. Yang perlu dilakukan adalah mencari tahu siapa yang menjadi korban. Maka dalam jurnalisme perdamaian, jurnalis harus memindahkan sudut pemberitaan turun ke tingkat masyarakat. Setiap konflik itu hanya ada tiga pihak yang selalu menjadi korban, yaitu kaum ibu, anak-anak dan orang lanjut usia. Merekalah yang menjadi subyek liputan, merekalah yang menjadi narasumber. Inilah korban yang tidak mampu bersuara (*voiceless*).

Ketiga, jurnalisme perdamaian menuntut keaktifan jurnalis untuk mencari dampak yang tidak terlihat. Apakah gerangan itu? Pertama, adalah dampak humanis, sebab yang mati tinggal dikubur saja, tetapi justru implikasi dari trauma itu yang harus dikedepankan. Yang kedua adalah kerusakan-kerusakan struktural. Yang bisa disumbangkan oleh jurnalisme perdamaian dalam penyelesaian konflik adalah mengembangkan liputan ke arah korban, memfokuskan pada dampak yang tidak kelihatan dan dari sana muncul keinginan berempati terhadap korban konflik. Untuk lebih jelasnya perbedaan kedua perspektif tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

JURNALISME PERANG	JURNALISME DAMAI
▪ bipolar	▪ multipolar
▪ tertutup	▪ terbuka
▪ kita-mereka	▪ kita-kita
▪ reaktif	▪ proaktif
▪ melihat dampak yang tampak	▪ melihat dampak yang tidak tampak
▪ menang-kalah	▪ menang-menang

Terkadang kita terlalu romantis melihat jurnalis dan kadang terlalu kejam kepada jurnalis. Ini juga tidak patut dalam kerangka profesi. Contoh kasus, bolehkah kita sebagai dokter bedah mengamputasi kaki seorang perempuan cantik? Jangankan cantik, tidak cantik pun tetap saja kakinya hilang. Kemudian, kalau kita seorang algojo, bolehkah saya dengan perasaan menghukum si A? Itu memang pertanyaan-pertanyaan profesi yang sulit dijawab. Mungkin si Algojo itu menghukum atau menembak karena itu adalah perintah Undang-Undang, tetapi dia tetap melakukan walaupun barangkali dengan menangis. Jurnalisme memang kerap diromantisir sedemikian rupa sehingga terkadang mirip besi. Yang menjadi persoalan adalah ketika jurnalis mempublikasikan tulisannya, di sini baru terlihat peranan jurnalis. Tetapi ketika meliput, itu adalah persoalan empati, sebagai bagian psikologi yang profesional. Kalau anda meliput orang yang terluka dan anda tertawa-tawa, anda berarti gila!

Satu contoh yang paling bagus dari empati adalah ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat di Afrika Selatan, satu stasiun televisi menyiarkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dan di *clos up*, sehingga terlihat air susu ibu tersebut tidak keluar sama sekali. Akibat sang ibu terlalu kurus maka anaknya tidak bisa mendapatkan air susu yang dibuthkannya. Dan gambar inilah yang menggerakkan dunia sehingga banyak membantu Afrika Selatan ketika itu.

Jadi liputan konflik memang harus dipindahkan dari level elit ke level masyarakat, lalu menggeser *angle*-nya ke arah pusat penderitaan, mengungkap korban, dan yang tidak lupa adalah menyorot akibat-akibat dari konflik itu. misalnya anak yang masih bnelasan tahun sudah terbiasa mendengar letusan tembakan, pembunuhan, mayat di mana-mana, kita tidak tahu bagaimana pertumbuhan anak itu nantinya. Banyak sekali implikasi yang tidak tampak, tapi oleh jurnalisme perang kita dipenjarakan bahwa apa yang disebut berita adalah jika makin banyak korbannya, dan semakin berdarah-darah. Karena terperangkap dalam perspektif jurnalisme perang, terkadang meskipun jurnalis sudah melihat langsung darah korban, ia belum akan menuliskannya sebelum dikonfirmasi ke Pangdam. Padahal Pangdam sendiri tidak tahu peristiwanya. Dalam hal ini jurnalis masih tertular dan mengidap penyakit orde baru. Ini harus diakui jurnalis. Banyak pelatihan yang dilakukan untuk membersihkan pola pikir semacam itu. termasuk ada tidaknya *check and recheck* dan kebijakan para redaktur. Memang masih banyak yang harus kita benahi. Tapi terus terang jurnalisme perdamaian menuntut kesabaran dari *editorial policy* dan institusi bahwa orang tidak bisa sehari menghasilkan dua berita.

Jurnalis harus dibenam di lokasi konflik selama berminggu-minggu, baru mereka menemukan siapa korban perkosaan, bagaimana seorang bayi bisa disiram air panas. Jadi memang harus ada kesadaran baru, terutama dari pemimpin redaksi bahwa meliput konflik itu butuh waktu, tidak cukup wartawan hanya mengirimkan *straight news*, tapi harus membuat *angle* yang lain, mencari dampak yang tidak kelihatan dan caranya adalah dengan membiarkan jurnalis berlama-lama di lapangan. Sebenarnya di dalam pers bebas sekarang ini justru semakin bisa mendapatkan cerita-cerita yang eksklusif yang membuat media tersebut semakin dihormati.

Jurnalisme perdamaian jelas merupakan sebuah pilihan. Ia pilihan yang pas, karena Indonesia, adalah negeri yang menyimpan potensi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menerapkannya, pasti diperlukan pelatihan yang intensif. Ia juga memerlukan “kesabaran” di lapangan. hal yang masih tergolong kemewahan bagi sebagian pers. Karena itu, untuk menerapkan jurnalisme perdamaian diperlukan dukungan manajemen dan kebijakan redaksional yang kuat.

Bahan Bacaan - 2 Pokok Bahasan 3:

Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai

Oleh: Stanley Adi Prasetyo, Institus Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

Hasil Reportase

Durian Petto yang Telah Layu [1]

Oleh: Ivo Lestari

Sumber : Aceh Kita Com edisi

Juni 2004 silam, seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Jakarta, datang bertandang ke Kota Langsa. Di sela-sela melakukan tugas advokasi, sang aktivis sempat mencicipi durian di Kota Langsa, yang memang lagi dibanjiri buah durian. Hampir saban malam, aktivis LSM itu makan durian, namun tak sekali pun menemukan durian dari Petto (pe-

to). Durian Petto ini terkenal sebagai durian terbaik di Kota Langsa. Sementara durian yang selama ini dijual di Langsa, berasal dari Medan Sumatera Utara atau daerah lain di Aceh.

Petto adalah nama salah satu desa yang ada di Kota Langsa. Desa itu dikenal sebagai desa sentra buah durian lokal. Sebelum konflik berkobar di Aceh, buah durian dari Desa Petto ini membanjiri setiap sudut kota Langsa. Sepanjang Jalan Ahmad Yani atau di depan Sentra Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan di trotoar jalan di sekitar Taman Bambu Runcing, banyak pedagang yang menjajakan durian hasil alam Desa Petto.

Salah seorang agen durian di Kota Langsa mengatakan, sejak konflik memuncak, dia tidak berani lagi masuk ke desa sentra durian untuk membeli durian dari penduduk. Saat ini, para pedagang dan agen kecil membeli buah manis itu dari agen-agen besar yang memasok dari Medan. Menurutnya, para pedagang dan agen sebenarnya lebih suka menjual durian produksi Desa Petto, karena lebih disukai pembeli.

Sebelum status darurat militer diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, jika musim durian tiba, orang-orang dari Langsa dan Aceh Timur lainnya, banyak yang datang ke Desa Petto, mencari buah durian. Calon pembeli lebih memilih datang ke kebun, selain harganya murah, mereka juga mendapat beberapa buah durian gratis. Muhammad, salah seorang petani durian di Petto mengaku, tiap ada calon pembeli yang datang ke kebunnya, dia selalu memberi beberapa buah durian gratis.

Sejak durian Petto langka di pasar, Adam, salah seorang pedagang yang juga agen, mengaku merugi setelah menjual durian yang dipasok dari Medan. Selain harganya mahal, kualitasnya pun tidak sebagus dengan produk Desa Petto. Menurut Adam, durian Medan tidak tahan, jika disimpan beberapa hari. “Kalau disimpan lebih satu malam, membusuk,” kata Adam, yang sudah menggeluti usaha ini sejak tahun 1980-an.

Ketika situasi keamanan masih kondusif, Adam sering keluar masuk kampung pedalaman, seperti Petto, Lokop, Lhok Nibong, Simpang Ulim dan Peureulak, untuk mencari buah durian. “Sekarang saya tidak berani,” sebutnya.

Petto adalah nama sebuah desa yang sejuk dengan rerimbunan pepohonan dari kebun-kebun warga setempat. Letaknya di Langsa bagian timur, atau sekitar delapan kilometer dari pusat Kota Langsa. Penduduknya, hanya 360 kepala keluarga dengan luas 900 meter persegi.

Di bagian timur, desa ini berbatasan dengan hutan lindung Aceh Timur yang dikenal dengan sebutan hutan kemuning. Selebihnya, sebelah barat, selatan dan utara, desa ini dikelilingi oleh perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara I Kebun Baru Langsa.

Untuk mencapai desa yang banyak memproduksi hasil alam ini, bisa dengan menumpang angkutan sudaco atau labi-labi (sejenis metromini di Jakarta –red). Namun tidak banyak angkutan ini melayani trayek ke Desa Petto. Itu hanya satu-satunya alat transportasi untuk bisa mencapai desa yang sejuk itu. Sebagai desa penghasil durian di Langsa dan Aceh Timur ini, Desa Petto sangat dikenal di kalangan masyarakat.

Ketika bertandang ke Desa Petto, udara sejuk langsung terasa ketika memasuki kawasan ini. Di pintu gerbang memasuki desa, pohon-pohon durian yang terdapat di kiri-kanan jalan, tampak rimbun. Tak terasa melelahkan, kendati perjalanan ke desa itu harus melewati jalan bebatuan sepanjang delapan kilometer. Sebenarnya, jalan menuju ke desa ini, beraspal, namun hanya sampai ke perbatasan Desa Kemuning. Selain bebatuan, jalan ke Desa Petto juga harus mendaki, dengan tanjakan yang tidak terlalu besar. Sepanjang perjalanan, akan melewati areal perkebunan sawit dan beberapa desa, seperti Desa Geudubang Aceh, Keude Rambe, dan Kemuning.

Rumah-rumah penduduk di Desa Petto, berbentuk sederhana. Ada yang berukuran 10x6 meter, namun ada rumah lain yang ukurannya lebih kecil. Konstruksi bangunan, banyak yang terbuat dari kayu. Ada beberapa rumah yang atapnya memakai *seng*, namun kebanyakan rumah

beratap daun rumbia. Di depan dan belakang rumah warga, banyak ditumbuhi pepohonan, membuat udara semakin sejuk.

Sayang, tidak ada fasilitas pendidikan di desa ini. Anak-anak seusia Sekolah Dasar (SD) terpaksa harus bersekolah ke SD di Desa Kemuning yang berjarak dua kilometer dari Desa Petto. Siswa sekolah menengah (SMP dan SMU), bersekolah ke Kota Langsa.

Tidak banyak pendatang yang tinggal di Desa Petto. Menurut Sulaiman, mereka sudah tinggal turun menurun di desa itu. Nenek moyang mereka, kata Sulaiman (64), sudah tinggal di Desa Petto sebelum Belanda memasuki Aceh.

“Hanya ada satu warga yang berasal dari Kampung Geudubang. Warga lainnya memang orang Petto asli. Nenek moyang kami sudah tinggal di sini sebelum Belanda datang,” kata Sulaiman.

Menurut Sulaiman, kebiasaan mereka menanam pohon durian di kebun, juga tradisi yang ditinggalkan nenek moyang mereka.

Sulaiman tinggal di sebuah rumah sederhana. Berjarak 20 meter dari rumahnya, sepetak kebun sawit yang sudah bisa dipanen, terhampar. Di bagian kiri rumahnya, sepetak kebun seluas empat *rante* (1 *rante* = 20x20 meter), ditanamai pohon durian lebat yang menjulang tinggi ke angkasa. Di depan rumahnya, ia menanami pohon pisang dan kakao.

Sulaiman yang dianggap sesepuh di Desa Petto mengatakan, kebun durian di desanya hanya tinggal sekitar 30 persen saja dari 900 meter persegi luas Desa Petto. Pepohonan durian yang ditanaman sudah banyak yang dimakan usia. Pun, banyak warga yang sudah melirik karet dan sawit sebagai komoditi lainnya.

“Kalau durian hanya dapat hasilnya setahun sekali. Kalau sawit atau karet bisa tiap minggu kita *nimbang* (jual),” kata Sulaiman.

Pun begitu, Sulaiman tidak menampik, sekali panen durian, warga Desa Petto menuai hasil yang banyak. “Dulu sekali musim, buahnya mencapai 3.000 buah. Saya bisa membeli sapi,” aku pria yang beristrikan Nurbaiti (45).

Dulunya, Sulaiman mempunyai kebun durian yang luas. Namun, kini hanya tinggal empat *rante* saja, selebihnya sudah ia tanami sawit dan karet. “Kami menanam pohon karet di sebagian kebun durian karena sejak konflik di Aceh, banyak orang yang susah, sehingga buah durian juga susah lakunya,” timpal Nurbaiti. “Orang-orang lebih mementingkan membeli beras dari pada membeli buah durian. Kalau dulu, sebelum keadaan susah, dua keranjang durian (50 buah), dalam waktu dua jam saja sudah habis terjual. Sekarang, 50 buah durian itu, dua hari belum tentu habis terjual.”

Desa Petto Saat Darurat Militer

Sulaiman *haqqul yakin* konflik bersenjata antara Pemerintah RI (TNI/Polri) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah membuat perekonomian mereka morat-marit. Sejak konflik bersenjata memanas, tidak banyak lagi pendatang yang mencari durian atau sekedar menikmati rerimbunan pohon durian di Desa Petto. Celakanya, agen dan pedagang durian lokal pun, tidak lagi membeli durian di desa ini. Morat-maritnya perekonomian warga Petto paling banyak dirasakan hingga berakhir masa darurat militer tahap kedua, 18 Mei 2004 lalu.

Pada awal pemberlakuan status darurat militer pula, warga Desa Petto bersama warga Desa Kemuning sempat mengungsi selama tiga hari ke Masjid Raya Langsa. Alasan warga mengungsi, kata Sulaiman, hanya untuk menghindari peluru nyasar. Pasalnya, saat itu, baku tembak kerap pecah di sekitar kebun durian warga. Naas! Sekembali dari pengungsian, barang-barang yang mereka tinggalkan di rumah, ludes dijarah orang tak dikenal (OTK).

Kekerasan juga acap mereka rasakan. Beberapa warga pernah menjadi korban pemukulan aparat TNI ketika sedang razia dan penyisiran untuk mengejar anggota GAM.

“Pernah, pada pagi hari tentara *sweeping* ke Desa Petto, kemudian yang laki-laki dikumpulkan di halaman pos kamling. Mereka kemudian ditanya tempat persembunyian GAM,” kata Erni (30) salah seorang warga Desa Petto. “Mereka kemudian dipukul, ditampar, dan disiksa tentara. Tentara (TNI) bilang, warga Petto membantu GAM.”

Erni mengaku melihat langsung pemukulan yang dialami kaum lelaki desanya. “Saya mengintip lewat celah dinding rumah,” kata Erni, yang rumahnya berhadapan dengan pos kamling.

Menurut Erni, sebelum darurat, GAM pernah meminta bantuan pajak *nanngroe* kepada warga Petto. “Waktu itu siapa yang berani melawan, anggota GAM bawa senjata,” terang Erni.

Memang, ada enam orang warga Petto yang bergabung dengan anggota GAM. Menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, di penghujung darurat militer tahap kedua, lima dari enam warga yang bergabung dengan GAM itu, sudah menyerahkan diri. Kini, mereka sudah bekerja di kampung. Sementara seorang lagi yang menjabat sebagai Panglima Sagoe, hingga kini belum tertangkap.

Ketika pasukan TNI atau Polri mencari anggota GAM, warga Petto sering dilarang pergi ke kebun atau ladang. Sulaiman mengatakan, seorang warga menjadi korban peluru nyasar, setelah pergi ke kebun, tidak menghiraukan permintaan pasukan TNI.

“Korban sudah seminggu tidak *mendodos* (memetik) sawit, dan tidak ada uang makan. Makanya dia nekat pergi ke kebun,” cerita Sulaiman. “Dari kondisi mayat, warga yakin kalau korban ditembak ketika sedang *mendodos* sawit.”

Beberapa warga, curiga kalau korban bukan terkena peluru nyasar, tapi memang sengaja ditembak. “Maunya kalau orang tidak bawa senjata, jangan ditembak,” sebutnya, sembari mengatakan, jarak antara kebun dan rumah korban hanya terpaut 50 meter saja.

Masa-masa sering menuai larangan ke kebun itulah, perekonomian warga Petto bertambah buruk. “Susah sekali, mau ke kebun *ngambil* karet atau *mendodos* sawit enggak boleh. Terus, kami mau kerja apa?” Sulaiman, tersenyum getir.

Jika kondisi keamanan stabil, dalam seminggu warga bisa mengantongi uang sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu, dari menjual getah dan sawit. Perkebunan sawit dan karet yang bisa diandalkan warga Petto untuk menopang hidupnya.

Lalu, bagaimana dengan durian yang sempat melambungkan nama Petto di Aceh Timur dan Langsa?

Durian Petto yang Telah Layu [2]

Menurut Sulaiman, durian tidak bisa lagi diandalkan sebagai penopang hidup. Kejayaan durian, tinggal kenangan. “Kalau dulu, sebelum konflik, jika musim durian tiba para agen dan pedagang buah sering datang ke desa kami. Bahkan banyak yang datang ketika buah masih muda,” sebut Sulaiman, dibenarkan istrinya.

Beberapa tahun silam, durian masih menjadi andalan warga untuk menopang hidup. “Kalau dulu, harganya mahal,” kenang Sulaiman.

“Dulu, kalau musim buah durian, orang-orang dari Kota Langsa, berombongan datang ke sini membeli buah durian,” Erni menimpali.

“Bukan cuma musim buah durian, hari-hari biasa pun desa kami ramai dan selalu didatangi agen yang ingin membeli pinang, kakao, dan pisang,” sambung Nurbaiti.

Lantas, dikemanakan buah durian hasil panen sekarang ini?

Sejak tahun 1998, buah durian Desa Petto tidak mudah lagi ditemukan di pasar-pasar. Ketika masa panen tiba, pemilik durian membagi-bagikan kepada kerabat, dan keluarga yang berada di luar Petto. Warga juga mulai mengabaikan tanaman duriannya. Hal ini disebabkan, karena warga tidak berani lagi ke kebun, menunggu durian jatuh. Perawatan terhadap pohon durian pun, jarang dilakukan. Akibatnya, pohon durian tidak lagi banyak menghasilkan.

“Mungkin karena pohon-pohonnya sudah tua atau tanah di Desa Petto sudah tidak subur lagi,” kata Sulaiman sambil tersenyum.

Konflik berkepanjangan tidak hanya berimbas pada perekonomian warga. Menurut Nurbaiti, banyak anak-anak di Desa Petto yang hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Menurut Erni, ada sekitar 50 anak berusia SMP dan SMA yang putus sekolah atau terancam putus sekolah. “Anak-anak banyak yang *nggak* bisa

melanjutkan sekolah, karena tidak ada biaya. Untuk ongkos labi-labi saja, sekali jalan Rp 3.000, kalikan saja sebulan. Belum lagi beli buku dan SPP,” kata Nurbaiti.

Jika kondisi aman, dari hasil kebun sawit dan karet, mereka bisa mengantongi uang sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per minggunya. “Nanti, ada juga dibeli biji coklat (kakao) dan pinang,” timpal Nurbaiti.

Namun, Erni mengaku penghasilan dari menjual biji coklat dan pisang tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. “Seminggu dapat Rp 20 ribu, cuma cukup beli beras murah saja,” timpal Erni.

Erni saban hari mengumpulkan biji coklat yang dijual seminggu atau sepuluh hari sekali. Harga biji coklat kering berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kilogram. Selain mengandalkan coklat dan pisang, warga Petto juga menjadikan biji pinang sebagai penambah penghasilan. “Kalau pinang, ada beberapa agen yang langganan datang ke sini untuk membeli. Harganya Rp 2.500 per kilogram,” ujar Fitri, anak putus sekolah. Fitri bisa mengumpulkan biji pinang antara 10-15 kilogram per minggu.

Para perempuan di Desa Petto kebanyakan ikut suami mereka ke kebun untuk menderes karet, untuk menambah pendapatan. Tak ada pekerjaan lain yang mereka lakukan, selain menderes karet. Anak lelaki mereka juga ikut menderes karet atau mendodos sawit. Kebanyakan dari mereka tidak lagi bersekolah, dan hanya tamatan SD dan SMP. Remaja perempuan di Desa Petto, banyak yang sudah menikah. Rata-rata, setelah menikah mereka akan ikut bekerja di kebun bersama suaminya.

Tidak semua warga Petto mempunyai kebun sawit dan karet. Nah, biasanya mereka bekerja sebagai buruh di kebun durian, karet dan sawit milik seorang kontraktor dan pengusaha yang tinggal di Langsa.

Lalu, bagaimana kehidupan sosial mereka?

Kehidupan masyarakat Petto masih kental nuansa adat dan budaya Aceh. Termasuk dalam bertani sekali pun. Mereka, kata Nurbaiti, tidak akan menjual buah pertama dari pohon yang baru pertama kali berbuah. Juga, pemilik durian pun, tidak akan menjual buah yang masih kecil. “Itu *pantang*, kalau kecil *nggak* boleh dijual,” kata Sulaiman.

Nuansa keagamaan di desa ini, juga masih kental. Setiap Jum’at siang, kaum perempuan berkumpul di *meunasah* (surau) untuk membaca Yasin dan *wirid*. “Kalau anak-anak ngaji selesai dhuhur. Mereka belajar di dayah (pesantren) di dekat balai desa,” kata Muhammad, suami Erni. Pasangan suami istri ini telah dikaruniai tiga anak, satu perempuan dan dua laki-laki.

Ketika berkunjung ke Desa Petto, situasi keamanan sudah mulai membaik. Menurut keterangan warga, tidak ada lagi kontak tembak TNI dan GAM di Petto. Suara tembakan, juga tak lagi terdengar di sekitar kebun warga.

Menurut Sulaiman, kondisi keamanan sudah membaik sejak darurat militer dinyatakan berakhir. Sejak itu pula, warga sudah bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk pergi ke kebun untuk menderes karet dan mendodos sawit, dari pagi hingga menjelang sore hari. Pada sore sekitar pukul 15.00 WIB, mereka membawa hasil kebunnya ke pasar Kota Langsa. Pada malam hari, warga juga sudah berani menjalankan aktivitas di kampungnya.

Agen yang dulunya enggan berkunjung ke Petto, kini mulai berdatangan. Beberapa keluarga yang berasal dari suku Jawa, pekerja di kebun karet milik seorang pengusaha di Langsa, sudah mulai berani tinggal di Petto, suatu tindakan yang tidak pernah dilakukan, ketika badai konflik sedang memanas dulunya.

Erlinawati (37) warga pendatang yang bersuamikan warga bersuku Jawa mengatakan, interaksi sosial antara dia, suaminya dengan warga Desa Petto, berjalan dengan baik. Erlina dan suaminya, sudah lima tahun tinggal di Desa Petto, setelah membeli sepetak tanah. “Tanah di sini murah,” kata Erlina yang membeli tanah seluas 1.200 meter bujur sangkar seharga Rp 6 juta.

Sulaiman berharap, situasi keamanan yang sudah membaik ini, bisa terus berlanjut. Karena, hanya dengan begini warga Petto bisa mencari nafkah dan berinteraksi sosial. “Semoga masa depan anak-anak di desa kami semakin baik,” harapnya.

Pria ini mengidamkan, dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sangat kompleks ini, pemerintah mengedepankan cara-cara yang damai. Dia kemudian memberi contoh penyelesaian konflik Aceh semasa Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh.

“Waktu itu perang besar juga, tidak ada beda dengan sekarang. Pasukan yang dikirim waktu itu, *mubrih* (Brigadi Mobil, Brimob –red). Soekarno memerintahkan semua pasukan komandan dan panglima DI/TII turun dari hutan, mereka dipanggil dan ditanya apa maunya. Mereka diajak berdialog dan bermusyawarah,” kenang Sulaiman. “Orang GAM berjuang kan karena susah, tidak adil. Kalau penyelesaian tidak merangkul atau tidak melalui dialog, maka rakyat yang susah.”

Sulaiman masih ingat, pasca rekonsiliasi itu, pasukan DI/TII akhirnya diangkat menjadi anggota TNI. “Batalyon 112 sekarang,” sergahnya.

Pasokan durian dari Desa Petto tidak lancar, menyebabkan harga durian di Langsa dan Aceh Timur mahal. Kalau biasanya harga durian hanya Rp 5.000 (paling mahal), maka sekarang durian dijual Rp 10.000 per buah. “Biasanya kalau buahnya kecil-kecil dijual per *tumpok*, satu *tumpok* mencapai lima buah. Harganya paling mahal Rp 15 ribu,” kata Miyah, salah seorang penjual buah-buahan di Langsa.

Durian asal Petto banyak dicari pembeli. Pasalnya, durian Petto terbilang bagus kualitasnya. Rasanya yang manis dan isinya yang tebal, membuat durian Petto sangat digemari pembeli, selain buahnya yang besar. Durian Petto juga jarang dijumpai yang membusuk. Menurut Adam, durian dari Binjai, Medan, rasanya tidak semanis durian Petto. Kalau pun ada yang manis, biasanya terasa agak pahit.

Di Kota Langsa, durian Petto menjadi jaminan kualitas buah durian yang akan dibeli konsumen. Pasalnya, pembeli tidak akan ragu untuk membeli durian Petto, kendati harganya mahal. Akibatnya, tak jarang pedagang sering mengelabui pembeli, dengan “melabelkan” Petto di belakang durian yang dipasok dari Binjai.

“Biasalah, seperti barang dagangan yang lain, merek mana yang paling terkenal dan yang banyak dicari pembeli maka pedagang akan bilang kalau dagangannya adalah merek tersebut. Karena durian Petto sudah punya nama, jadi orang sering bilang durian Petto, padahal yang dijual durian Medan,” kata Adam tersenyum.

Kini, Adam tidak lagi bisa menjual durian Petto, karena “produksinya” yang sudah menurun. Selain karena sudah jarang warga Desa Petto yang menanam durian, kondisi keamanan yang memburuk di sepanjang perjalanan menuju desa itu, juga mempunyai pengaruh tersendiri. Setidaknya, Adam mengalami cerita tersendiri, sehingga ia memilih tidak mencari lagi buah-buahan ke desa pedalaman Aceh Timur. “Memang sudah lama keadaan tidak aman. Tapi yang paling parah sejak darurat militer,” tandas Adam.

Wajar saja jika Adam enggan mencari buah-buahan ke desa sentra buah di Aceh Timur. Pasalnya, ketika mencari buah-buahan segar, ia pernah berurusan dengan aparat. “Kalau sekedar dimintai uang atau buah-buahan, saya sudah sering alami. Dibentak dan dimarahi waktu *sweeping* dan dicurigai sebagai pemasok logistik GAM, juga sudah biasa,” cerita Adam.

Pada bulan Agustus 2000, Adam dan beberapa kawannya pernah disuruh *push-up*. Sementara sopir mobil *pick-up* yang mereka tumpangi, ditampar. Gara-garanya, Adam dan kawan-kawan tidak melapor ke pos. Padahal, Adam sudah melapor, namun karena aparat tidak di pos, mereka melanjutkan perjalanan. “Waktu pulang, mereka minta buah langsung, banyak sekitar tiga kilo,” katanya.

Kejadian selanjutnya terjadi pada Oktober 2000. Ketika Adam membawa buah rambutan dari Kuta Binjei, Julok ke Langsa, mereka dihentikan aparat Brimob pos Bagok. Brimob langsung memarahi Adam dan kawannya. Ternyata, 100 meter dari pos, baru saja terjadi kontak tembak. Yang paling membekas di ingatan Adam, ketika salak senjata terdengar membahana di telinga dia dan sopirnya. “Padahal sudah disuruh pergi, eh, temannya yang satu lagi malah menembak di dekat telinga sopir saya. Telinganya tuli sekarang. Kalau saya hanya ditampar,” kenang Adam.

Selain itu, Adam juga sering diminta membayar pungutan liar (pungli). “Pungli yang harus disetor di setiap pos yang dilewati dalam satu kali perjalanan ke desa sampai Rp 100 ribu. Biaya itu tidak termasuk buah-buahan yang mereka ambil. Kadang satu pos *ngambil* sampai satu kilo langsung atau kalau durian sampai tiga buah,” ujar Adam.

Akibatnya, ia kini kehabisan modal, dan tidak lagi mencari ke desa-desa penghasil buah-buahan. Adam dan penjual buah-buahan lainnya, hanya menunggu penjual dari kampung datang membawa sejumlah buah-buahan. Jika penjual dari kampung tidak ada, maka mereka tidak mendapatkan pasokan buah segar, termasuk durian Petto.

Namun, sayang, durian Petto sudah jarang di pasaran. Selain karena warga Petto yang sudah senang “merawat” karet dan sawit ketimbang durian, kondisi keamanan yang tidak kondusif, juga ikut mempercepat hilangnya durian Petto dari pasaran. Padahal, durian Petto sempat menjadi primadona di kalangan warga Petto. [A]

Bahan Bacaan – 3, Pokok Bahasan 3:

Akibat Konflik, Bintang Itu Semakin Redup

PERANG kapan berakhir. Belum cukupkah tumbal nyawa di bumi Serambi Mekkah ini? Perang gerilya, adalah perang merebut simpati rakyat. Tetapi kenyataannya rakyatlah yang paling menderita dari sebuah peperangan.

Masih banyak sisi kelam kehidupan masyarakat selama konflik yang tak terangkat kepermukaan. Salah satu sisi kelam itu, penghidupan warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Mayoritas rakyatnya miskin, bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Gayo.

Di daerah lain masyarakat hanya mengandalkan kebun kopi, namun penghidupannya lebih makmur. Sementara di Bintang bukan hanya ada kebun kopi, namun ada areal pengembangan ternak dan danau kebanggaan NAD. Ibarat ayam yang nyaris mati di lumbung padi, itulah keadaan warga Bintang.

Bila kebun kopi selain di Bintang, ada “penuaian” rupiah, warga Bintang lebih banyak mengeluh, merenungi nasib. Namanya yang indah itu tak membuat rakyatnya bersinar. Bukan alamnya yang tak mau membawa rakyatnya sejahtera. Ego manusia, menjadikan warga Bintang merana.

Kecamatan dengan luas wilayah 429 kilometer bujur sangkar ini, hanya berjarak 20 kilometer dari ibukota kabupaten. Letaknyapun strategis dilindungi Danau Laut Tawar. Sebuah danau andalan NAD dalam pariwisata. Danau ini mirip Tongging Sumatra Utara.

Di sekeliling kota Bintang lekukan gunung pinus dan hutan lebat, merupakan magnet penyengat indah danau. Bintang juga merupakan areal peternakan kerbau yang menjadi andalan Aceh Tengah.

Disinilah ratusan ekor kerbau setiap tahunnya didatangkan untuk konsumen. Tapi mayoritas pemilik kerbau bukan warga setempat. 90 persen warga Bintang mengandalkan hidupnya dari sektor *perempusen*. Sebagian kecil bersawah, menanam tembakau dan mengandalkan isi danau sebagai penopang hidup.

Bagaimana liku-likunya kehidupan 90 persen (1.854 KK atau 8.503 jiwa) warga di sana? *Waspada* mengikutinya dalam sebuah perjalanan yang melalahkan dan menegangkan. *Perempusen* (Perkebunan kopi rakyat- Red) mayoritas penduduk itu berada di arah timur kota Bintang.

Kawasan menuju Serule, sebuah daerah bersejarah di Gayo dengan sejumlah peninggalan tanda kerajaan dan legenda ini, pilihan rakyat untuk menentukan masa depan. Di hutan lebat sepanjang perjalanan inilah warga Bintang membuka *perempusen*.

Jaraknya dari Bintang hanya 27 kilometer. Jalan menuju ke sana sangat rawan. Bukan hanya karena hutan dengan tanjakan dan turunan yang terjal. Batu-batu di jalan berserakan, lubang di mana-mana. Memang ruas jalan ini relatif lebar mencapai 6 meter, karena dipergunakan PT. KKA sebagai ruas jalan pengangkut pinus. Namun Ancaman yang paling berat dirasakan masyarakat, terjadinya peperangan antara GAM dan aparat.

Tiga kilometer dari Hakim Dedamar, merupakan kampung terakhir di Kota Bintang menuju Serule, suasana senyap itu sudah terasa. Memasuki Tanoh Depet, *Waspada* sudah mendapat catatan sejarah. Di lokasi ini GAM digranat aparat keamanan.

Ruas jalan Bintang- Serule benar-benar membangkitkan bulu kuduk. Warga di sana sering sport jantung, karena GAM paling sering melintasi jalan ini, atau sengaja menanti masyarakat untuk mendapatkan logistik.

Sebelum konflik kawasan ini sudah dijadikan perkampungan oleh penduduk. Walau selang rumah yang satu dengan kelompok yang lain mencapai kilometer, mereka yang *berempus* sudah berani menetap. Bahkan di kawasan bukit yang sepi manusia terlihat ada satu dua rumah.

Namun lahirnya konflik Aceh, ruas jalan menuju Serule, hanya terdapat beberapa rumah penduduk yang dihuni manusia. Itu juga jarak antara satu lokasi dan lokasi lainnya mencapai beberapa kilometer.

Tak ada kios untuk membeli makanan atau rokok di sepanjang perjalanan itu, apalagi tukang tambal ban. Ruas jalan yang di kelilingi hutan itu terasa sangat sunyi. Kicauan burung dari kejauhan sudah terdengar. Demikian dengan raungan sepeda motor atau truk yang melintasi jalan itu, dari kejauhan sudah dapat diketahui.

Perempusen penduduk tidak semuanya berada di pingir jalan Bintang Serule. Mayoritas kebun kopi milik rakyat ini terletak agak ke dalam, bahkan ada yang mencapai 5 kilometer dari jalan utama. Jalan utama saja penuh batu yang berserakan dan lubang di mana-mana, bagaimana dengan jalan tikus yang dirintis pemilik *empus* ini?

Tapi bagi mereka yang berjuang dengan maut, kondisi jalan bukan tantangan. Bahkan ada diantara mereka yang memikul kopi hasil kebunnya mencapai 3 kilometer. Dengan medan jalan mendaki dan menurun. Satu jam perjalanan dengan beban di pundak, merupakan bahagian hidup petani ini.

“ Kalau membawa hasil kebun tidak terasa berat, walau harus berjalan satu jam. Karena ada pengharapan menuai rupiah. Ada harapan anak- anak bersekolah, dari sini kami berjalan menuju kebun,” sebut Abdullah Aman Riyadi yang memiliki kebun di Calid, sambil menunjuk lokasi hutan kebun kopinya.

Sayang kebun kopi itu sudah ditinggalkannya lima tahun yang lalu. Dia mengaku tak berani mengurusnya, karena sering muncul GAM. Padahal kebun itu baru sekali dipanennya, menjelang berbuah lebat. Dampaknya masa depan anaknya tak jelas. Dua putranya putus sekolah di tengah jalan, hanya mampu menamatkan tingkat SLTP.

“Bagaimana saya mau menyekolahkanya. Untuk makan saja susah. Terpaksa saya menjerit dan menangis dalam hati. Sayang nasib anak saya kelak,” sebutnya sambil berdiri mematung di simpang jalan menuju kebunnya.

Ditemani lelaki yang menjadi korban konflik ini, *Waspada* kembali menelusuri jalan berbatu, sesekali terkena jipratan lumpur dari tanah liat berwarna merah. Di sepanjang perjalanan, lokasi *perempusen* di jalur jalan utama saja sudah banyak yang bersemak belukar. Kayu yang tumbuh di sela tanaman kopi itu sudah mencapai 5 meter.

“Di sini saja banyak yang tidak berani merawat kebunnya, apalagi lokasi perempusennya masuk ke dalam. Dari pada hilang nyawa, lebih baik hidup merana, “ sebut lelaki enam anak ini.

Di sela-sela gunung yang lebat inilah warga Bintang mengarungi hidup dengan perempusen. Tapi konflik Aceh telah menghancurkan masa depan mereka. Sumber hidup itu terlantar. Tidaklah heran bila 60 persen lebih warga Bintang jatuh miskin. Konflik telah melahirkan petaka. Sayang, warga Bintang hanya indah dari segi nama, kerlipannya semakin redup. Kapan bintang itu akan bersinar kembali? **Bahtiar Gayo**



Teks photo: Bersihkan jalan: Inilah kondisi jalan setapak yang senantiasa dilalui sebagian petani kopi. Mereka harus membat tanaman yang menghalangi jalan, sambil membawa beban. (Waspada/ Bahtiar Gayo)

Mampukah Mereka Bangkit?

SELAMA *Waspada* melakukan perjalanan enam jam di hutan Serule, Bintang, Aceh Tengah itu, hanya berpapasan dengan 3 sepeda motor. Petani ini mengaku “ngeri-ngeri sedap.” Tetapi mereka nekat “membelah hutan belantara” dari pada tidak makan, walau maut ancamannya.

Sering warga Bintang, bertemu dengan GAM. Serdadu ini memesan dan meminta logistik. Rakyat mulai dilalui perasaan takut. Aparat keamanan juga bergerak mendapatkan info ini. Inilah awal kemiskinan bagi warga yang telah melahirkan pacuan kuda tradisional Gayo.

Aparat keamanan melarang warga Bintang untuk ke kebun di sepanjang jalan Serule. Batas waktu yang diberikan hingga “aman”. Bila kondisi agak aman, baru warga diberikan izin untuk mengurus sumber ekonominya.

Catatan *Waspada*, sebelum berangkat masyarakat harus meninggalkan KTP merah putihnya di pos aparat, termasuk *Waspada* yang telah berulang kali ke sana. Warga hanya dibekali dengan surat jalan bila ingin ke kebun atau menjenguk kerbau. Batas waktu kembali juga ditetapkan. Sebelum berangkat barang bawaan wajib diperiksa.

Logistik yang dibawa juga tidak boleh lebih dari hari yang ditetapkan. Ketika pulang harus melapor kembali dan mengambil KTP. Ada kalanya masyarakat yang baru berangkat, tiba-tiba ada perintah untuk kembali. Kawasan perkebunan itu harus dikosongkan, aparat keamanan akan bergerak. Adanya info pemunculan GAM, membuat aparat yang mendiami pos dikelilingi hutan itu, menentukan sikap memburu.

Ada kalanya masyarakat yang mengurus *perempusen* ini bertemu dengan GAM dan diperintahkan kembali untuk membawa logistik. Otomatis mereka yang mendapatkan

“perintah” itu tidak kembali lagi ke kebunnya dan membiarkan kebunnya terlantar. Mereka takut bertemu dengan GAM.

Bila tidak melapor ke aparat juga salah, jika nanti info pemunculan ini bocor, petani ini yang akan menanggung akibatnya. Melapor ke aparat berarti harus meninggalkan sumber hidupnya, karena tak berani lagi ke kebun yang dikhawatirkan akan kembali bertemu dengan GAM.

“Kami serba sulit. Di hutan bertemu dengan GAM, mendapat ancaman. Kembali ke Bintang ditanya aparat macam-macam, bahkan kami digertak seolah-olah membantu GAM. Jantung saya tak tahan. Ya terpaksa menderita, kebun itu saya tinggalkan. Bagaimana masa depan anak saya, enggak tahulah,” sebut seorang ayah yang mengakui sudah 4 tahun meninggalkan kebunnya.

Aparat juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Karena kampung Dedemar, kawasan ujung Bintang ini sering dijadikan GAM sebagai lintasan sebelum pos aparat ditempatkan di sana. GAM pernah melakukan perampasan logistik dari rakyat sambil memuntahkan ratusan peluru.

Aparat sulit membedakan lawan dalam perang gerilya ini. Dampak dari sejarah kelam ini, warga Bintang yang menggantungkan hidupnya di ruas jalan Serule, benar-benar menderita. Pemunculan GAM, mengharuskan aparat keamanan melarang rakyat untuk ke kebun. Lantas apa yang mereka makan?

Sebagian dari mereka memang ada yang bersawah, sehingga urusan perut tidak terlalu bermasalah. Namun berepa persen yang menggarap sawah. Mayoritas lainnya bagaimana? Untuk mendapatkan uang Rp 10 ribu sehari, bagi mayoritas warga Bintang ini mengakui sudah terasa sulit.

“Ada kalanya saya kerja bangunan, itu juga tergantung keadaan. Karena yang membangun di sini dapat dihitung dengan jari. Mau pindah kemana, apa mau jadi gelandangan. Rumah kami di sini,” sebut Aman Riyadi.

Terpaksalah keluarga ini dan mayoritas keluarga lainnya hidup apa adanya. Kadangkala mereka ke danau menjala ikan. Itu juga tidak menjamin kelangsungan kepulan asap di dapur. Memasuki Ramadhan banyak orang tua yang menangis menjelang tidurnya. Apa mau diberikan untuk anaknya ketika lebaran. Terpaksa baju yang tua, dijadikan penghibur hati generasi yang tak berdosa, namun menderita karena perang ini.

Ada usaha lain yang ditekuni warga di sana, memelihara kerbau secara tradisional. Mayoritas pemilik ribuan ekor kerbau itu bukan warga Bintang. Warga setempat hanya sebagai penggadu dengan sistem bagi hasil.

Areal pengembalaan ternak tradisional ini cukup luas, mencapai ribuan hektar. Kerbau peliharaan itu dilepaskan dalam hutan pinus. Satu bulan atau dua pekan sekali baru dijenguk pemiliknya.

Lokasi pengembalaan tradisional ini juga berada dalam radius kawasan Serule. Daerah yang rawan konflik dan sering munculnya GAM. Otomatis usaha ini juga mengalami berbagai persoalan.

Pemilik bukan hanya takut menjenguk kerbaunya di hutan ilalang di sela pinus itu. Namun ada juga yang berani tetapi berbuah kecewa. Kerbau milik masyarakat banyak yang hilang. Sulit membuktikan, apalagi menjerat pelakunya. Tetapi rakyat tahu siapa yang melakukan aksi pencurian hewan ternak itu. Konflik bersenjata membuat rakyat takut untuk mempertahankan harta dan menegakkan kebenaran.

Dari pada tewas di ujung peluru, lebih baik harta itu dihihlaskan. “Kita hanya berusaha, namun Allah lebih berkuasa. Biarkan ada yang mengail di air keruh dalam konflik Aceh ini,” sebut Aman Iqoni yang mengaku kerbaunya turut hilang. Namun dia sulit membuktikan siapa pelakunya.

Memelihara kerbau di kawasan konflik ini, sama susahnya dengan mengurus perempusen. Kedua-duanya tantangannya maut. Ada yang nekat bertahan. “Dari pada mati hari ini lebih baik anakku mati besok karena tak makan. Apapun harus kulalui, walau kebun ini tak terawat, inilah sumber hidupku,” sebut Aman Bedi.

Tetapi bagi Supian, justru dia melupakan memiliki 3 hektar kebun kopi di jalur ruas jalan Serule. Dari segi dialek, dia sudah dikenal orang bukan penduduk lokal, namun berasal dari Pulau Seberang tempat SBY saat ini berdomisili. Otomatis bila dia bertemu dengan GAM, peluang hidupnya tipis.

Terpaksa menyewa sawah orang lain, usai panen padi. Waktu yang tersisa menjelang bertanam padi kembali itulah dimanfaatkan ayah dua anak ini, untuk menghidupi keluarganya. Dia menanam tomat dan cabe. Namun hasil panennya tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkannya.

Jangankan untuk menikmati sedikit keuntungan, untuk pengembalian modal sulit, karena harga dipasaran jatuh. Terpaksa dia berhutang untuk memodali kembali usahanya. Tetapi sampai kapan Sopian ini akan bertahan.

Mungkin Sopian nasibnya sedikit lebih baik bila dibandingkan A. Riyadi. Penduduk Dedemar ini terpaksa dua anaknya menjadi korban konflik tidak lagi melanjutkan bangku pendidikan, setelah tamat SLTP.

Bintang memang kampung tua yang telah melahirkan sejumlah pemimpin di Gayo. Tetapi sayang kerlipan itu makin redup. Rakyatnya bernafas tersengal-sengal, bagaikan kerakap di atas batu. Semua itu karena konflik Aceh.

Tentunya penderitaan rakyat Bintang ini, masih banyak dirasakan lagi oleh rakyat lainnya di Aceh. Ternyata perang telah membuat mereka sengsara. Sebuah harapan masih ada di relung hati mereka, “Kapan kami akan bangkit?”. Alamlah yang tahu, bila manusia tak lagi berhati nurani. **Bahtiar Gayo.**

Pokok Bahasan 4:

Jurnalisme Foto dan Perannya dalam Meliput Konflik Aceh

Foto jurnalistik menjadi bagian penting dari surat kabar sejak tahun 1920-an. Tidak hanya sebagai pemanis halaman surat kabar, foto juga punya segudang cerita sendiri tentang peristiwa yang diliput. Bahkan, bukan mustahil lebih banyak yang bisa dibaca lewat foto dibanding dengan apa yang disampaikan oleh berita yang bersangkutan.

Sama seperti laporan tertulis yang mempunyai sudut pemberitaan dari sebuah objek yang diberitakan, foto berita juga punya sudut penggambaran sendiri dari objek yang ditampilkannya. Pilihan untuk membidik objek tertentu, dengan pengambilan dari sudut penggambaran tertentu sampai dengan pemuatannya di media tentu berdasarkan berbagai macam penilaian.

Seperti halnya pesan tertulis, yang bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi, foto demikian juga halnya. Tampilan sebuah realitas secara visual tentu punya kesan tersendiri bila dibandingkan dengan kisah sebuah realitas yang ditulis dalam bentuk rangkaian kata-kata. Citra yang ditampilkan dari sebuah foto yang terpampang di halaman depan surat kabar tentu bisa jadi lebih mudah ditangkap daripada harus membaca secara seksama kalimat-kalimat dalam kolom-kolom surat kabar. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah mereka yang mengamati foto yang menyertai sebuah berita dua kali lipat dari jumlah mereka yang membaca berita tersebut.

Jika terkadang tuduhan sering mampir terhadap berita-berita yang dianggap menonjolkan sensasi, dalam liputan konflik khususnya, bukan mustahil foto juga bisa menjadi amunisi yang hebat bag, konflik. Karenanya, perlu kearifan sendiri bagi pemuatan sebuah foto yang memotret tentang realitas konflik agar khalayak tidak terjebak pada pengambilan kesimpulan yang keliru tentang realitas yang sebenarnya.

Pokok bahasan ini karenanya mengajak peserta untuk memahami lebih dalam tentang peranan yang bisa disumbangkan jurnalisme foto bagi upaya resolusi konflik. Bagaimana melalui jurnalisme foto bisa dihadirkan suatu gambaran tentang realitas konflik yang telah merugikan clan menimbulkan penderitaan bag, banyak orang.

TUJUAN

- Jurnalisme memperoleh pengetahuan tentang berbagai jenis angle foto yang berperspektif jurnalisme damai
- Jurnalisme memperoleh pengetahuan tentang posisi pengambilan foto ketika meliput konflik

POKOK BAHASAN

METODE

- Ceramah
- Sharring Pengalaman

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- LCD
- Laptop
- Foto-foto Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan.
- Pada sesi ceramah, narasumber diminta untuk memaparkan tentang peranan jurnalisme foto dalam meyumbang pada proses resolusi konflik. Selain itu dijelaskan pula bagaimana *angle-angle* liputan (foto) yang berperspektif jurnalisme damai dengan memberikan contoh hasil-hasil foto di wilayah konflik baik di Aceh maupun di wilayah lain sebagai perbandingan.
- Setelah sesi ceramah selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi sesuai dengan topik yang dibawakan narasumber, dengan tujuan peserta bisa lebih memahami tentang *angle-angle* liputan (foto) yang berperspektif jurnalisme damai. Pada sesi ini peserta diharapkan aktif untuk saling bertukar pikiran maupun melontarkan pertanyaan atau tanggapan, berbagi pengalaman, sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok bahasan yang dibawakan dan akhirnya bisa mengadopsinya ketika melakukan praktek jurnalisme yang sesungguhnya

Bahan Bacaan 1, Pokok Bahasan 4:

Jurnalisme Foto di Wilayah Konflik: Sumbangan Jurnalisme Foto di Wilayah Konflik

Oleh: Arbain Rambey *

Orang selalu beranggapan bahwa foto itu sangat jujur, tidak bisa menipu. Foto dianggap berbeda dengan berita tulis yang konon bisa “dipelintir”, bisa dimainkan kalimatnya, atau juga berisi fakta-fakta palsu. Karena seakan menampilkan fakta visual apa adanya, foto dianggap telah mewakili realita sesungguhnya. Dengan melihat foto, seseorang merasa telah mendapat info dasar untuk kemudian diolah sendiri di benaknya.

Anggapan ini di satu sisi menempatkan foto sebagai salah satu sumber berita yang sangat diyakini kebenarannya. Namun di sisi lain telah menempatkan fotografi di wilayah “berbahaya”. Oleh pihak yang ingin mengarahkan publik pada sebuah opini, foto bisa dipakai sebagai senjata yang ampuh. Sasaran utama “senjata” ini adalah orang-orang yang sangat percaya pada kredibilitas sebuah foto.

Orang mungkin tidak terlalu sadar bahwa sebuah foto sebenarnya hanya menampilkan sepotong kecil dari realita yang ada. Sebuah foto hanyalah potongan kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di depan seorang fotografer saat memotret. Dalam melihat sebuah foto, sebaiknya pertanyaan,” Apa yang tidak terpotret?” atau “Apa yang ada di sisi foto ini sebenarnya?” selalu ditimbulkan.

Foto juga sangat bisa direkayasa baik lewat rekayasa tempel menempel, rekayasa di kamar gelap, atau juga rekayasa digital. Dalam dunia foto digital, menambah atau mengurangi isi foto semudah membalikkan telapak tangan. Perangkat lunak pengolah foto seperti *Adobe*

Photoshop atau juga *Corel Draw* bajakan, rasanya ada di semua komputer berbasis *Windows* yang ada di Indoensia.

Tapi, tanpa direkayasa pun, sebuah foto bisa menampilkan realita bias. Realita bias ini lalu menimbulkan kesimpulan fakta yang juga bias pada orang yang melihat foto itu. Fakta bias ini timbul karena pada setiap orang yang melihat sebuah foto telah ada endapan pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Endapan pengalaman ini lalu mempengaruhi pemahamannya akan foto di depan matanya itu.

Sebagai contoh adalah foto seorang anggota GAM di Aceh atau Fretilin di (ex) Timtim yang tertembak. Dalam foto itu terlihat sebuah senapan M-16 terletak di dada sang mayat. Bagi orang awam, foto itu adalah sebuah bukti yang sangat kuat bahwa orang GAM/Fretilin mempunyai senjata api. Selain itu, foto itu adalah bukti “sah” bahwa sang mayat pasti salah satu perusuh yang meresahkan masyarakat dengan penodongan akhir-akhir ini.

Tapi di mata seorang redaktur foto yang berpengalaman, foto itu mungkin dibaca lain. Bagi sang redaktur yang sudah melihat dan “mencerna” ribuan foto, foto mayat anggota GAM/Fretilin itu malah menimbulkan tanda tanya: “Mengapa hampir semua foto mayat GAM/Fretilin selalu ada senjata di dadanya ?” Juga, apa maksudnya foto itu disebar-sebarkan ?

Sang redaktur foto juga punya pengalaman memotret di beberapa konflik sehingga juga punya endapan pengalaman dalam benaknya bahwa tidak semua anggota pasukan separatist (kalau boleh disebut demikian) tertembak dalam keadaan membawa senjata. Penempatan senjata di dada mayat sang separatist (yang terlalu sering) justru menimbulkan kesimpulan pada sang redaktur: ada sesuatu di balik foto itu.

Tanpa rekayasa, foto juga bisa dipakai untuk memberikan info sesuai kemauan sang fotografer. Sebagai contoh adalah sebuah peristiwa kampanye di tahun 1997. Waktu itu sebuah partai berkampanye di suatu tempat di Jakarta. Kebetulan sang ketua partai sendiri yang menjadi juru bicara kampanyenya.

Tempat kampanye adalah sebuah lapangan luas di daerah Jakarta Selatan. Matahari sore menyorot begitu tajam. Di lapangan kampanye ada ratusan kursi, namun hanya separuh yang terisi karena pengunjung memilih duduk di tempat yang teduh. Jadilah suasana ini: separuh kursi kosong melompong, separuh kursi penuh terisi.

Untuk hal ini, bisa terjadi dua buah foto yang saling bertentangan nilai beritanya. Foto yang pertama adalah gambar sang ketua partai sedang berorasi dengan latar belakang kursi yang penuh terisi. Sedangkan foto kedua adalah foto kampanye dengan latar belakang kursi yang kosong melompong. Satu adegan dengan dua pemahaman! Bagi seorang fotografer yang pro dengan partai itu, mungkin ia akan memotret dengan latar belakang massa berjubel. Sedangkan kalau sang fotografer anti partai itu, hal sebaliknya bisa saja dia lakukan.

Pendeknya, foto memang sangat strategis dalam menyampaikan sesuatu. Peristiwa Bom Bali dua pekan lalu tidak akan terasa dahsyatnya tanpa foto. Orang jadi tahu seberapa hancurnya daerah Kuta dan Legian akibat bom yang konon dibuat dari C-4 itu.

Peran Redaktur Foto

Dalam sebuah media massa harus ada dua peran yang berjalan dengan harmonis agar berita foto bisa tampil proporsional dan memberi pembaca fakta yang mendekati realita. Di sini kata “mendekati” memang harus ditekankan karena bagaimana pun sebuah foto tidak akan bisa memberikan gambaran realitas seperti keadaan sesungguhnya. Sebuah foto adalah sebuah rekaman visual yang sangat terbatas, dua dimensi, serta tanpa rasa suasana dan suara.

Seorang fotografer sebaiknya memotret sebanyak dia bisa dan sebanyak film yang dia punyai. Film kosong (atau *Flash Card* kosong dalam foto digital) memang mahal. Tapi rekaman adegan yang tidak mungkin diulang, harganya lebih mahal lagi sesungguhnya. Foto-fotonya adalah rekaman visual yang juga bisa berguna untuk wartawan tulis yang akan menulis berita nantinya.

Di lapangan, seorang fotografer sebaiknya berpedoman kepada kelengkapan rekaman visual daripada moralitas kehidupan dan makna sebuah foto untuk pembaca. Setelah sampai di

kantor, peran seorang redaktur foto untuk memilah dengan bijaksana akan sangat berperan pada proses selanjutnya.

Menyangkut moralitas saat memotret, banyak fotografer muda mempertanyakan kasus fotografer Kevin Carter yang memenangi Hadiah Pulitzer pada pertengahan tahun 80-an. Foto Carter yang meraih hadiah itu menggambarkan peristiwa kelaparan di sebuah daerah di Afrika. Dalam foto, seorang anak kecil yang kurus sedang tepekur dengan seekor burung pemakan bangkai di dekatnya. Simbolis sekali.

Beberapa waktu kemudian, Carter mendengar kabar bahwa anak yang difotonya itu meninggal dunia tidak lama setelah dipotret karena tidak mampu mencapai sebuah pos PBB yang menangani kelaparan itu. Artinya, simbol burung pemakan bangkai yang di “olah” Carter menjadi kenyataan.

Menurut beberapa temannya, Carter sangat terguncang mendengar kenyataan itu. Ia merasa bersalah telah memilih memotret daripada menolong sang anak. Carter terlihat sangat tertekan oleh rasa berdosa itu sampai beberapa lama. Entah karena masalah ini atau masalah lain, kenyataannya Carter bunuh diri beberapa waktu kemudian.

Masalah seperti masalah Carter itu bukanlah masalah di angan-angan. Para fotografer di Jakarta semasa era 1997-1999 sering mengalaminya. Dalam kasus anggota PAM Swakarsa yang dibunuh di jalanan Jakarta, banyak yang memutuskan untuk tidak memotret. Alasan mereka : tidak berperikemanusiaan. Namun para fotografer itu juga tidak ada nyali untuk menolong anggota PAM Swakarsa yang malang itu dari massa yang sangat beringas.

Untuk kasus yang lebih ringan, apakah seorang fotografer harus menolong seorang pencopet yang dipukuli atau justru memotretnya ?

Dalam kasus di wilayah konflik seperti di Aceh, apakah seorang fotografer seharusnya tidak memotret sesosok mayat yang kondisinya sangat mengenaskan semata demi kemanusiaan?

Kembali kepada alinea di atas, seharusnya seorang fotografer memotret apa pun yang dirasanya mewakili sebuah fakta. Memotret harus diutamakan daripada hal-hal lain karena memang ia ditugaskan untuk itu. Foto-foto yang dihasilkannya selain bisa dipakai untuk koran besok, juga bisa menjadi bahan bagi wartawan tulis senior untuk membuat *indepth news* (berita yang lebih mendalam lagi), atau dipakai untuk data dan dokumentasi lebih jauh lagi.

Pada kasus pertikaian etnis di Kalimantan tahun 2000-2001, seorang fotografer yang bertugas di sana sebaiknya memotret apa pun yang dilihatnya. Walau sangat sadis, misalnya orang yang membawa potongan kepala manusia, adegan-adegan itu adalah fakta yang akan menjadi sejarah, baik atau buruk. Rekaman foto kejadian itu juga bisa menjadi pegangan pada peneliti-peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk mengantisipasi hal buruk di masa mendatang.

Seorang redaktur foto yang bijaksana dengan konsep jurnalisme damai, jelas tidak akan memasang foto-foto sadis yang pasti akan menimbulkan efek pembalasan di tempat lain. Foto orang membawa kepala manusia di Kalimantan itu bisa jadi memancing hal yang sama di daerah asli etnis yang dibunuh itu.

Untuk kasus kerusuhan etnis di Kalimantan itu, foto yang ditampilkan sebaiknya adalah kesengsaraan orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung terkena masalah itu. Sisi kemanusiaan adalah hal yang universal dan memang hal ini yang sebaiknya selalu diangkat ke permukaan.

Pada banyak kasus, rekaman foto bisa menjadi sebuah bahan di pengadilan (walau foto belum bisa dijadikan bukti yang sah) seperti pada kasus pemukulan wartawan oleh aparat keamanan di depan gedung DPR/MPR belum lama ini. Waktu itu pun beberapa fotografer yang ada di sana merasa berada dalam konflik batin. Apakah memotret rekan mereka yang sedang dipukul, atau menolong dengan risiko juga dipukul.

Akhirnya, fotografer yang memutuskan untuk memotret pemukulan rekannya itu merasa telah membuat pilihan benar karena foto mereka yang dimuat koran-koran dan juga kantor merita asing telah menjadi saksi mata kepada publik bahwa telah terjadi penghalangan peliputan oleh aparat keamanan.

Seorang fotografer sebaiknya jangan dibebani tugas lain selain memotret. Masalah pemilihan sebuah foto untuk dimuat di media massa, masalah pesan moral, masalah apakah foto itu akan menimbulkan masalah baru atau tidak, sebaiknya dibebankan pada redaktur foto, atau mungkin ke yang lebih tinggi yaitu penanggungjawab sebuah media massa.

Walau begitu, tidak mungkin seorang fotografer yang sedang berada di wilayah konflik, ---yang mungkin sangat jauh dari kantor pusatnya--, bisa mengirimkan semua foto karyanya. Ia harus membatasi jumlah yang dikirimkan kepada redaktornya. Artinya ia harus melakukan pemilihan awal. Dengan begitu, seorang fotografer setidaknya juga harus sadar akan tugas “kedua”. Setelah memotret, ia harus menjadi redaktur bagi dirinya sendiri dengan memilih foto tertentu untuk dikirimkan ke kantornya.

Peran seorang fotografer pada waktu memotret dan pada waktu ia memutuskan pemilihan foto untuk dikirimkan ke kantornya sungguh dua peran yang sangat berbeda. Untuk masalah-masalah tertentu seperti konflik (SARA atau politik), ada beda yang sangat besar antara foto untuk kalangan terbatas dan foto untuk publik atau kalangan luas. Apalagi dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat plural, pemilihan pada sebuah foto yang akan dimuat memang tidak bisa dilakukan oleh orang baru.

Maka, bagaimana pun seorang fotografer harus juga sudah punya pemahaman yang benar pada layak tidaknya sebuah foto dipublikasikan. Seperti halnya sebuah berita tulis, sebuah foto pun harus memenuhi kaidah 5W 1H serta bisa memberikan kenyataan *covering both sides*.

Foto yang Berimbang

Dalam berita tulis, berita yang berimbang adalah berita yang memberikan porsi sama antara dua pihak yang bertikai. Untuk fotografi, berimbang bisa terjadi dengan pemasangan dua foto dari sisi kedua pihak. Namun hal ini tidak selalu bisa dilakukan dan juga hal ini tidaklah selalu benar.

Foto lebih mudah dicerna (bahkan mungkin secara salah) daripada tulisan. Orang yang membuka-buka koran tanpa membaca, tetap akan memperoleh info dari foto yang terpasang. Orang sering lebih senang “membaca” berita foto sebab cuma butuh waktu singkat. Foto mempunyai bahasa yang universal tapi juga membuka peluang untuk ratusan interpretasi terutama oleh pembaca yang hanya membaca teks foto tanpa mengikuti pemberitaannya secara lengkap.

Pemasangan sebuah foto haruslah mempunyai kehati-hatian melebihi berita tulis. Foto yang disebut berimbang bukanlah foto yang memberikan porsi sama pada dua sisi pemberitaan. Berimbang dalam foto jurnalistik adalah memberikan porsi netral yang tidak memihak siapa-siapa kepada pembaca sejalan dengan kebijaksanaan sebuah media massa. Barangkali bisa dikatakan, sebuah foto yang berimbang adalah sebuah foto yang memihak sisi masyarakat secara umum, atau memihak kepentingan umum yang lebih luas daripada sekadar sebuah pertikaian yang sering tidak jelas siapa benar siapa salah.

Pada kasus pertikaian agama di Maluku, foto yang berimbang untuk masalah ini bukanlah memasang dua foto: satu foto korban dari pihak Kristen, dan satu lagi dari pihak Muslim. Pemasangan foto seperti ini selain sangat tidak bijaksana, yaitu akan menimbulkan ketegangan baru di wilayah lain, juga menunjukkan kepekaan yang rendah pada keadaan di Indonesia.

Bagi kantor berita asing, foto-foto kesadisan yang terjadi di Indonesia sangatlah laris. Menengok kiriman-kiriman foto lewat *wire service* seperti dari *Reuters*, *Associated Press* (AP) atau *Agence France Presse* (AFP), terkadang kita jadi ragu pada pilihan soal baik dan buruk untuk berita foto di dalam negeri Indonesia. Walau kantor-kantor berita asing itu juga sudah punya tolok ukur tentang “sadis dan sangat sadis”, bagaimana pun kita harus punya tolok ukur berbeda untuk memberitakan masalah dalam negeri kita sendiri.

Pada peristiwa kerusuhan etnis di Kalimantan lalu, semua kantor berita asing yang punya perwakilan di Indonesia tidak ada yang menyiarkan foto terlalu sadis. Tidak ada foto

orang membawa kepala manusia secara gamblang. Salah satu foto kekerasan yang simbolis adalah gambar silhueta orang membawa golok dengan latar belakang massa yang banyak.

Namun pada peristiwa pembunuhan beberapa ulama di Jawa Timur pada tahun 1999, sebuah kantor berita asing menampilkan foto mayat lelaki yang diseret dengan sepeda motor di sebuah kota di Jawa Timur.

Mungkin benar bahwa “pihak luar sana” sangat senang melihat Indonesia sebagai akuarium tempat ikan-ikan berlaga. Namun bagi fotografer Indonesia, pertentangan di rumah sendiri jelas bukanlah hal yang menyenangkan. Menjual foto kejadian-kejadian dalam negeri kepada kantor berita asing dengan imbalan dollar sering membuat fotografer Indonesia lupa bahwa yang dia buka adalah borok sendiri. Seharusnya, seorang fotografer Indonesia tetap punya filter kalau akan melepas sebuah foto kepada pihak luar, seperti juga dia punya filter internal untuk memilih foto yang akan dipublikasikannya.

Untuk sebuah kasus yang besar dan “berdarah-darah”, selalu ada peluang untuk pemberitaan yang damai tapi tidak keluar dari rel realita dan fakta. Sebagai contoh adalah pada kasus Kerusuhan Mei 1998. Waktu itu lebih dari 200 orang mati terpanggang di sebuah Toserba yang terbakar di Jakarta Timur.

Untuk peristiwa itu, ada sebuah koran yang menampilkan mayat hangus sambil memeluk sebuah Tape Recorder di halaman pertamanya. Ada pula koran yang menampilkan mayat-mayat hangus di kamar mayat RSCM.

Seorang fotografer pemula cenderung merasa bangga kalau bisa menampilkan foto “seram”. Dengan pengalaman memotretnya yang belum terlalu banyak, juga belum cukup banyak “adegan berbahaya” ia hadapi, menampilkan sebuah foto brutal seakan memberinya bukti pengalaman kerja yang hebat.

Hal sebaliknya terjadi pada seorang fotografer senior. Karena sudah banyak kejadian dilihat dan dipotretnya, termasuk kejadian-kejadian kekerasan, ia tidak akan terlalu “silau” untuk menganggap bahwa sebuah foto kekerasan harus dimuat.

Maka, dalam sebuah peristiwa besar yang banyak menampilkan sisa kekerasan atau semburan darah, seorang redaktur foto yang bijaksana akan mengirimkan seorang fotografer senior.

Dalam peristiwa kebakaran toserba di Jakarta Timur itu, pilihan yang diambil *Harian Kompas* untuk memaparkan fakta banyaknya korban kebakaran adalah dengan menampilkan foto ratusan tas plastik hitam di kamar mayat RSCM. Foto juga dibuat tidak berwarna untuk menghindari keseraman dari bercak-bercak darah di lantai kamar mayat itu.. Pertimbangan Kompas adalah, agar orang tahu betapa banyaknya korban tanpa harus merasa jijik dan ngeri. Mayat tidak ditampilkan sebagai mayat melainkan oleh tas-tas plastik hitam. Sebagian kengerian “ditampung” dalam teks berita yang juga dituturkan dengan hati-hati.

Beberapa bulan sebelum Kerusuhan Mei 1998 itu, terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA di Rengas Dengklok, Jawa Barat. Kerusuhan berawal pada pagi hari dan baru selesai menjelang matahari terbenam. Ratusan bangunan ibadah, yaitu gereja dan kelenteng, dirusak massa yang entah dihasut siapa.

Pada peristiwa Kerusuhan Rengas Dengklok itu, foto yang dipilih Kompas di halaman pertama bukanlah foto “ramainya” kerusuhan. Foto yang ditampilkan justru gambar reruntuhan bangunan dan ongkongan abu bekas kebakaran.

Banyak yang bertanya,” Kok foto Kompas ‘sejelek’ itu”. Banyak juga pembaca mengharapkan foto adegan “seru” seperti yang mereka lihat di beberapa koran lain.

Pesan dari Redaktur Pelaksana Kompas untuk pemilihan foto Kerusuhan Rengas Dengklok waktu itu adalah, jangan menampilkan api yang menyala, jangan menampilkan massa merusak, serta –ini yang paling penting—jangan menampilkan gambar bangunan ibadah rusak.

Pesan yang terakhir cukup jelas. Gambar sebuah gereja yang dibakar atau dirusak di Rengas Dengklok sangat mungkin memancing kerusakan mesjid di daerah yang mayoritas penduduknya Kristen. Lalu seperti bola salju, balas berbalas merusak bangunan ibadah “lawan” tidak akan terelakkan.

Sebenarnya ada sebuah foto dari Kerusakan Rengas Dengklok yang bisa memancing dendam (walau kecil) yang berkepanjangan. Foto itu adalah gambar patung Buddha yang digantung di gerbang sebuah vihara yang dirusak massa. Bahkan foto ini sudah menjadi foto sampul dari sebuah buku yang menelaah Kerusakan Rengas Dengklok itu.

Seorang rekan yang menganut agama Buddha mengaku sakit hati melihat patung Buddha diperlakukan seperti itu. Ia merasa ikut dianiaya saat melihat foto tersebut. Pemilihan foto sebuah kejadian yang mengandung kekerasan tidaklah selalu harus menampilkan kekerasan pula. Realita sebuah kekerasan hendaknya lebih banyak disampaikan dengan kata-kata daripada dengan sebuah foto yang vulgar.

Itulah sebabnya, pameran Pewarta Foto Indonesia tentang Kerushan Mei 1998 yang bertajuk “Dari Lengser sampai Semanggi” pada akhir tahun 1998 sempat membuat beberapa pengunjung kecewa. Mereka mengharapkan foto-foto “seram” dari adegan-adegan yang selama ini cuma mereka bayangkan. Pameran “Dari Lengser sampai Semanggi” itu menampilkan realita kacau balaunya Indonesia dengan damai. Pameran foto itu akhirnya punya pesan jelas: Kerusakan yang sudah terjadi sangatlah menyedihkan sehingga jangan terulang lagi.

Kasus-kasus di Aceh

Pada peringatan HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 4 Desember 2000, harian *Kompas* mengirimkan reporter dan fotografer sekaligus ke tempat upacara yang dipimpin oleh panglima AGAM, (alm) Tengku Abdullah Safe'i. Waktu itu tujuan peliputan *Kompas* adalah untuk menggali lebih dalam masalah konflik di Aceh yang tidak kunjung selesai, sekaligus mengumpulkan bahan-bahan untuk tulisan-tulisan mendatang soal Aceh dan GAM.

Pada tanggal 5 Desember 2000, pada halaman pertama, *Kompas* memasang foto Tengku Abdullah Syafe'i yang dikawal dua pria bersenjata laras panjang sedang memasuki lapangan upacara di suatu tempat sekitar 200 kilometer selatan Banda Aceh. Pada satu sisi, sang fotografer yang memotret di lokasi agak terkejut melihat keberanian redaktur di Jakarta memasang foto itu. Foto yang ternyata disukai “pihak luar”, terbukti banyak dipakai majalah-majalah luar negeri ini, ternyata bisa bermasalah di dalam negeri. Selain lalu sang fotografer dianggap pro GAM, foto itu dikatakan beberapa rekan telah memberikan rasa ketakutan pada masyarakat umum di Aceh.

Kata beberapa orang, dengan foto itu *Kompas* telah mengatakan bahwa GAM sangat solid dan punya senjata lengkap. Padahal saat memilih foto itu, penulis yang menjadi fotografer waktu itu, memilih foto dari puluhan pilihan. Patokan pertama dalam pemilihan adalah, agar masyarakat sekitar yang hadir pada upacara HUT GAM (yang ikut terpotret) itu tidak akan direpotkan oleh aparat keamanan. Foto dipilih agar yang terpotret hanya orang-orang yang sudah pasti GAM, yaitu orang-orang yang terlibat aktif pada upacara HUT GAM itu.

Bahwa kemudian foto itu diinterpretasikan sebagai pemihakan kepada GAM, itu adalah perkembangan keadaan. Di sisi lain, sebetulnya foto itu bisa menjadi *warning* bahwa memang seperti itulah keadaan di Aceh saat foto diambil. Keadaan sebaliknya terjadi setahun kemudian. Pada Desember 2001, Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Aceh. Menjelang kedatangan Megawati, *Kompas* menurunkan foto di halaman pertama gambar seorang anggota KOSTRAD dengan senjata otomatis berjaga di sebuah pojok kota Bandaaceh. Foto yang sebenarnya netral dan cuma ‘berceritera’ soal pengamanan presiden ini ternyata dianggap penyeimbangan dari foto setahun sebelumnya yang mengangkat GAM di halaman depan.

Kompas juga pernah menampilkan foto di halaman depan tentang barikade-barikade yang dipasang aparat keamanan pada ruas jalan raya Bandaaceh-Medan yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 buah. Tulisan yang menyertai foto itu memaparkan kondisi transportasi di sana, kondisi keamanan saat ini sampai dengan pungutan yang dilakukan oknum-oknum aparat keamanan.

Kira-kira seminggu setelah berita itu terbit, datang surat kaleng dari pembaca. Surat itu memprotes foto barikade oleh aparat keamanan itu. Menurut penulis surat kaleng ini, *Kompas* pengecut tidak berani memotret cegatan oleh GAM yang kata penulis surat jumlahnya juga tidak sedikit serta meminta uang lebih besar daripada oknum aparat. Surat diakhiri dengan

kalimat: “Maaf saya tidak mencantumkan identitas karena saya kuatir Bapak wartawan yang pro GAM”.

Satu hal yang langsung ingin dibantah oleh *Kompas* soal tuduhan dari penulis surat kaleng itu adalah, selama menjalani rute darat Banda Aceh-Medan, wartawan *Kompas* sungguh sama sekali (mungkin kebetulan) tidak berjumpa dengan cegatan yang mengatasnamakan GAM.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa sampai foto yang tingkat “kebahayaannya” rendah pun (foto barikade) bisa menimbulkan multi interpretasi. Untuk wilayah konflik, kewaspadaan pada pemilihan sebuah foto untuk dipublikasikan memang harus ekstra ketat. Pada setiap foto terpilih harus selalu dilakukan recheck pada diri sendiri sebelum naik ke percetakan, misalnya begini, misalnya begitu,dan seterusnya....

Pada waktu Panglima Angkatan Perang GAM, Tengku Abdullah Syafe’I, tertembak pada awal tahun 2002 lalu misalnya, ada pertanyaan: Perlukah foto jenazah Panglima AGAM ini dipasang di surat kabar ?

Dalam konteks jurnalisme damai, pemasangan foto jenazah Abdulla Syafe’I bukanlah hal yang bijaksana. Tidak memasang foto jenazah Abdullah Syafe’i bukanlah simbol “tidak nasionalis” hanya semata karena GAM telah dicap sebagai gerakan separatistis yang akan memisahkan diri dari Indonesia. Apa pun tujuannya, pemasangan sebuah “hasil kekerasan” dengan cara “keras” pasti akan menimbulkan titik api bagi kekerasan lain seberapa pun ukurannya.

Foto-foto dari wilayah konflik Aceh yang terbukti paling “damai” saat ini adalah foto-foto pengungsi lokal. Di banyak lokasi di Aceh terlihat pusat-pusat pengungsian dari penduduk yang sebenarnya tinggal tidak jauh dari tempat mereka mengungsi itu. Mereka memutuskan meninggalkan rumah dan sawahnya karena desa tempat mereka tinggal telah menjadi ajang baku tembak antara GAM dan pasukan TNI/Polri.

Penderitaan para pengungsi jarak dekat ini tidaklah kalah dengan penderitaan pengungsi di mana pun. Mereka kekurangan sandang dan pangan, juga terserang berbagai penyakit. Foto tentang pengungsi ini memberikan sebuah penyampaian damai dari sebuah konflik yang keras di Aceh. Foto para pengungsi ini setidaknya juga mengingatkan kedua pihak yang bertikai bahwa akhirnya rakyat kecil juga yang menjadi korban pertikaian yang terjadi di tingkat atas.

Selain itu, foto bekas-bekas kontak senjata antara TNI/Polri dengan GAM seringkali menimbulkan tanda tanya. Mengapa harus sekolah yang dibakar. Biasanya, pihak TNI/Polri mengatakan bahwa yang merusak sekolah adalah GAM. Sebaliknya, GAM mengatakan bahwa mereka tidak mungkin merusak infrastruktur Aceh yang berguna kalau mereka merdeka nantinya.

Gambar anak sekolah yang sedih melihat sekolahnya terbakar akan menjadi berita damai, mengingatkan kedua yang berseteru bahwa anak-anak yang tidak tahu apa-apa telah menjadi korban pertikaian.

Kalau ditanyakan apa sumbangan jurnalisme foto bagi resolusi konflik, jawaban yang paling sederhana adalah, mari jangan sebar foto yang memancing konflik baru atau membuat konflik lama tetap panas. Sesederhana namun kalau dijalankan sungguh sangat berguna.

Pokok Bahasan 5: Merancang TOR Liputan

Pada umumnya, jurnalis yang bekerja di daerah, kerap melupakan arti pentingnya perencanaan liputan. Faktornya bermacam-macam. Salah satunya adalah kebijakan redaksi, yang lebih sering menugaskan jurnalis, terutama koresponden di daerah, untuk membuat liputan-liputan *hard news*. Liputan model begini tidak membutuhkan ToR (*Term of Refferency*). Paling hanya dialog singkat antara jurnalis dengan redaktur bidang lewat pesawat telpon. Kalau pun ada tulisan pesanan, biasanya pihak redaktur hanya memberikan arahan secara lisan tentang apa-apa yang harus diliput, dan siapa yang harus dihubungi.

Akibat kebijakan redaksi yang seperti, maka tidak banyak jurnalis lokal yang memandang penting perencanaan liputan. Padahal perencanaan liputan yang baik, akan membantu fokus pencarian data, narasumber, dan membantu mengarahkan plot tulisan.

Perencanaan liputan, biasanya dituangkan dalam bentuk ToR yang mengandung unsur sebagai berikut: (i) detil liputan yang biasanya meliputi: nama rubrik, penanggungjawab rubrik, penerima tugas (ii) latar belakang masalah, (iii) angle, (iv) narasumber dan daftar pertanyaan, (v) studi dokumentasi, (vi) foto (vii) deadline.

Pekerjaan jurnalis pada hakikatnya tidak jauh beda dengan peneliti. Oleh karenanya membuat perencanaan liputan sangat dianjurkan sebelum jurnalis turun ke lapangan.

TUJUAN

- Jurnalis mengetahui dan memahami esensi pembuatan TOR liputan untuk wilayah konflik
- Jurnalis mengetahui mekanisme pembuatan TOR liputan berperspektif jurnalisme damai

POKOK BAHASAN

METODE

- Ceramah
- Diskusi

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- LCD
- Laptop
- Transparansi contoh TOR liputan berperspektif jurnalisme damai
- OHP

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan.
- Pada sesi ceramah, narasumber diminta untuk memaparkan secara garis besar pentingnya sebuah TOR liputan terutama untuk meliput peristiwa-peristiwa konflik. Selain itu dipaparkan pula bagaimana mekanisme pembuatan TOR dibarengi dengan menampilkan contoh-contoh TOR liputan yang ideal. Dengan demikian peserta diharapkan bisa mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah TOR liputan.
- Sesi ceramah kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana pada sesi ini peserta diajak untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab agar mereka memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang tata cara pembuatan TOR liputan.

Bahan Bacaan – 1, Pokok Bahasan 5 :

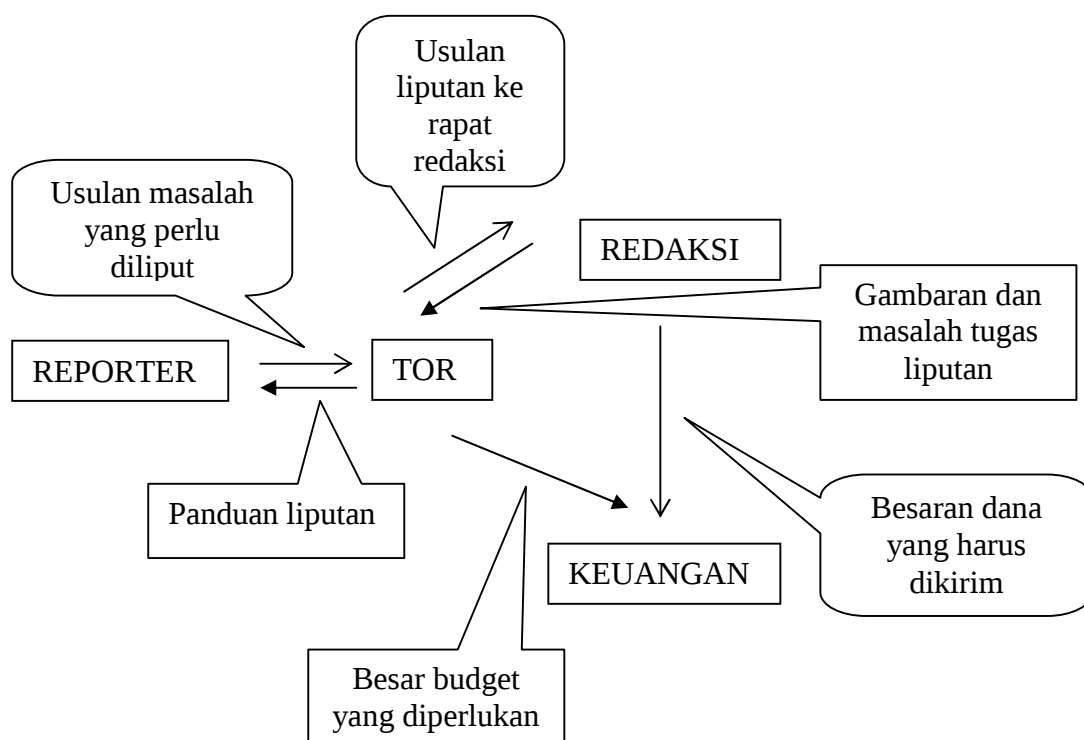
Merancang ToR Liputan

Oleh: Stanley A Prasetyo, Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

ToR adalah “kerangka acuan” yang lazim dibuat oleh redaktur sebagai penugasan ke reporter, atau rancangan liputan yang diusulkan reporter atau koresponden ke “redaksi”. ToR biasanya dipersyaratkan ketika redaksi memutuskan untuk membuat laporan utama atau sebuah tulisan khusus.

ToR memiliki fungsi untuk : (1) menjelaskan atau mengetahui permasalahan (urgensi, *newspeg*, dan nilai kelayakan), (2) mengetahui lingkup dan luas liputan (narasumber yang harus diwawancarai, lokasi yang harus didatangi, dll), (3) mengetahui waktu atau durasi liputan (lama liputan, rencana perjalanan, deathline, dll), dan (4) mengetahui anggaran yang dibutuhkan (besar budget yang dibutuhkan bagi setiap komponen anggaran seperti penginapan, perdiem, transport, jamuan relasi, dll).

Secara skematis, mekanisme usulan ToR dapat digambarkan seperti berikut ini:



Secara umum, ToR mempunyai struktur atau kerangka seperti berikut ini:

* Judul:...

* Rubrik

1. Latar belakang/permasalahan
2. angle
3. waktu

durasi

deadline

4. gambaran tulisan

tulisan pertama

panjang : ... karakter

isi :

foto/grafis :

narasumber :

Tulisan kedua

Panjang : ... karakter

Isi :

foto/grafis :

narasumber :

5. Narasumber dan pertanyaan
nama, kontak (alamat, telepon)

- ... } pertanyaan
- ...
- ...

5.2. dst

- **catatan:** jika usulan dari bawah, cantumkan: nama, jabatan
- kontak
- tempat, tanggal

▪ **Dimensi peperangan meliputi:**

▪ Manusia ▪ Wilayah ▪ Senjata ▪ Uang/Bisnis ▪ Teknologi ▪ Prestasi ▪ Karir/kehormatan	▪ Derita ▪ Cinta ▪ Nasib ▪ kisah sukses	▪ pendidikan ▪ sosial ▪ politik ▪ ekonomi ▪ budaya	▪ pengkhianat ▪ kesatria ▪ oportunis ▪ tokoh jahat
---	--	--	---

▪ **Fog of the war:**

1. siapa yang berperang? (para stakeholder)
2. mengapa berperang?
3. bagaimana peperangannya?
4. di mana ada perang baru?
5. kapan perang terakhir?
6. peperangan seperti apa?
7. ada skenario besar?

5W, 1H

1. siapa yang paling dikorbankan
2. bagaimana dengan mereka yang tidak ingin berperang
3. apa saja yang telah dilakukan civil society untuk mengakhiri perang

4. bagaimana nasib perempuan, anak dan orang tua
 5. ada/tidak agenda tersembunyi di balik peperangan
 6. siapa yang bersembunyi di balik perang dan untuk kepentingan apa (kepentingan bisnis)
- *Hal-hal yang perlu direnungkan (seorang jurnalis):*
 1. bagaimana melihat perang
 2. apa yang bisa dilakukan
 3. apa misi kita
 4. bagaimana media tempat kita bekerja (mendukung/tidak)
 - **Ciri Jurnalisme Perang**
 1. pendekatan “kami” vs “mereka”
 2. lebih banyak mewawancarai para “panglima” (tokoh, birokrat)
 3. menonjolkan “kalah-menang”
 4. mengekspose fakta perang/pertempuran
 5. reaktif
 6. melihat dampak kasat mata
 7. hanya membangun simpati ke salah satu pihak
 8. memberi stigma
 - **Liputan pro Perdamaian**
 1. pendekatan pada solusi perdamaian: perundingan, kesepakatan
 2. cerita tentang kemanusiaan
 3. mewawancarai kaum “korban” (victims) dan “kurban” (sacrifices) di kedua pihak.
 4. mewawancarai para pegiat perdamaian (tokoh) di kedua belah pihak sebagai “kita semua”
 5. proaktif
 6. melihat dampak yang tidak nampak
 7. membangun empati untuk “korban” dan “kurban”
 8. harus anti dengan stigmatisasi

Contoh ToR Nani Afrida

Judul : Konflik Menyia-nyiakan “pasir Ajaib” itu

Rubrik : Archipelago/National

PJ : Muhammad Nafik/Dwi Atmanta

Latar Belakang Masalah

Pantai Bantak Tari di kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dikenal memiliki keistimewaan lebih daripada pantai-pantai lain di pesisir pidie. Selain sangat indah, pasir pantai itu ternyata mengandung khasiat untuk penderita lumpuh. Letak pantai itu 10 km ke arah Selatan Banda Aceh.

Sejak dulu, banyak penderita lumpuh menggunakan pasir di pantai Bantak Tari itu untuk terapi penyembuhan diri. Mereka datang dari seluruh penjuru Pidie dan luar Pidie. Ratusan orang Aceh sembuh total setelah berbulan-bulan tinggal di tepi pantai itu dan menguburkan setengah badan ke dalam pasir yang warnanya kehitaman itu karena mengandung sejenis zat besi.

Kebanyakan penderita lumpuh yang pergi ke sana adalah kalangan menengah ke bawah. Berobat di “pasir ajaib” itu lebih murah dan alami ketimbang obat-obatan kimia dari dokter yang harganya mencekik leher.

Untuk menampung pasien lumpuh, seorang masyarakat yang bernama Teungku Ali (67) berinisiatif membuat pondokan untuk mereka. Teungku Ali juga membantu para penderita lumpuh dengan menggali pasir untuk terapi kesembuhan pasien. Semua dengan harga murah dan terjangkau oleh pasien.

Namun, semenjak konflik merembak tahun 1999, Pantai Bantak tari menjadi luluh lantak. Puluhan karung berisi kerangka manusia tiba-tiba di temukan terkubur di dalam pasir.

Kerangka itu adalah korban saat Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1989-1998.

Bukan itu saja, kawasan Simpang Tiga Pidie menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Banyak masyarakat dari luar kecamatan tersebut yang tidak berani lagi ke kawasan Bantak tari. Pun supir angkutan umum.

Kondisi keamanan juga berpengaruh bagi penderita lumpuh yang mencari kesembuhan di sana. Akibatnya pondokan tempat para penderita lumpuh itu mulai sepi. Dan akhirnya tutup sama sekali.

Angle: Kondisi Pantai Bantak Tari Pidie yang terkenal karena pasir ajaibnya dan juga pemilik pondok pasien lumpuh semenjak konflik merebak

Waktu : 12 hari

Deadline: 12 hari setelah TOR ini disetujui

Gambaran Tulisan

Tulisan Pertama

Panjang tulisan	: 7000 karakter
Isi	: Gambaran Pantai Bantak Tari saat ini, dan waktu sebelum konflik. Termasuk kondisi pondok tempat pasien lumpuh.
Foto	: Pantai Bantak Tari, dan foto pondok yang terbengkalai.
Narasumber	: Masyarakat di sekitar kawasan Pantai Bantak tari termasuk yang tahu soal tempat pembuangan mayat dan Para Nelayan.

Tulisan Kedua

Panjang tulisan	: 5000 karakter
Isi	: Tulisan tentang profil teungku Ali, semenjak bergelut mengurus pasien lumpuh. Termasuk pengalamannya masa konflik dan kerugiannya selama konflik.
Foto	: Wajah Teungku Ali
Narasumber	: Teungku Ali, keluarga Teungku Ali

Tulisan ketiga

Panjang tulisan	: 5000 karakter
Isi	: Khasiat pasir ajaib pantai Bantak Tari dimata pasien-pasien yang sembuh dari lumpuh dan masyarakat.
Foto	: Pasir Bantak Tari, Foto lainnya disesuaikan.
Narasumber	: Pasien yang sembuh dari Pasir Bantak Tari, Teungku Ali dan Masyarakat.

Nara Sumber dan Pertanyaan

Masyarakat

- Bagaimana kondisi Pantai Bantak Tari sebelum konflik?
- Bagaimana kondisi Pantai Bantak tari selama konflik?
- Sejak pantai itu sepi, apa kerugian yang didapat masyarakat?

- Sejak kapan pasir ini diketahui mengandung khasiat untuk orang lumpuh?
- Mengapa tempat ini menjadi sepi?
- Masih adakah orang yang berobat disana?
- Pertanyaan lain akan disesuaikan dengan keadaan...

Teungku Ali

- Bio data Teungku Ali?
- Mengapa tertarik mengurus pasien lumpuh?
- Apakah memperoleh banyak uang?
- Bagaimana pondok pasien lumpuh selama konflik?
- Bagaimana pondok pasien lumpuh sebelum konflik?
- Ada berapa pasien yang sembuh karena pasir itu?
- Khasiat apa yang dikandung pasir tersebut?
- Sejak kapan banyak masyarakat yang tahu tentang pasir itu?
- Apa kerugian yang Anda derita karena konflik?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan pasien lumpuh untuk sembuh selama berobat di Bantak Tari?
- Sebelum konflik apakah ada gangguan dari pihak bertikai di pondok pasien lumpuh?
- Bagaimana setelah konflik?
- Masih adakah orang yang berobat disana?
- Mengapa tempat ini menjadi sepi?

Pasien/keluarga Pasien yang sembuh

- Bagaimana pengalaman Anda sembuh dengan pasir Bantak Tari?
- Berapa biaya dan waktu yang sempat Anda keluarkan selama berobat?
- Apa kesan-kesan Anda terhadap pasir Bantak Tari?

Ice Breaking: Titanic

TUJUAN

- Membangun kebersamaan
- Perlunya anggota tim menyatukan tujuan kelompok
- Menunjukkan perlunya pengorbanan anggota tim demi kesuksesan tim
- Mencari strategi untuk memecahkan permasalahan
- Berpikir kreatif

PROSES

- Semua anggota tim diminta untuk berdiri di atas kain seakan-akan mereka berada dalam satu kapal yang akan tenggelam. Tidak ada bagian dari kaki yang berdiri di luar kain. Setelah mereka berhasil berdiri di atas kain dalam hitungan satu sampai lima (dihitung mundur) kemudian mereka diminta keluar dari kain.
- Selanjutnya mereka diminta memperkecil ukuran kain tempat berpijak dengan cara melipatnya menjadi separuhnya. Setelah itu mereka diminta berdiri lagi di atas kain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tujuan yang akan dicapai kelompok adalah kemampuan untuk berdiri di atas kain yang ukurannya sekecil mungkin.

INSTRUKSI

- Tanyakan pelajaran apa yang mereka peroleh
- Tanyakan apa persyaratan sukses mencapai ukuran terkecil?
- Perilaku apa yang harus ditunjukkan oleh anggota kelompok agar sukses?

Pokok Bahasan 6: Mengenal Straight News dan Features

TUJUAN

- Jurnalisi mengetahui teknik menulis berita (straight news dan features) dengan perspektif jurnalisme damai
- Jurnalisi dapat menggunakan/memilih diksi yang berperspektif jurnalisme damai
- Jurnalisi dapat menentukan angle liputan yang berperspektif jurnalisme damai
- Jurnalisi dapat melakukan inventarisasi angle-angle liputan dengan perspektif jurnalisme damai

POKOK BAHASAN

METODE

- Ceramah dan Diskusi

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- Transparansi contoh berita berperspektif jurnalisme damai dalam bentuk *straight news* dan *features*
- Transparansi angle-angle peliputan berperspektif jurnalisme damai

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan
- Pada sesi ceramah, narasumber diminta untuk memaparkan tentang ragam penulisan berita dengan memberi penekanan pada *straight news* dan *features*. Narasumber juga diminta untuk menjelaskan bagaimana teknik dan kaidah menulis berita dengan menggunakan perspektif jurnalisme damai baik dalam bentuk *straight news* maupun *features*, serta memberikan contoh-contoh berita yang dibuat dengan menggunakan perspektif jurnalisme damai.
- Setelah sesi ceramah selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi sesuai dengan topik yang dibawakan narasumber, dengan tujuan peserta bisa lebih memahami teknik menulis berita dengan menggunakan perspektif jurnalisme damai serta paham tentang hakekat dan kaidah jurnalistik yang berperspektif jurnalisme damai. Pada sesi ini peserta diharapkan aktif untuk saling bertukar pikiran maupun melontarkan pertanyaan atau tanggapan sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok bahasan yang dibawakan dan akhirnya bisa mengadopsinya ketika melakukan praktek jurnalisme yang sesungguhnya.

Bahan Bacaan

Features adalah karangan non-fiksi, bukan straight news, dalam media massa yang tak tentu panjangnya, dipaparkan secara hidup sebagai pengungkapan daya kreativitas kadang-kadang dengan sentuhan subyektivitas pengarang terhadap peristiwa, situasi, aspek kehidupan dengan tekanan pada daya pikat manusiawi untuk mencapai tujuan memberitahu, menghibur, mendidik dan meyakinkan pembaca.

Feature menentukan bagaimana kisah yang ditulis punya daya tarik. Karena tulisan lebih hidup dan punya nuansa. Kekayaan sebuah *feature pertama* mengandung sebuah gaya imajinatif, kreatif, tak terduga (*unpredictable*), manusiawi, dan juga sastra; *kedua* tulisan *features* mempunyai kesatuan, fokus dan tujuan (*unity, focus, purpose*); *ketiga* sebuah *feature* harus bisa membuat perasaan pembacanya campur-aduk seperti: tertawa, sedih, kecewa, terkecoh, marah dan sebagainya.

Struktur penulisan *features* menyerupai piramida bergantung. Berbeda dengan *straight news* yang bentuk tulisannya lebih menyerupai segitiga terbalik. Meski bagiannya tetap sama yakni terdiri dari *lead*, perangkat/tubuh tulisan, dan penutup.

Ada beberapa ragam *feature*:

1. Backgrounders. Tulisan latar belakang yang menjelaskan atau menguraikan suatu berita.
2. Laporan investigasi. Tulisan yang menyampaikan informasi penting.
3. Profil. Tulisan tentang manusia dan organisasi
4. Human-interest. Tulisan yang menggambarkan tentang manusia.
5. Brighteners. Tulisan yang mengundang tawa pembacanya.
6. Travel. Tulisan tentang sebuah catatan perjalanan.
7. Curtain Raiser. Tulisan yang membuka tabir peristiwa atau tentang persiapan suatu kejadian penting.
8. News Analysis. Tulisan yang merupakan penafsiran atas sebuah masalah yang kompleks dan berdampak besar.
9. In-Depth Reporting. Tulisan yang membatasi diri untuk membahas suatu masalah yang kompleks hanya dari 1 aspek saja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menulis sebuah *feature*, yaitu:

1. Beri tiupan kehidupan untuk memberi jiwa pada tulisan (dengan memasukkan sisi kemanusiaan).
2. Berikan deskripsi suasana, ruang dan kejiwaan (untuk membuat tulisan menjadi colorful).
3. Tulis dengan gaya naratif
4. Berikan latar atau setting.
5. Masukkan anekdot.
6. Banyak masukkan kutipan untuk memberikan nafas hidup.
7. Kemukakan alasan kenapa tulisan kita ini layak dikemukakan pada pembaca: karena unik? Karena besar? Karena pertama kali? Karena sedang hangat? Dst.
8. Pakailah *lead*. Ide-ide untuk membuat *feature* biasanya datang dari *bad, sad, tears, city, history*

Keberhasilan dari sebuah penulisan *feature* adalah tergantung kepada kemampuan penulis untuk melihat hal-hal yang penting dari tingkah laku manusia, dan dapat mengungkapkan hal itu sehingga pembaca pun mengetahui dan dapat merasakannya.

Sebuah *feature* membutuhkan *lead* yang “kuat” (menarik perhatian). *Lead* (bahasa Indonesia “teras”) adalah beberapa kalimat yang ada di bagian paragraf pertama sebuah tulisan

feature. *Lead* merupakan sebuah bagian tulisan yang digunakan untuk menangkap minat pembaca. Bisa diandaikan, seseorang menulis tanpa *lead* itu ibarat orang memancing tanpa kail.

Ada beberapa fungsi *lead*:

1. Untuk mengail pembaca
2. Untuk menarik pembaca agar mengikuti cerita, juga untuk membuat jalan alur cerita menjadi lancar.

Lead harus punya nyawa dan tenaga, untuk itu harus menggunakan kata aktif, terutama yang ringkas dan hidup agar memberikan kekuatan untuk “bergerak”. Juga kata sifat (seperti “ramping”, “ringsek”, “montok”, “mengkilat”, dll) yang bisa memberikan andil untuk mempercantik dan menambah vitalitas *lead*.

Ada bermacam-macam *lead*:

1. *lead* ringkasan. *Lead* ini biasa digunakan dalam penulisan berita keras. Yang ditulis biasanya hanya inti cerita. Pada pembaca diserahkan keputusan untuk terus membaca atau tidak, berminat atau tidak. *Lead* jenis ini kerap digunakan bila sang wartawan punya persoalan yang kuat dan menarik. *Lead* ini gampang dibuat, hingga biasa digunakan oleh para wartawan yang buru-buru karena diuber *deadline* atau bila sedang kebingungan mencari *lead* yang lebih baik.
2. *lead* bercerita. Jenis ini digemari para penulis cerpen atau novel sebab selalu menarik sekaligus membenamkan pembaca. Cara pembuatannya adalah dengan melukiskan suasana dan membiarkan pembaca jadi tokoh utama. Bisa dengan cara menciptakan kekosongan yang kemudian secara mental dengan sendirinya akan diisi oleh pembaca. Atau membiarkan pembaca mengidentifikasikan diri di tengah-tengah kejadian yang berlangsung.
3. *lead* tudingan langsung. *Lead* ini mengajak komunikasi langsung dengan pembaca. Pada *lead* jenis ini kerap ditemukan kata “Anda” yang disisipkan pada paragraf pertama. Kelebihan *lead* jenis ini adalah “memaksa” pembaca untuk terlibat meski kerap tidak secara rela. Pembaca sering merasa ditantang dan dipaksa masuk ke cerita.
4. *lead* penggoda. *Lead* jenis ini digunakan sebagai alat pemikat dengan cara mengelabui pembaca lewat gurauan segar. Tujuan utamanya tak lain adalah menggaet perhatian pembaca dan menuntunnya agar membaca seluruh cerita. *Lead* jenis ini biasanya ringan dan pendek. Umumnya digunakan teka-teki yang bikin pembaca penasaran.
5. Selain itu masih ada berbagai jenis *lead* lain. Antara lain *lead* pasak, *lead* kontras, *lead* pertanyaan, *lead* deskriptif, *lead* stakato, *lead* ledakan, *lead* figuratif, *lead* epigram. *Lead* literer, *lead* parodi, *lead* kutipan, *lead* dialog, *lead* kumulatif, *lead* suspensi, *lead* urutan dan *lead* sapaan.

Ketika menulis sebuah *feature* sangat penting untuk mendeskripsikan suasana, ruang dan kejiwaan

- Menampilkan setting. Setting dalam *feature* sangat penting. Misalnya gambarkan keberadaan pabrik, ruangan kantor, ruangan kelas, lapangan bola, toko dan sebagainya dalam tulisan sedapat mungkin sebagai latar belakang. Termasuk bila perlu perbandingan ukurannya (misalnya: Vatikan yang ternyata luasnya hanya 1,5 kali kompleks Senayan)
- Deskripsi dalam sebuah *feature* juga menambah menarik tulisan. Ketika membuat deskripsi, Berikan gambaran detil yang mungkin bisa digunakan untuk mendukung (bukan sekadar mewarnai) cerita; sesuatu yang konteks dengan persoalan yang tengah dibicarakan; ambil satu dua detil yang paling mencolok untuk mendukung suasana datau gambaran yang hendak kita bangun: lukisan pribadi sang tokoh, komputer yang ketinggalan jaman, koleksi buku, kalender bergambar perempuan telanjang, kursi yang telah jebol, di kamar guru itu map berantakan, di halaman pabrik ada banyak besi tua menumpuk dst.
- Memasukkan anekdot atau cerita lucu di dalam *feature* akan lebih baik. Anekdot juga akan menambah rasa tertarik pembaca terhadap sebuah *feature*. Kalau tidak, masukkan cerita

kecil yang menarik, misalnya: para anggota pemadam kebakaran yang sambil menunggu matinya api Gedung Sarinah yang terbakar, asyik bermain catur.

Contoh News Features -1 :

Terusir Dari Tanah Kelahiran

Kesedihan tampak terpancar dari raut wajah Sutyem binti Mubari, 50 tahun, ketika mengingat kejadian yang menyimpannya di pertengahan tahun 1999 lalu. Saat itu, ia dan keluarganya terpaksa harus mengangkat kopor dari rumahnya yang sederhana di Patok 13 Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Bireuen, menuju Stabat, Medan, Sumatera Utara. Ia terpaksa meninggalkan kebun dan ladang tempat dia menggantungkan hidup.

Sutyem yang dilahirkan dari suku Jawa itu, terpaksa angkat kaki dari Aceh setelah menuai ancaman. Sutyem tidak seorang diri, ketika meninggalkan tanah kelahirannya. Setidaknya masih ada sekitar 50 orang lainnya yang terusir dari Aceh.

“Mulai tahun 1999 sudah ada ancaman. Ada yang dikirim surat kaleng, tapi *nggak* ada yang mendatangi rumah,” kenang Sutyem mengawali kisahnya di hadapan sejumlah wartawan Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang mengikuti pelatihan Jurnalisme Damai yang diselenggarakan Yayasan KIPPAS Medan bekerjasama dengan Yayasan TIFA Jakarta, di Hotel Garuda Citra, Medan, Senin (29/11/04).

Sutyem tidak begitu mengetahui bunyi ancaman yang ditebar orang bersenjata itu. Selain tidak pernah menerima surat kaleng berisi ancaman, peneror juga tidak pernah meneror keluarga Sutyem secara langsung. Dia hanya mendengar berita pengancaman dari mulut-mulut para tetangganya. Menurut Sutyem, ancaman itu memerintahkan kepada warga desa yang bersuku Jawa untuk meninggalkan Aceh. Ancaman itu membuat nyali Sutyem, kecut.

Sutyem mengatakan, ancaman itu juga memakan korban. Saat itu, *Keuchik* Teupin Mane, Mahmud, meregang nyawa setelah ditembak sekelompok orang bersenjata yang memakai topeng sebu.

Nyali Sutyem semakin kecut, setelah kematian Mahmud. Ancaman yang ditebar pun, semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah Maarif dan ayahnya, menjadi korban.

Saat itu, Maarif dan ayahnya pergi ke kebun. Sedang asyik mengurus tanamannya, mereka diserang sekitar tujuh orang berpakaian loreng. Para penyerang berbicara bahasa Aceh. Beruntung, Maarif sempat lari meminta pertolongan warga setelah dua tikaman pisau melukai perutnya. Sementara ayahnya, dibawa bersama orang tak dikenal itu. Warga kemudian membawa Maarif ke Rumah Sakit Umum Bireuen (sekarang RSUD Dr Fauziah –red.), untuk mendapat perawatan medis akibat luka yang dideritanya.

Maarif sempat berpesan kepada Saleh, tokoh masyarakat Desa Teupin Mane, untuk mencari jejak ayahnya. “Tolong cari ayah saya. Kalau sudah mati di mana jasadnya,” Sutyem menirukan permintaan Maarif.

Saleh lalu mengajak beberapa warga untuk mencari ayah Maarif. Namun usaha yang ditempuh warga tidak membuahkan hasil. Dalam pencarian ke hutan itu, warga menemukan ladang ganja yang lebat. Warga lalu membabat dan membakar ladang ganja itu.

Pasca pembakaran ladang ganja, ancaman dan teror yang dituai warga bertambah parah. Pemilik ladang menuduh warga Desa Teupin Mane yang bersuku Jawa, sebagai pelaku pembakaran. Tak tahan menerima ancaman, warga yang bersuku Jawa lantas mengambil kesimpulan untuk meninggalkan Desa Teupin Mane.

Kepedihan yang diderita Sutyem semakin terasa, ketika Sumeh, suaminya, terus digerogeti penyakit. Semakin hari, tubuh Sumeh semakin kurus hingga menemui ajal, tak lama kemudian.

Sumeh, sebelum meninggal, sempat berpesan kepada Sutyem untuk tidak menjual ladang dan tanah mereka. Suaminya, kata Sutyem, menginginkan tanah milik mereka ini, bisa dijadikan bekal bagi anak-anaknya nanti. “Makanya saya tidak menjual. Semua tanah saya, masih ada surat-surat tanah sama saya,” kata Sutyem.

Setelah memilih waktu yang tepat, para warga yang bersuku Jawa pun kemudian mempersiapkan kepergian mereka. Walaupun dalam beberapa kesempatan, seringkali para ustadz yang memberi ceramah di *meunasah* (surau) desa mengingatkan agar mereka jangan pergi.

Tapi, ketakutan terhadap ancaman telah memantapkan niat mereka untuk mengungsi dari desa. “Suami saya baru tujuh hari meninggal saat kami pergi mengungsi,” jelas Sutyem lirih.

Bersama puluhan warga lainnya, Sutyem dan lima anaknya menaiki sebuah truk tronton. Sementara Wiji, anak sulung Sutyem, sudah duluan mengadu nasib di Banda Aceh. “Sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya,” kata Sutyem.

Sutyem dan puluhan warga lainnya, sudah membulatkan tekad menuju Kota Medan. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sutyem tabah meninggalkan lima hektar kebunnya di Desa Teupin Mane dan dua hektar tanah yang dibelinya di Desa Alue Papeuen, Aceh Utara. Sebuah rumah semipermanen yang selama ini ditempatinya, juga terpaksa ditinggalkan begitu saja.

Sebelum meninggalkan desa, Sutyem sempat berpamitan kepada tetangganya yang suku Aceh. Dia mengaku tegar menghadapi semua musibah yang menimpanya.

“Kok bibi *nggak nangis*?” tanya salah seorang warga yang bersuku Aceh.

“Aku diusir sama orang Aceh juga, *ngapain nangis*,” Sutyem menjawab sekenanya.

Truk tronton lalu membawa mereka menuju Medan, tanpa sempat membawa barang-barang perbekalan. Mereka terpaksa menutup bagian atas bak tronton itu dengan terpal, menghindari pemeriksaan yang mungkin bisa mengakibatkan mereka terancam. Jelas mereka sesak dan kepanasan. Suasana begitu haru, saat anak-anak mereka menangis.

Sesampainya di Lhokseumawe, rombongan itu dihentikan sepasukan aparat keamanan. Aparat terkejut ketika membuka terpal penutup.

“Kok ditutup, mau ke mana ini?” tanya aparat.

“Ke Medan Pak, cari kerja,” sebut Sutyem.

Aparat keamanan juga menanyakan di mana mereka tinggal, situasi keamanan di desa mereka dan untuk apa meninggalkan desa. Para pengungsi terpaksa menjawab sejujurnya.

Mereka lalu diperbolehkan melanjutkan perjalanan. “Penutupnya dibuka *aja*, tidak apa-apa,” Sutyem menirukan perintah aparat. Mereka pun leluasa bernafas.

Keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, mereka tiba di Stabat, Medan. Rombongan itu meminta perlindungan dan tempat tinggal pada Yayasan Bitra. Selanjutnya mereka berpencar mencari saudaranya masing-masing. “Saya sebatang kara, tidak punya saudara,” kenang Sutyem.

Beruntung, Sutyem yang tidak mempunyai keluarga di Medan diterima sebagai pembantu di Yayasan Bitra. Itu pun atas kebaikan Sukirman, abang kawannya, yang kebetulan juga pengurus di yayasan itu.

Dengan upahan Rp 200.000/bulan, Sutyem menanggung biaya hidup tiga anaknya yang masih sekolah. Beruntung kedua anaknya yang lain telah mendapat kerja di Medan dan kemudian berumah tangga.

“Saya tabah menghadapi semua ini, kita serahkan saja sama Yang Mahakuasa,” tutur Sutyem.

Sebelum mengungsi, Sutyem bukanlah orang tak punya. Dia telah memiliki segalanya di tanah tempatnya terusir. Kebun yang dipunyainya telah lebih dari cukup untuk menghidupinya. “Saat itu, coklat lagi mahal-mahalnya, Rp 17 ribu sekilo,” sebutnya mengenang. Itu belum lagi kebun kopi dan pinang yang juga sempat diurusnya sebelum terusir.

Meski bersuku Jawa, Sutyem dilahirkan di Takengon, Aceh Tengah, 50 tahun silam. Tujuh saudaranya, juga lahir di Aceh. Pasalnya, sudah sejak tahun 1920, orangtua Sutyem mendiami Takengon, Aceh Tengah.

Sutyem muda berumah tangga ketika Sumeh melamarnya. Setelah berumah tangga, Sutyem sempat 15 tahun tinggal di Desa Balek, Takengon. Bersama suaminya, dia pindah ke Desa Teupin Mane, untuk berkebun. Dia juga sempat dua tahun tinggal di Alue Papeuen, Aceh Utara.

Tahun 1989, saat Aceh Merdeka bergejolak, Sutyem dan keluarga kembali pindah ke Desa Teupin Mane. Tapi di sini pun hanya sepuluh tahun. Sutyem kembali harus mengungsi ke luar Aceh setelah suaminya meninggal. Mungkin lain ceritanya kalau suaminya masih ada.

Setelah mengungsi dari Aceh, rumah dan kebunnya menjadi tak bertuan. Hanya pusara suaminya yang tertinggal sebagai saksi keberadaan Sutyem sekeluarga di desa itu. “Saya takut kembali ke Aceh kalau belum aman,” sebutnya berlinang airmata. [A]

(Tulisan ini merupakan hasil ptaktek menulisan di kelas pada Pelatihan Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai yang diadakan Yayasan KIPPAS di Medan tanggal 29 November – 3 Desember 2004)

Contoh News Features -2 :

Memulihkan Kembali Hubungan Keluarga

Oleh: KHAERUDIN

Sujimah Judin (49) dan putri bungsunya, Putri Maqfirah (13), tidak kuasa menahan haru. Mereka langsung menangis begitu melihat Zulkifli Nasir (64). Dengan derai air mata, ketiganya berangkul.

Inilah perjumpaan pertama Sujimah dan Putri dengan suami dan ayah mereka setelah hampir lima tahun terpisah tanpa kabar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Kelas II Tanjung Gusta Medan Lukman Effendi yang mengantarkan Zulkifli keluar dari selnya juga tidak kuasa menahan haru. Ia tampak menitikkan air mata meski tetap berusaha menjaga sikap tegas.

Dengan bantuan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), keluarga itu bisa dipertemukan kembali lewat program Reunification of Family Links.

Tahun 2001 menjadi pertemuan terakhir Zulkifli dengan keluarganya. Setahun sebelumnya Zulkifli dan Sujimah merantau ke Jakarta menghindari kekerasan akibat konflik bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam.

Zulkifli khawatir bernasib sama seperti orang Aceh lainnya yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan aparat TNI. Saat itu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak segan menculik rakyat Aceh yang dianggap dekat dengan TNI.

Saya termasuk salah satunya karena pernah membantu adik istri saya masuk menjadi tentara. Katanya, apa yang saya lakukan ini hanya menambah banyak TNI di Aceh, ujar Zulkifli.

Namun, sayang pasangan suami-istri tersebut gagal menaklukkan Ibu Kota. Mereka memutuskan kembali ke kampung halaman.

Hanya Zulkifli yang tidak ikut serta karena masih khawatir digedor malam atau diculik tengah malam oleh GAM. Dia memilih mengadu nasib di Medan untuk menghidupi istri dan keempat anaknya yang ditinggal di Banda Aceh.

Untuk berhubungan dengan keluarga, Zulkifli biasa menelepon rumah tetangganya di Banda Aceh. Namun, sejak tetangganya pindah rumah, kesempatan menghubungi keluarganya tidak bisa dilakukan lagi.

Celaknya, di Medan, Zulkifli tidak punya alamat tetap sehingga keluarganya susah menghubunginya. Praktis sejak tahun 2001 itu hubungan Zulkifli dengan keluarganya terputus.

Mendekam di penjara

Untung tidak dapat diraih, malang tidak bisa ditolak. Zulkifli yang belum berani pulang ke Aceh malah harus mendekam di penjara. Tanggal 13 Februari 2004 Zulkifli menyerahkan diri kepada polisi setelah menikam seorang preman tak jauh dari tempatnya berjualan makanan dan minuman di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Ia tidak tahan diejek dan diperas oleh preman jalanan yang usianya jauh lebih muda dari dia.

Lelaki yang pernah bekerja sebagai penjual tiket bus antarkota antarprovinsi itu didakwa pasal penganiayaan. Vonis tiga tahun penjara pun dijatuhkan kepadanya.

Sujimah tidak pernah tahu nasib suaminya itu. Di saat yang sama, justru dia mendengar kabar suaminya telah meninggal. Entah siapa yang pertama kali mengabarkannya. Katanya, kabar ini datang dari teman suami saya di Medan, tutur Sujimah.

Sedih dan bingung berkecamuk dalam diri Sujimah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Memutuskan untuk mencari suaminya ke Medan pun tidak berani. Apa yang harus saya cari di Medan? Kotanya kan luas, sementara suami saya tidak punya alamat yang jelas, katanya.

Ketegaran hati seorang perempuan yang akhirnya membantu Sujimah menghadapi kebingungan. Hampir tiap hari saya berdoa agar bisa diperkenankan melihat suami saya. Kalau memang dia sudah meninggal, tunjukkan saya di mana pusaranya. Kalaupun dia pergi dan menikah lagi, izinkan saya untuk melihatnya barang sebentar. Saya pun pasrah dan rela jika memang suami saya beristri lagi, tuturnya.

Sepeninggal suaminya, Sujimah berdagang nasi goreng di terminal bus Banda Aceh. Hampir setiap hari ia bertanya kepada sopir bus jurusan Medan-Banda Aceh tentang keberadaan suaminya. Namun, jawaban yang didapatnya selalu sama. Mereka tak pernah lagi melihat Zulkifli.

Di dalam penjara, Zulkifli juga memendam derita. Bencana tsunami yang meluluhlantakkan Aceh akhir tahun lalu membuyarkan harapan bertemu lagi dengan keluarganya.

Dari berita yang ia dengar, tsunami menghancurkan permukiman tempat ia tinggal dulu. Begitu tahu ada bencana itu, saya langsung lemas. Pikiran saya kosong, tidak tahu harus berbuat apa? ujarnya.

Mengisi formulir

Setitik harapan terbit ketika dua petugas ICRC, Nathalie Klein dan Rolf Immler, mengunjungi LP Tanjung Gusta, 13 Juli lalu. Mereka mendata narapidana asal Aceh untuk program pencarian keluarga yang hilang.

Zulkifli pun ikut mengisi formulir pencarian. Lewat berbagai usaha dan verifikasi tentang orang yang dicari, ICRC akhirnya menemukan Sujimah dan anak-anaknya. Setelah pertemuan penuh haru di Balai Serba Guna LP Anak Tanjung Gusta, Zulkifli memang tidak bisa langsung ikut pulang ke Banda Aceh bersama istri dan anaknya. Dia masih harus menunggu selesainya pelaksanaan vonis hukuman. Mungkin jika saya bisa dapat remisi emas tahun ini, Agustus tahun depan saya bebas, katanya.

Pertemuan itu membayar semua beban derita sebuah keluarga yang terpisah akibat konflik bersenjata di Aceh. Seperti kata penerjemah ICRC, Flisch Joerimann, Rakyat Aceh butuh lebih dari sekadar rekonstruksi fisik. Memulihkan kembali hubungan keluarga, seperti mempertemukan Pak Zul dengan Ibu Sujimah dan anak-anaknya, juga sama halnya dengan memenuhi kebutuhan emosional mereka sebagai manusia.

(Sumber: Kompas, 29 Juli 2005)

17 Tips untuk Jurnalis Perdamaian?

1. Hindari penggambaran bahwa konflik hanya terdiri dari dua pihak yang berikai atas satu isu tertentu. Konsekuensi logis dari penggambaran macam ini adalah ada satu pihak yang menang, dan ada satu pihak yang kalah. Lebih baik menggambarkan ada banyak kelompok kecil yang terlibat mengejar berbagai tujuan, dengan membuka lebih banyak kemungkinan kreatif yang akan terjadi.
2. Hindari penerimaan perbedaan tajam antara “aku” dan “yang lain”. Hal ini bisa digunakan untuk membuat perasaan bahwa pihak lain adalah “ancaman” atau “tidak bisa diterima” tingkah laku yang beradab. Keduanya merupakan pembenaran untuk terjadinya kekerasan. Lebih baik mencari “yang lain” dalam diri “aku” dan juga sebaliknya. Bila suatu kelompok menampilkan dirinya sebagai “pihak yang benar”, tanyakan bagaimana perbedaan perilaku yang sesungguhnya dari “pihak yang salah” dari mereka – apakah ini tidak akan membuat mereka malu?
3. Hindari memperlakukan konflik seolah-olah ia hanya terjadi pada saat dan tempat kekerasan terjadi. Lebih baik mencoba untuk menelusuri hubungan dan akibat-akibat yang terjadi bagi masyarakat di tempat lain pada saat ini dan saat mendatang. Tanyakanlah:
 - Siapakah orang-orang yang akan beruntung pada akhirnya?
 - Juga tanyakanlah pada diri Anda sendiri: Apakah yang akan terjadi bila?
 - Pelajaran apa yang akan didapat oleh masyarakat dengan melihat peristiwa ini secara jelas, sebagai bagian dari pemirsa global? Bagaimana masyarakat akan menghitung para pihak yang berikai di masa mendatang dalam konflik yang dekat dan jauh dari lingkungannya?
4. Hindari pemberian penghargaan kepada tindakan atau kebijakan dengan menggunakan kekerasan hanya karena dampak yang terlihat. Lebih baik mencari cara untuk melaporkan dampak-dampak yang justru tidak kelihatan. Misalnya dampak-dampak jangka panjang seperti kerusakan psikis dan trauma, mungkin juga pengaruh kekerasan yang bisa meningkat di masa mendatang baik kepada orang lain, atau juga sebagai suatu kelompok, terhadap kelompok atau negara lain.
5. Hindari pengidentifikasian suatu kelompok hanya dengan mengulang ucapan para pemimpin mereka atau pun tuntutan yang telah dikemukakan. Lebih baik menggali tujuan yang lebih jauh, misalnya dengan bertanya: Apakah masyarakat biasa juga terkena dampak konflik dalam kehidupan sehari-harinya? Perubahan apa yang mereka inginkan? Apakah betul bahwa posisi yang dikemukakan oleh para pemimpin mereka hanya satu-satunya cara atau cara yang terbaik untuk mendapatkan perubahan yang mereka mau? Ini mungkin menjadi salah satu jalan untuk membantu pemberdayaan masyarakat, bekerjasama menuju penyeimbangan konflik, mencoba memperoleh hasil dengan tanpa kekerasan yang mungkin paling akan dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.
6. Hindari pemusatan perhatian hanya pada pihak-pihak yang berikai, hanya mencari perbedaan dari ucapan-ucapan kedua belah pihak tentang apa yang mereka inginkan. Lebih baik mencoba untuk bertanya yang membawa laporan Anda pada suatu jawaban yang bisa memunculkan kesamaan tujuan atau setidaknya yang bisa cocok diterapkan bagi kedua belah pihak.
7. Hindari pelaporan yang hanya mengandalkan unsur kekerasan dan mendeskripsikan tentang ‘horor’. Bila Anda mengeluarkan segala hal yang ingin Anda usulkan dan hanya menyebutkan bahwa penjelasan satu-satunya bagi kekerasan adalah kekerasan yang lain (pembalasan); hasilnya adalah kekerasan makin meningkat (pemaksaan dan penghukuman). Lebih menunjukkan bagaimana orang-orang telah membantu dan

frustrasi atau mengalami kerugian dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari tindak kekerasan.

8. Hindari menyalahkan salah satu pihak karena memulai perselisihan. Lebih baik menunjukkan bagaimana problem dan isu bersama bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
9. Hindari laporan yang hanya berfokus pada penderitaan, ketakutan, dan keluhan hanya dari satu sisi/ Hal ini akan membagi kedua belah pihak menjadi “pihak yang melakukan kekerasan’ dan ‘pihak yang menjadi korban’, serta seolah-olah mengusulkan bahwa tindakan paksaan dan penghukuman terhadap mereka yang memulai kekerasan, dianggap sebagai jalan keluarnya. Lebih baik memperlakukan kedua belah pihak mengalami kesengsaraan, ketakutan dan keluhan yang sama.
10. Hindari penggunaan bahasa-bahasa yang menonjolkan sosok korban seperti kata ‘miskin’, ‘hancur’, ‘tak berdaya’, ‘memelas’, ‘tragedi’, yang semuanya hanya menunjukkan hal apa yang telah dan mungkin dilakukan untuk kelompok ini. Penggunaan bahasa seperti ini bisa melemahkan mereka dan membagi opsi-opsi perubahan. Lebih baik melaporkan apa yang telah dan mungkin dilakukan oleh masyarakat. Jangan hanya bertanya kepada mereka apa yang mereka rasakan, tapi tanya juga bagaimana mereka mengatasi situasi tersebut dan apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka bisa mengusulkan sebuah jalan keluar? Juga harap diingat bahwa para pengungsi memiliki nama lengkap seperti orang-orang lainnya. Anda tak akan menyebut Presiden Clinton sebagai “Bill” saja dalam laporan Anda. Ini mungkin menjadi salah satu jalan untuk membantu pemberdayaan masyarakat, untuk mencoba memperoleh hasil dengan tanpa kekerasan yang mungkin paling akan dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.
11. Hindari penggunaan kata-kata emosional yang tidak tepat menggambarkan apa yang telah terjadi kepada sekelompok orang. Misalnya kata-kata sebagai berikut:
 - ‘genocide’ atau genosida, yang berarti menyingkirkan seluruh manusia.
 - “Pembersihan (=decimated)” – dari sekelompok penduduk, berarti mengurangi jumlah penduduk hingga sepersepuluh dari jumlah awalnya.
 - “Tragedi” adalah bentuk drama, aslinya bahasa Yunani, dimana kesalahan seseorang menunjuk kegagalannya.
 - “assassination” adalah pembunuhan kepada kepala negara.
 - “Massacre” atau “pembantaian” adalah pembunuhan yang ditujukan kepada mereka yang tak bersenjata atau tidak bisa membela diri. Apakah kita yakin dengan penggunaan kalimat dalam laporan kita? Ataupun mungkin orang-orang ini mati dalam peperangan?
 - “Sysematis” seperti perkosaan dan pemaksaan orang meninggalkan rumah mereka. Apakah betul dirancang demikian? Ataupun hal tersebut merupakan hal yang tidak terkait walaupun juga tetap merupakan tindakan yang menjijikkan.

Lebih baik kita selalu mengetahui secara persis situasi yang kita hadapi. Jangan mengecilkan arti penderitaan tapi gunakan bahasa yang kuat untuk situasi yang serius atau Anda akan menyalahkan bahasa dan membantu untuk membenarkan reaksi yang tidak proporsional hingga bisa meningkatkan kekerasan.

12. Hindari penggunaan kata sifat seperti ‘kejam’, ‘brutal’, dan ‘barbar’. Penggunaan kata-kata seperti ini menjelaskan pandangan satu pihak terhadap apa yang telah dilakukan oleh pihak lainnya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, jurnalis telah mengambil posisi dalam konflik tersebut dan bisa membantu membenaran terjadinya peningkatan kekerasan. Lebih baik, laporkan apa yang Anda tahu sebagai perbuatan yang salah, dan berikan informasi sebanyak mungkin tentang kebenaran dari laporan atau deskripsi kejadian tersebut.

13. Hindari penggunaan label seperti kata ‘teroris’, ‘ekstrimis’, ‘kelompok fanatik’ atau juga ‘fundamentalis’. Hal ini juga selalu terjadi sebagai pemberian julukan dari ‘kita’ kepada ‘mereka’. Tak pernah ada orang yang menggunakan kata tersebut untuk mendeskripsikan untuk diri mereka, oleh karenanya jika jurnalis menggunakan kata-kata tersebut itu berarti jurnalis sudah berpihak kepada salah satu pihak. Dengan penggunaan kata tersebut suatu kelompok hendak mengatakan bahwa pihak lain tidak perlu diperhatikan sehingga tak ada gunanya bernegosiasi dengan mereka. Lebih baik menyebut kelompok yang bertikai dengan nama yang mereka pakai sendiri, atau juga bisa dengan melakukan deskripsi secara lebih rinci dalam laporan Anda.
14. Hindari pemusatan perhatian hanya pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, perlakuan kejam dan kesalahan hanya dari satu sisi saja. Lebih baik menyebutkan semua pelaku kesalahan dan memperlakukan pihak-pihak yang bertikai secara setara karena telah melakukan kekerasan. Dengan memperlakukan masalah ini secara serius bukan berarti bahwa jurnalis telah berpihak, tetapi sebaliknya dengan cara ini berarti berusaha untuk mengumpulkan berbagai bukti yang ada untuk mendukung terjadinya perdamaian, memperlakukan korban-korban dengan rasa hormat yang sama, dan mencari bukti-bukti yang bisa diajukan ke pengadilan bagi yang bersalah secara adil juga merupakan hal yang penting.
15. Hindari pembentukan opini atau klaim yang seolah-olah sudah pasti. Lebih baik katakan kepada pembaca Anda (siapa) sumber yang mengemukakan hal tersebut. Dengan cara terakhir ini kita akan menghindari menandai diri kita dan berita yang kita buat sebagai serangan yang dibuat oleh suatu kelompok kepada kelompok lain dalam situasi konflik.
16. Hindari pujian atas perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh para pemimpin politik, yang hanya akan membawa kemenangan bagi militer atau pun gencatan senjata, seperti seolah-olah telah tercipta perdamaian. Lebih baik mencoba melaporkan berbagai isu yang masih tertinggal dan yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kekerasan kembali di masa datang. Tanyakanlah apa yang telah dikerjakan untuk memberikan dasar untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik dengan tanpa kekerasan, dalam kerangka perkembangan dan kebutuhan struktural masyarakat dan untuk menghadirkan adanya budaya perdamaian?
17. Hindari penantian akan pemimpin ‘kita’ mengusulkan jalan keluar. Lebih baik ambil dan gali usulan perdamaian dari mana pun asalnya. Tanyakan kepada para menteri misalnya tentang ide yang diberikan oleh kelompok akar rumput. Berikan perspektif tentang perdamaian yang Anda tahu tentang isu berbagai kelompok bertikai sedang mengusahakannya. Jangan mengabaikan mereka hanya karena mereka tidak setuju dengan posisi yang sudah lebih dulu ada.

(Annabel McGoldrick, Jake Linch, dikutip dari buku
 “Jurnalisme Damai, Bagaimana Melakukannya?”, 2001, Jakarta: LSPP).

Ice Breaking “Dichotomy”

TUJUAN

- Mengerti hakekat keragaman dan perbedaan
- Menghagai setiap keragaman
- Menunjukkan perlunya faktor penerimaan kelompok terhadap pengertian subyektif perorangan
- Berpikir kreatif

WAKTU

- 120 menit

PROSES

- Kepada peserta dijelaskan bahwa mereka diminta membentuk kelompok sesuai dengan “definisi” yang ditentukan fasilitator.
- Fasilitator mulai menyebutkan dikotomi kelompok menjadi dua bagian dengan hal yang paling mudah dikenali misalnya dengan mengatakan yang “laki-laki harap berdiri di sebelah kiri, perempuan berdiri di sebelah kanan”. Setelah itu secara bergantian fasilitator meminta agar para peserta menyebut dua perbedaan (yang cenderung berlawanan) yang akan membagi seluruh peserta menjadi kelompok. Misalnya “kurus-gemuk”, “tinggi-pendek”, “berkacamata-tidak berkacamata”, “berkulit cerah-berkulit gelap”, “berkaos-berbaju”, “bercelana-mengenakan rok”, “bersepatu-bersandal”, dst. Setiap kali menyebut definisi, peserta akan membentuk kelompok baru sesuai definisi. Hal ini terus dilakukan secara bergiliran hingga peserta kesulitan untuk menemukan “definisi” yang bisa membagi peserta menjadi dua kelompok.
- Setelah tingkat kesulitan yang dihadapi peserta semakin “tinggi”, hentikan permainan. Buat refleksi umum dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipan, serta kaitkan permainan tersebut dalam persoalan sosial di masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan jurnalistik:
 - Tanyakan pada setiap orang bagaimana perasaan mereka setelah melakukan permainan ini.
 - Apa yang mereka pikirkan?
 - Mengapa setiap orang bisa berkelompok berdasarkan definisi yang disebut orang?
 - Mengapa setiap kelompok bisa menerima?
 - Apakah pernah ada yang meragukan seseorang untuk bergabung dengan kelompoknya?
 - Mengapa dan bagaimana bisa terjadi pengelompokan?
 - Apa guna pengelompokan? Apa bahayanya?
 - Mengapa sebuah komunitas jarang menyadari sebuah perbedaan dan lebih sering orang luar komunitas yang menandai perbedaan?
 - Sejauhmana perbedaan bisa menimbulkan konflik?

Pokok Bahasan 7 :

Teori dan Praktek Wawancara untuk Korban Konflik

TUJUAN

- Jurnalis memperoleh pengetahuan tentang berbagai jenis wawancara untuk kepentingan tugas-tugas jurnalistik;
- Jurnalis dapat menguasai ketrampilan teknik wawancara dengan para para korban konflik.
- Jurnalis dapat menerapkan ketrampilan ketrampilan teknik wawancara dengan para para korban konflik dalam simulasi pelatihan.

METODE

- Ceramah
- Diskusi
- Simulasi

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- Makalah
- Kertas plano, spidol;
- LCD

PROSES

- Pada sesi ceramah, narasumber diminta untuk memaparkan tentang ragam teknik wawancara, khususnya untuk masyarakat yang menjadi korban konflik.
- Setelah sesi ceramah selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi sesuai dengan topik yang dibawakan narasumber, dengan tujuan peserta bisa lebih memahami teknik dan kiat wawancara untuk korban.
- Setelah diskusi selesai, fasilitator kemudian meminta peserta untuk melakukan praktek wawancara dengan korban yang secara sengaja telah dihadirkan dalam kegiatan pelatihan. Fasilitator melakukan penilaian terhadap jalannya kegiatan wawancara tersebut, dan hasil pengamatan tersebut didiskusikan kembali bersama-sama.

Bahan Bacaan:

Wawancara Dengan Korban Konflik

Oleh: Stanley Adi Prasetyo, Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

Secara jurnalistik, wawancara bisa didefinisikan sebagai “suatu percakapan terpimpin yang dicatat” Dikatakan sebagai percakapan yang terpimpin karena wawancara diatur dan direncanakan terlebih dulu. Terutama mengenai topik yang dipilih. Sementara unsur percakapan karena wawancara harus berjalan secara santai.

Wawancara menuntut keahlian serta kemampuan yang sangat baik dari pewawancara. Mulai dari pemahaman masalah yang hendak dibicarakan, kesanggupan “menaklukkan” sumber berita, hingga pada penulisan hasil wawancara. Hasil penulisan yang baik, bukan sekadar menghidangkan pernyataan serta fakta yang perlu diketahui pembaca saja. Kerap kali seorang wartawan harus mampu melibatkan pembaca pada suasana yang sesungguhnya, terutama untuk *colorfull story*, misalnya keadaan lingkungan sekitar, fenomena alam, ekspresi dan gerak-gerik sang narasumber, bunyi dan bermacam-macam hal lain yang relevan bagi penulisan.

Ada beberapa kegunaan wawancara; *pertama* wawancara merupakan upaya untuk merekonstruksi sebuah fakta sosial; *kedua* melalui wawancara, seorang wartawan bisa menyusun sebuah kejadian yang tidak diketahuinya menjadi sebuah gambaran peristiwa yang utuh; *ketiga* sebuah wawancara juga akan memberikan peluang bagi pewawancara untuk mengumpulkan anekdot dan mengonfirmasikan atau membantah apa yang telah diketahui; *keempat* wawancara juga berguna untuk menunjukkan bahwa kita sebagai wartawan berada di tempat kejadian.

Figur-figur yang layak diwawancarai antara lain; *pertama*, mereka yang karena pekerjaan atau kedudukannya penting (pejabat, direktur utama, komandan militer, Komandan GAM, pemimpin organisasi kemasyarakatan, tokoh, penjahat besar dll); *kedua* mereka yang mencapai prestasi tinggi dan banyak dibicarakan orang (seniman, bintang cilik, olahragawan, pemusik, atlet, celebrities dsb); *ketiga* mereka yang mengetahui sesuatu atau seorang penting yang berhubungan dengan informasi penting (saksi mata, seorang penyelidik, sekretaris yang menyimpan memo rahasia, istri simpanan seorang pejabat, sahabat seorang bintang dsb); *keempat* mereka yang dituduh melakukan kejahatan penting (seorang perampok kejam, pelaku pembunuhan berantai, pelaku pembunuhan disertai mutilasi dan sebagainya); *kelima* mereka yang menyaksikan terjadinya suatu kejadian penting (seorang saksi kejahatan, saksi tabrakan kereta api beruntun, saksi mata peristiwa longsohnya sebuah bukit di tengah kota, pelayan yang menyaksikan pembunuhan seorang nyonya muda oleh suaminya sendiri); *keenam* mereka yang menjadi penting karena sesuatu yang penting menimpa dirinya (korban kecelakaan, pemenang lotere, penjahat yang sedang buron, pemenang award dll); *ketujuh* mereka yang mewakili sebuah kecenderungan berskala besar yang penting (mahasiswi yang terpaksa menjual diri untuk bayar kuliah akibat krisis ekonomi nasional, penumpang pesawat Swiss Air yang terperangkap di bandara Cengkareng akibat banjir yang mengepung Jakarta, dsb).

Ada 3 jenis wawancara: *pertama* wawancara untuk memperoleh pendapat; *kedua* wawancara untuk penonjolan pribadi; *ketiga* wawancara untuk mengumpulkan banyak pendapat mengenai suatu topik.

Persiapan yang diperlukan sebelum melakukan wawancara antara lain pelajari masalah, susun daftar pertanyaan secara sistematis, pelajari dan riset siapa orang yang bakal diwawancarai (mengapa ia ada di kawasan itu, pengungsi atau bukan, sejauh mana penderitaannya, dst), minta waktu atau bikin janji.

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara *ask intelligent questions* yaitu jauhi jawaban sekadar “ya” atau “tidak” sebagai prinsip dasar seorang wartawan dalam mengumpulkan bahan; *consider the interview a performance* yaitu seolah-olah tahu banyak, tapi jangan sok tahu; *know why you are talking to a source*; *engage a preliminary discussion*; *listen*: jangan tiba-tiba melakukan interupsi karena tak mendengar; *work to establish an atmosphere or trust*; anggaplah 2 orang yang bekerja sama untuk memberi penjelasan kepada orang ke-3, yakni pembaca; *use a tape recorder*, namun (kadang harus)

permisi agar si sumber merasa enak. Lebih bagus pergunakan catatan; *take it easy, but take it* yakni mulailah dengan pertanyaan enteng, lantas meningkat ke yang berat dan sensitif; *ask and ask again* sampai yakin tak ada yang salah; *use eye contact*, jangan jadi pewawancara kalau tak berani menatap muka; *be humble* yakni ciptakan pengertian bahwa si sumber lebih penting ketimbang Anda; *be emphatic* yakni mengertilah persoalan si sumber, misalnya mewawancarai korban pengusiran atau artis yang sedang berdukacita; *wrap it up*, maksudnya pada akhir wawancara, tanyakan lagi, “Apakah ada yang ingin Anda tambahkan?”, “Apakah masih ada pemikiran yang belum tersampaikan?”

Pertanyaan faktual lebih cocok diajukan kepada pakar atau analis. contoh pertanyaannya “Adakah hal baru? Kapan, di mana, bagaimana, apa manfaatnya, apa yang selanjutnya akan terjadi?” Jangan mengajukan pertanyaan seperti “Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?” atau “Apakah Anda mendukung hal itu?”

Pertanyaan opini seperti “Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Setujukan Anda? Dalam hal apa Anda berbeda pendapat? Mengapa Anda berbeda pendapat? Apa artinya bagi masyarakat?” sebaiknya ditujukan kepada politisi, jurukampa-nye/juru-bicara, pelobi, LSM, kelompok penekan. Kepada mereka ini sebaiknya jangan ajukan pertanyaan seperti “Apa yang akan terjadi? Di mana, kapan? Apa implikasinya? Dst”

Untuk membuat sebuah profil misalnya tentang seorang tokoh masyarakat, artis, olahragawan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan antara lain “Apa saja yang akan menjadi inspirasi Anda? Apa yang Anda senangi? Mengapa? Apa yang membuat Anda merasa berbeda dengan orang lain?”

Untuk konteks wilayah konflik seperti Aceh, seringkali wartawan harus mewawancarai seorang saksi mata. Kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan antara lain “Apakah yang Anda lihat? Apakah yang Anda alami? Di manakah Anda berada ketika peristiwa itu terjadi? Apa hubungan Anda dengan peristiwa atau orang yang ada dalam peristiwa itu?”

Sedangkan pertanyaan yang bisa diajukan ketika mewawancarai seorang korban antara lain: tanyakan tentang *identitas dan pengalamannya*, contoh” Siapa Anda? Mengapa bisa seperti ini? Apa yang Anda alami? Bagaimana keluarga Anda?”; tanyakan mengenai *penilaiannya terhadap kesia-siaan konflik*: pendapat terhadap kehancuran yang ada, inisiatif perdamaian yang dilakukan; *apa yang dikerjakan* meliputi upaya mencukupi kebutuhan hidup, mendidik anak, upaya hukum yang dilakukan, dst; *harapan dan mimpi indah* misalnya mimpi tentang jaman normal, upaya menuju ke sana, apa yang dikerjakan bila hal itu terwujud, dst.

Hal yang harus dihindari ketika mewawancarai korban adalah jangan memancing sumber untuk memberikan propaganda kebencian. Ketika mewawancarai narasumber, antara wartawan dan sumbernya kadangkala terikat pada ketentuan yang sifatnya *off the record, not for attribution*, atau *only for backgrounder* Selain itu wartawan harus bertanggungjawab pada orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan karena keterangan yang mereka berikan pada kita. Jangan pernah merusak kepercayaan itu.

Begitu pula dengan permintaan untuk mengembargo keterangan yang diberikan narasumber yang umumnya berhubungan dengan konsekuensi hukum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis hasil wawancara *pertama* jangan beropini; *kedua* perhatikan akurasi; *ketiga* upayakan cover both sides (tidak berlaku ketika membuat profil narasumber); *keempat* tidak menampakkan stereotip; *kelima* jangan menggunakan kata-kata telanjang, misalnya: “mata tercukul”, “usus terburai”, dsb; *keenam* hindari bias gender; Jangan menyederhanakan masalah; *ketujuh* jangan mengutip pernyataan yang bernada kebencian/propaganda; *kedelapan* jangan mencoba menyimpulkan. Biarkan pembaca yang menyimpulkan tulisan Anda; *kesembilan* kumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, jangan hanya satu atau dua saja, lebih-lebih dari kelompok yang sama; *kesepuluh* gunakan sumber yang benar-benar dapat diandalkan.

Pokok Bahasan 8:

Panduan Meliput di Wilayah Konflik Aceh

Sebelum meliput ke lapangan, seorang jurnalis tentu harus memiliki sejumlah persiapan. Baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Yang bersifat teknis misalnya menyangkut penyiapan peralatan liputan seperti tape recorder, pensil, block note, film, baterai dsb.

Sedangkan yang bersifat non teknis adalah pengetahuan tentang kultur masyarakat di mana jurnalis hendak melakukan liputan. Pengetahuan tentang kultur masyarakat sangat penting, apalagi jika jurnalis yang hendak melakukan liputan bukan merupakan bagian dari komunitas etnis yang hendak diliputnya.

Para wartawan AS ketika meliput Perang Teluk 1990, mereka dibekali panduan tentang adat istiadat masyarakat Arab Saudi agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merumbulkan kesalahpahaman dengan masyarakat setempat. Penduduk di Semenanjung Arab mempunyai larangan-larangan tertentu yang tidak dapat diukur atau disamaratakan dengan kebiasaan di berbagai negara, terutama dengan negara barat.

"Jika anda seorang pria, jangan menunjukkan rasa tertarik terhadap wanita atau salah seorang wanita yang menjadi anggota keluarga Arab. Jangan memotret mereka atau memulai mengajak berbicara..... Jangan memuji barang milik orang Arab secara terbuka, karena menurut adat Arab kuno, si pemilik sebaiknya memberikannya secara langsung atau di kemudian hari." (Hendro Subroto, 1998)

Pokok bahasan ini akan lebih banyak menggali pengalaman praktis yang dialami jurnalis ketika meliput konflik di Aceh. Dengan harapan akan terbangun sebuah kiat yang dapat ditimbang secara kasus per kasus.

TUJUAN

- Jurnalis mengetahui konsep adaptasi dengan lingkungan sosial budaya masyarakat Aceh
- Jurnalis mengetahui langkah-langkah pengamanan diri ketika meliput di Aceh

POKOK BAHASAN

METODE

- Pemutaran Film Kekerasan Terhadap Jurnalis
- Diskusi

WAKTU

- 120 menit

PERALATAN

- LCD
- Laptop
- Transparansi data kekerasan terhadap Jurnalis
- VCD Film Kekerasan terhadap Jurnalis yang terjadi Indonesia

PROSES

- Penjelasan singkat tujuan dan pokok bahasan.
- Sebagai pengantar peserta diajak untuk menonton film “Kekerasan Terhadap Jurnalis”, setelah itu lanjutkan dengan sesi ceramah, di mana narasumber diminta untuk menceritakan pengalamannya ketika meliput konflik (di Aceh), hambatan-hambatan yang dihadapi ketika meliput, serta kiat-kiat untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu juga hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum meliput, hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang mesti dilakukan ketika jurnalis hendak meliput di wilayah konflik (Aceh).
- Setelah sesi ceramah, peserta juga diminta untuk menceritakan pengalaman meliput mereka masing-masing. Dengan demikian diperoleh gambaran tentang perbedaan atau persamaan mengenai hal-hal yang dilakukan ketika meliput di masing-masing wilayah liputan, mengingat para peserta berasal dari daerah liputan yang berbeda-beda.

Meliput Konflik Aceh: Pra Liputan, Observasi dan Pasca Pemberitaan

Oleh: Murizal Hamzah dan Ferdi N Sijabat

Murizal Hamzah, Pemimpin Redaksi Tabloid Media KUTARAJA
dan Ferdi N Sijabat, Ketua Dewan Pengurus Aceh Press Club

Sebuah diskusi ringan digelar di Banda Aceh pada akhir Mei 2002. Dalam pelatihan jurnalistik yang digelar oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta dan Aceh Press Club (APC) Banda Aceh, instruktur memaparkan kisah gemilang Kevin Carter yang memperoleh hadiah bergengsi Pulitzer pada tahun 1994.

Fotografer freelancer itu mengabadikan seekor burung pemakai bangka yang menanti seorang gadis yang sekarat di samudera gurun pasir Afrika menuju ke kamp distribusi makanan. Fotografer itu membiarkan maut menjemputnya. Dan memang, hasil bidikan foto itu sangat mengesankan. Kalangan pewarta foto menyebutkan foto yang berbicara. Cukup menggugat dan menggugah pembaca merogoh isi kantong. Tak salah, juri memutuskan Kevin berhak memboyong hadiah kategori jurnalis internasional.

Kemudian, instruktur itu mengajukan pertanyaan, jika Anda sebagai Kevin, apakah menyelamatkan gadis atau membiarkannya sambil menunggu momen yang terbaik untuk mengarahkan kamera? Bukankah peluang hanya datang sekali?

Ada peserta yang mencetuskan, selamatkan gadis itu dari kematian tragis. Pasalnya ini menyangkut sisi-sisi kemanusiaan. Peserta lain menandakan, tugas fotografer memotret. Alibinya, dengan foto duka itu, dana bisa mengalir sepanjang foto itu melayang. Anggap saja, perawan itu sebagai umpan untuk mengimpor bala bantuan dana. Suatu hal yang logis. Bukankah selembat foto bisa berbicara jutaan kata dan diharapkan bisa memasok miliaran dolar ke sana?

Bagaimana akhir diskusi hangat itu? Instruktur itu melanjutkan dialektikanya, beberapa bulan kemudian Kevin bunuh diri. Kawan-kawannya berspekulasi, fotografer itu tak tahan menerima kritik fotonya yang kontroversial. Dia tak sanggup menerima beban konsekuensi seumur hidup karena gadis itu wafat di pelupuk matanya. Sebagian lain melansirkan, kondisi kerja di Afrika yang panas membuat fotografer itu depresi dan akhirnya bunuh diri.

Nurani Jurnalis

Kisah pilu di atas agaknya menjadi renungan bagi siapa saja jurnalis yang meliput di daerah konflik bersenjata seperti Aceh. Idiom klasik, kekuatan ujung pena jurnalis sanggup membunuh atau membangkitkan sebuah kota bahkan negara bisa luluh-lantak dengan mempelintir ucapan narasumber. Panglima Perang Perancis Napoleon Bonaparte berkomentar lebih takut kepada wartawan daripada 100 divisi tentara. Ujung pena lebih tajam daripada ujung bayonet. Namun hal ini dipatahkan oleh Ali Said saat menjabat Jaksa Agung. Dia menyindir wartawan, dirinya lebih takut kepada tentara daripada 100 wartawan. Pasalnya, 100 wartawan bisa disumpal dengan 100 amplop.

Carolyn Oppenheim, jurnalis senior di Amerika Serikat dalam pelatihan pelaporan investigasi kepada jurnalis dari Aceh, Pontianak dan Ambon pada akhir Nopember 2001 di Boston Amerika Serikat menandakan, tidak ada artinya investigasi atau pelaporan bila berimplikasi warga sipil yang diteliti atau diwawancarai menjadi

menderita atau malahan terancam keselamatan hidup. Jurnalis telah membunuh orang lain dengan meminjam tangan orang lain.

Tak terbantah lagi, bergelut ke Nanggroe Aceh Darussalam yang masih huru hara kontak senjata militer Indonesia vs militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM), salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh jurnalis dengan menerapkan jurnalisme hati nurani. Kami tidak menyebutkan jurnalisme damai. Pihak RI-GAM mempunyai persepsi damai yang berbeda. Pemerintah Indonesia menganggap damai di Aceh terwujud bila masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya GAM menganggap Aceh sudah damai jika sudah mandiri atau lepas dari NKRI.

Maka kami cenderung menyebutkan jurnalisme hati nurani yang secara harfiah lebih menomorsatukan sisi kemanusiaan. Slogan, tak semua yang benar harus dipublikasikan kalau berimplikasi pada penderitaan warga sipil tak bersenjata. Kita yakin dan percaya, nurani dan kemanusiaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertikai di daerah Serambi Mekkah ini masih bersemi dan itu harus selalu diketuk. Hati nurani jurnalis adalah sensor yang paling akurat dalam memberitakan konflik serta komitmen untuk menghentikan konflik.

Meliput di Aceh

Jurnalis yang tinggal dan meliput di Aceh mempunyai pengalaman berbeda dengan jurnalis yang tinggal di luar Aceh. Mereka ke daerah paling ujung dari Sumatera ini untuk beberapa hari, lalu berkulat kembali di balik bilik redaksi baik yang di Jakarta atau luar negeri. Pengakuan Ati Nurbaiti, wartawan senior koran berbahasa Inggris *The Jakarta Post* pada Jurnal Pantau edisi Agustus 2002, dirinya sangat berkesan meliput di Aceh dan Timor Timur. Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu melontarkan, ia merasakan bagaimana wartawan yang bertugas di wilayah konflik tersebut menjadi serba salah.

Secara psikologis jurnalis yang tinggal di Aceh setiap hari mendengar, melihat bahkan mengalami kekerasan bersenjata. Dikhawatirkan mempengaruhi penulisan laporan. Saban hari, paling kurang ditemukan dua mayat manusia. Karena itu, berangkat dari sudut pandang ini, patut diulas lagi angka-angka kekerasan. Melalui dokumentasi itu diharapkan penderitaan tidak dilupakan. Syukur kekerasan bisa dikurangi. Berita konflik yang disajikan terus menerus dikhawatirkan membuat masyarakat terbiasa konflik dan tidak berupaya memulihkan keadaan menjadi damai.

Sebuah pernyataan yang mengagetkan pada sebuah jurnal media, patut diduga jurnalis lokal seperti di Aceh dan Papua semangat nasionalisme Indonesia tidak seteguh jurnalis di belahan persada nusantara. Tentu saja, klaim ini masih bisa dipertanyakan ulang.

Secara sunatullah, hidup selalu berkonflik. Jangan takut berkonflik. Konflik harus dipelihara dalam arti positif. Konflik ada di alam dan hadir dalam kehidupan manusia. Titik dasar konflik menghadirkan dua pihak atau lebih mengenai nilai atau anggapan yang dianggap tinggi seperti keadilan. Konflik melibatkan status, kekuasaan, sumber daya yang langka. Lazimnya akar konflik lebih cenderung multi argumen ketimbang satu argumen. Konflik ibarat oase yang tak pernah kering di padang pasir. Antagonisme dan konflik adalah komponen penting dalam proses produksi. Daya pikat konflik terhadap ranah psikologis khalayak pembaca sangat besar. Tak pelak, konflik selalu ditempatkan sebagai nilai berita yang penting. Kasus Aceh adalah suatu wacana yang sarat dengan konflik, sensasi dan kontradiksi

Adalah sangat menantang mengendus berita di zona konflik. Namun itu tidak ada artinya kalau nyawa jurnalis yang balik diburu oleh pihak-pihak yang bertikai. Hidup lebih berarti daripada apapun. Tak ada gunanya sebuah tulisan, artikel atau foto yang bagus kalau nyawa meregang dari jasad. Data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan APC, sejak Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dicabut pada 8 Agustus 1998 hingga September 2002, tercatat 36 jurnalis menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik. Angka ini bisa melonjak. Pasalnya tidak semua korban mencatat pengalamannya, baik yang dilakukan oleh TNI, Polri dan GAM. Berdasarkan data (terlampir tabel) tiga jurnalis tewas selama konflik. Ini masih perlu diverifikasi, apakah berkaitan dengan tugas profesi atau faktor lainnya.

Kekerasan terhadap jurnalis juga menimpa jurnalis kaliber internasional seperti dalam perang Afghanistan pada Nopember 2001. Selain korban sipil, paling sedikit lima jurnalis meninggal dunia atau hilang. Seorang diantaranya kameraman Reuters yang pada Agustus 2000 menjelajah Aceh. Walaupun Aceh, Sambas, Poso, Ambon dikategorikan daerah konflik, namun menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), Indonesia belum termasuk sembilan negara yang kondisi terparah untuk independen jurnalis. Adapun negara yang terparah untuk menjalankan tugas jurnalis secara bebas yaitu Colombia, Afghanistan, Eritrea, Belarus, Burma, Zimbabwe, Iran, Kyrgyzstan dan Cuba.

Lin Neuman, konsultan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) memberikan contoh keamanan jurnalis yang meliput konflik Timor-Timur menyebutkan apa yang dialami jurnalis di sana lebih buruk dibanding dengan kancah perang di belahan bumi lainnya seperti di Lebanon atau Kososvo. Kemerdekaan pers tidak berarti apa-apa jika jurnalis mendapat ancaman fisik dalam menjalankan tugas profesi.

Berdasarkan pengalaman meliput ke daerah, baik bertemu elit militer Indonesia, GAM atau tokoh sipil Aceh, secara garis besar melalui tiga tahapan. Pertama, sebelum ke lapangan (pra liputan). Kedua, observasi. Dan, ketiga pasca pemberitaan. Hal ini juga dialami oleh tipe jurnalis seluler yakni info diperoleh melalui jaringan telepon dengan menekan keyboard HP atau telepon. Walaupun tipe jurnalis ini tidak ke lapangan, risiko tetap mengelantungan setelah pemberitaan.

A. Pra Liputan

1. Psikologi

Meliput kerusuhan massal antar etnik, pertempuran, investigasi ekonomi atau politik selalu sangat menantang dan menarik. Tak pelak, modal utama sebelum menyusup ke ladang kerusuhan yakni kesiapan mental. Jika ragu atau insting bimbang, tidak aman di lapangan atau faktor larangan dari keluarga, batalkan saja. Sebab, perasaan tidak percaya diri berimplikasi tidak nyaman dalam meliput. Jika mendesak, cukup teman dekat saja yang diselipkan kabar bahwa Anda hendak bertemu Komandan TNI di Aceh Utara atau Panglima GAM Wilayah di Aceh Timur.

Dari ruang redaksi, jurnalis sudah mafhum kode etik. Akan tetapi, tiori dengan praktek bisa berputar 180derajat. Tak sedikit jurnalis larut dalam konflik dan menjadi dinamis kerusuhan. Larry Hollingworth dari UNHCR melansir kekesalannya kepada jurnalis dan tentara dalam perang Bosnia. Pada mulanya, mereka datang dengan pikiran terbuka dan tekad tidak memihak kepada pihak yang berperang. Namun seiring dengan berkembangnya konflik, hampir setiap jurnalis memihak orang Muslim dan hampir setiap tentara memihak Serbia. Mungkin pentas pertempuran yang berdarah-darah menyebabkan emosional bergejolak. Artinya, secara psikologi perasaan manusia juga bertindak.

Sentimen-sentimen itu merupakan suatu yang inheren dalam diri jurnalis. Dalam konteks ini, berprasangka negatif (hetero-stereotif) terhadap kubu yang berbeda agama atau suku dan berprasangka positif (oto-stereotif) terhadap kubu yang seagama, seringkali bukan sebuah kesengajaan. Prasangka-prasangka itu begitu saja terjadi dan baru terlihat ketika orang lain membaca laporan-laporan yang diulas oleh jurnalis.

Mengantisipasi hambatan ini, menulislah ketika gejolak emosi terkendali. Menulis ketika emosi meledak-ledak sejalan dengan memasukan arang ke tungku. Panaslah yang diperoleh. Karena itu, lebih baik setelah menulis, ajak rekan kerja memberi respons, saran agar investigasi itu menjadi bernas.

Data atau info bakal mengalir dari narasumber bila teringat kepada jurnalis. Adalah salah satu upaya jurnalis untuk selalu mengusung gambaran wajah atau nama jurnalis kepada sumber berita. Antara lain membangun jalinan rantai komunikasi dengan narasumber. Ada yang piawai mengirimkan kartu ucapan selamat promosi, ulang tahun, joke sehat. Ternyata di wilayah konflik, humor-humor sangat digemari oleh elit militer atau elit sipil. Ini bisa mengendurkan urat syaraf yang tegang.

Jalinlah rantai komunikasi dengan narasumber di daerah kerusuhan. Misalnya meliput profil Panglima AGAM, temukan kontak person yang bisa menyampaikan misi atau menghubungi jurnalis sebelumnya yang sukses mewawancaranya. Sebagian jurnalis yang punya akses langsung ke elit TNI, Polri terkadang dalam canda berbisik, "Pak, ada pesan untuk Panglima GAM?" Biasanya dibalas dengan canda juga. Dampak yang diharapkan oleh jurnalis melalui pola pendekatan seperti ini adalah mengikis kesan atau pembentukan imej jurnalis partisan.

David S Broder, wartawan senior di Amerika Serikat dalam bukunya "Berita di Balik Berita", mengulas terlalu dekat dengan narasumber sama saja berkolusi dengan iblis. Pada bagian lain Broder menerangkan, bukan berarti tidak boleh dekat. Dekat dengan terlalu dekat sangat jauh perbedaannya. Jadi akrab dengan narasumber itu sah-sah saja. Yang penting, tidak terkotaminasi dengan pemikiran pihak yang bertikai. Jurnalis yang piawai berkeyakinan, semua orang harus dikawani walaupun profesinya melanggar asusila masyarakat. Bahasa singkatnya, jurnalis hanya punya kawan. Tidak ada lawan. Tidak etis membangun tembok jarak dengan siapa pun.

Menjaga kepercayaan dengan narasumber adalah suatu hal yang mutlak. Misalnya, jika dia memberikan nomor telepon pribadi dan bersifat rahasia, sewajarnya jika ada yang meminta nomor tersebut beritahukan dia, apakah boleh diberikan kepada jurnalis lain. Sebab boleh jadi nomor telepon atau berkas dari narasumber hanya untuk seorang jurnalis, namun kemudian dia menerima dering telepon dari berbagai jurnalis. Bisa saja narasumber itu mencabut kepercayaan. Termasuk juga hasil wawancara, narasumber menyatakan A, jurnalis menulis B.

2. Riset Data

Speak with data. Bertemu dengan Panglima Komando Resort Militer Daerah (Pangdam) Iskandar Muda akan terasa lebih akrab bila sebelumnya jurnalis sudah meriset biodatanya, hasil wawancara dengan media sebelumnya termasuk hal-hal kecil yang bisa direkonstruksi kembali kepadanya. Tentu mereka akan lebih respons dan hati-hati menjawab pertanyaan jurnalis yang mampu mengungkit hal-hal yang bagi jurnalis lain itu belum diketahui. Ini lebih memudahkan menginterview dan lebih mengakrabkan.

Dengan era internet, sangat gampang mereguk data-data yang dilacak melalui dunia maya. Badan-badan pemantau kemanusiaan atau militer dengan siaga menyodorkan data. Jadi, hanya dibutuhkan sedikit kerja ekstra membaca ulang laporan-laporan, apakah itu fakta atau fiksi, investigasi yang membuktikannya. Dokumen atau data ibarat batu bata untuk membangun dinding. Wawancara adalah adukan semen yang merekatkan batu bata dan menjaga dinding tetap utuh. Jika tidak ada batu bata, tidak ada kisah, tidak ada yang dapat direkatkan oleh semen.

Informasi daerah tujuan yang diliput menyangkut antropologi, sosiologi atau budaya daerah seperti hal-hal yang tabu. Tak salah jurnalis berupaya akrab dengan warga setempat. Seorang jurnalis dari Jepang malahan membagi-bagi permen kepada anak-anak desa yang dikunjungi di Pidie dan Aceh Timur serta menghendahkan pulpen atau stiker kepada narasumber.

Di sisi lain, narasumber diharapkan mempercayai jurnalis adalah kawan yang dapat menjadi wadah curhat. Rangkaian manis ini terwujud jika jurnalis sudah memegang kantong-kantong info sebelumnya. Kerap kali terjadi, jurnalis ke lapangan dengan meraba-raba bahkan belum mempunyai angle. Pada dimensi lain, bukan hal yang fatal mengubah target penulisan setelah memonitor di lapangan. Segala sesuatu bisa berubah.

Situasi konflik Aceh bergerak cepat. Seorang periset dari Jakarta mengakui kondisi Aceh berganti begitu cepat seperti perubahan peta kekuatan sipil dan arah kebijakan.

Akan lebih energik, bila jurnalis menyusun *Term of Reference* (TOR) dengan mengupas berbagai angle. Dengan ragam tema yang bakal ditulis sebagai antisipasi bila target utama gagal, ada target kedua dan selanjutnya. Misalnya menyibak pihak-pihak yang tidak terlibat konflik langsung namun menikmati eksisnya. Lazimnya mereka terdiri dari orang

lanjut usia, kaum perempuan dan anak-anak. Suara mereka atau penderitaan mereka lebih menyentuh sisi-sisi kemanusiaan daripada menyodor propaganda perang mulut kelompok yang bertikai. Tak dapat dibantah lagi, juru bicara bergema untuk kepentingan kubunya dengan membenarkan aksi kelompoknya, menunding gerombolan lain yang salah.

Konflik pada dasarnya adalah pertentangan kepentingan. Tanpa melihat siapa yang berkepentingan sulit menganalisis konflik yang memadai. Menelusuri pihak-pihak yang tidak berkonflik, namun menikmati keuntungan konflik juga menarik. Lazimnya, turunan konflik itu berakses di bidang pendidikan yang ambruk, koruptor merajalela, sosial budaya hancur, patologi sosial dan trauma yang berkepanjangan. Sisi-sisi human interest yang terabaikan ini menawan disajikan karena mempunyai magnet empatik dan simpatik pembaca, pendengar atau penonton. Bukankah dedikasi dan loyalitas tertinggi seorang jurnalis ditujukan kepada masyarakat.

Perlu mengidentifikasi kepentingan-kepentingan kelompok besar. Check list sebelum meliputi daerah konflik? Siapa yang terlibat? Tujuan berkonflik termasuk kepentingan-kepentingan pihak di luar arena konflik? Mengapa berkonflik? Dampak struktur dan budaya? Gagasan pencerahan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang bertikai? Siapa saja yang bekerja untuk menghindari kekerasan? Siapa yang mengajukan ide rekonstruksi, rekonsiliasi, resolusi? Siapa yang menanggung konflik?

Segudang pertanyaan di atas bisa sebagian terjawab melalui riset data atau pustaka yang masih langka dilakukan oleh jurnalis di wilayah konflik. Melalui riset, diperoleh tokoh-tokoh sipil atau pemuka NGO yang bisa diajukan alternatif solusinya serta latar belakang pemikirannya. Artinya, sebelum mewawancarai tokoh, jurnalis sudah mengetahui pemetaan alur pikirnya.

Pengalaman mewawancarai Panglima AGAM Teungku Abdullah Syafi'ie pada Januari 2001 di puncak sebuah gunung di Pidie. Sebelumnya, dia dinyatakan sekarat oleh juru bicara TNI. Setelah mendaki, menuruni lembah serta menyemberangi sungai, kami tiba di lokasi menjelang sore sekitar pukul 16.30 wib. Perjalanan jauh ini menguras keringat dan ide-ide untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut tidak berkembang sempurna.

Pertanyaan yang meluncur seputar yang tercantum dalam TOR. Ini dimungkinkan, kami sudah terlalu lelah dan ingin cepat-cepat kembali ke kaki desa. Malam segera menyongsong bila terlambat angkat kaki dari lokasi pertemuan. Di sisi lain, kami terpaksa menyaksikan orang yang dikabarkan tertembak ternyata masih melempar senyum. Ini patut digarisbawahi pada tokoh-tokoh kharisma, jurnalis bisa kehilangan ide mengembangkan pertanyaan. Yang terpikir ketika itu, setelah memastikan narasumber masih hidup, kami mau segera melaporkan ke redaksi. Kami hanya memotret tidak lebih sepuluh kali. Padahal foto-foto lebih shahih dari sejuta tulisan. Karena itu, pentingnya TOR dan merekam setiap kegiatan atau pandangan yang di sekeliling lokasi. Adakalanya, seluk beluk menjumpai narasumber lebih diminati pembaca atau penonton daripada hasil wawancara.

Jangan terlalu percaya pada sumber-sumber resmi. Jurnalis harus mendekatkan pada sumber primer sedekat mungkin. David Protess dari Northwestern University Amerika Serikat memakai tiga lingkaran konsentris. Lingkaran paling luar berisi data sekunder terutama potongan berita media lain. Lingkaran yang lebih kecil adalah dokumen-dokumen misalnya laporan pengadilan, polisi, keuangan dan sebagainya.

Lingkaran terdalam adalah saksi mata. Jurnalis harus memiliki rasa ragu dan curiga terhadap segala hal. Profesor William Ketter, Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Boston Amerika Serikat bersabda seorang jurnalis harus mengembangkan sikap skeptis terhadap semua informasi awal yang dikumpulkan. Bahasa kasarnya, walaupun ibu Anda menyatakan "I love you", jangan langsung percaya, buktikan bahwa benar dia mencintai Anda. Dengan cara ini, mantan jurnalis Boston Global, harian tertua di Amerika Serikat jurnalis bisa mengumpulkan sesuatu yang mendekati kebenaran. Jurnalis dilatih mengajukan pertanyaan yang menyelidiki dan seringkali sulit. Jim Macnamara, pakar komunikasi media internasional menyebutkan tiga unsur vital dari seluruh wawancara media yaitu kejujuran, ketulusan dan keharuan (empati).

3. Dokumen dan Peralatan

Tanda pengenalan atau izin meliput, khusus bagi jurnalis asing dengan visa turis atau visa jurnalis. Akan lebih afdhal, jurnalis yang memiliki kartu meliput di markas besar militer Indonesia. Ini azimat menghadapi pemeriksaan TNI atau Polri. Bagaimana mengelak pemeriksaan GAM? Perhatikan kartu pers yang diterbitkan oleh redaksi. Pada umumnya militer GAM tidak mempersoalkan asal usul media dengan catatan ada garansi dari pemandu atau jurnalis lokal.

Jangan menduga peralatan kerja seperti tape, kamera, baterai siap dioperasikan. Periksa dan cek ulang infrastruktur dan pastikan siap di-on-kan. Jangan terlalu pelit membawa satu kaset kamera atau tape kosong, negatif film bahkan satu kamera sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk lebih aman, upayakan, satu narasumber satu kaset. Ini berkaitan dengan pengamanan hasil liputan. Andaikata dirampas oleh pihak yang tidak mengharapkan publikasi, maka ada peluang menyelamatkan dokumen lain. Pepatah klasik mengingatkan kita, jangan menaruh telur pada satu keranjang.

Seorang fotografer foto yang meliput aksi demo di Banda Aceh terpaksa menghentikan bidikannya. Pasalnya, kamera digitalnya kehabisan arus baterai. Momen foto bisa berlalu sekelebat jika tidak ada baterai cadangan. Yang tak kalah penting juga peralatan obat-obatan ringan, snack dan sebagainya. Jurnalis sebagai manusia tetap perlu menjaga kesehatan yang prima.

B. Observasi

1. On the way

Berangkat ke daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Lebih nyaman turun ketika pagi. Demikian juga, lebih menarik mewawancarai narasumber sebelum siang. Pikiran masih segar dan belum lelah dengan aneka pekerjaan. Ke lapangan ketika pagi untuk mencegah hal-hal di luar perkiraan. Menempuh perjalanan pada malam, risikan menerima risiko dan wajar saja dihindari. Jangan mencoba menantang risiko bila ada peluang meminimalkannya. Daerah konflik bukanlah hal yang tepat untuk ladang uji coba. Jangan pertaruhkan seutas nyawa untuk hal-hal yang bukan pada tempatnya.

Gunakan transportasi yang menghilangkan kecurigaan militer Indonesia atau militer GAM seperti berkaca hitam, gelap atau jenis kendaraan tertentu yang sering digunakan oleh mereka. Lebih baik, kaca kendaraan putih atau tembus pandang. Ini menguntungkan jurnalis untuk membidik kamera dari dalam. Dalam perjalanan, rajin-rajinlah menginformasikan posisi terakhir dengan mengirim sms, telepon ke redaksi atau kawan. Dengan demikian, mereka bisa memonitor posisi terakhir Anda bila dinyatakan hilang dalam perjalanan.

Bila gemar memakai pakaian yang berbau militer dengan loreng hijau, simpan dulu. Busana terang atau atribut yang bertuliskan PRESS lebih mengamankan jurnalis. Jangan beri kesempatan militer Indonesia dan GAM untuk menduga-duga kendaraan jurnalis yang melintasi di depannya adalah musuh. Ada waktunya, jurnalis harus memperlihatkan jati dirinya dan lain waktu harus merahasiakan identitasnya. Untuk ini, naluri jurnalis juga di lapangan yang bakal teruji. Tak ada rumusan baku untuk hal itu. Meliput di daerah konflik dibutuhkan seni. Karena seni, kreatifitas dan daya tahan jurnalis juga yang berbicara. Dihalalkan jurnalis menyamar dengan catatan kalau hal tindakan demikian tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya (di medan perang, wilayah konflik) dan berita yang diburu demi kepentingan orang banyak. Bukan skandal pribadi.

Biasakan membuat janji dengan narasumber yang hendak diwawancarai. Dengan demikian, tidak perlu terlalu lama menunggu atau kecewa. Bertemu militer Indonesia lebih gampang karena alamat jelas dan tidak berpindah-pindah. Sebaliknya, bertandang ke militer GAM dibutuhkan kesabaran. Mereka tidak mempunyai markas walaupun jurnalis menulis Panglima GAM dijumpai di markasnya. Sistem gerilya GAM menyebabkan mobilitas terjadi setiap detik.

Ada beberapa kondisi medan liputan di Aceh menegangkan ketika terjadi pertempuran TNI, Polri dengan GAM. Bahasa jurnalis Aceh, "kontak senjata". Masyarakat Aceh sudah memaklumi dan dipahami oleh jurnalis, siapa pun yang melintas atau terjebak di lokasi insiden berpotensi menjadi sasaran tembak atau kemarahan pihak yang bertikai. Lembu saja yang tidak terlibat konflik bisa menjadi target empuk peluru. Terlepas dari bagaimana konstruk psikologis prajurit TNI, Polri maupun GAM di lapangan, kondisi seperti ini sangat riskan. Alternatif bagi jurnalis adalah segera mengambil jarak dari lokasi. Pada dasarnya, liputan tetaplah harus dimulai dengan sebuah pandangan magnituditas berita. Tahapan selanjutnya, mengikuti pola-pola yang berlaku di lapangan. Benar setiap orang sangat tertarik untuk dipublikasikan. Dalam realitas konflik wujudnya malah agak lebih kental lagi, ia semakin diandalkan sebagai perang opini.

Pasca kontak senjata merupakan saat genting. Tidak ada lalu lalang kendaraan dari arah berlawanan untuk beberapa jam. Yang hilik mudik reo militer Indonesia. Mengupayakan sebuah liputan dalam kondisi ini memang masih memungkinkan. Psikologi militer Indonesia sangat tergantung pada kesatuan yang disandangnya. Pada umumnya kesatuan organik (prajurit lokal) lebih akomodatif. Mereka memahami situasi daerah. Pengalaman meliput ke Keudee Bieng Kecamatan Lhok Nga Aceh Besar.

Informasi dari anggota Yonif 112/Darma Jaya Komando Militer Daerah Iskandar Muda, GAM menyerang konvoi truk TNI. Beberapa prajurit TNI bersiaga di jalan Keudee Bieng. Memberi salam atau sekedar mengangkat tangan kepada mereka adalah sebuah adab yang tak boleh diabaikan.

Secara tidak langsung memberi identifikasi psikologis bahwa jurnalis bukan berada pada posisi lawan, walaupun sesungguhnya juga belum tentu punya interest pertemanan. Situasi sangat menegangkan. Bersikap biasa-biasa saja tanpa gerak tubuh yang berlebihan juga sangat penting untuk mengontrol psikologi jurnalis, sehingga dalam hal ini mampu menghilangkan ketakutan-ketakutan.

2. Lokasi

Basa-basi adalah sebuah gaya interaksi yang universal. Maknanya, ia dimiliki oleh siapa pun tak terkecuali militer Indonesia atau militer GAM. Ini menjadi titik awal melakukan penjajakan psikologis. Menanyakan peristiwa penyerangan, apa yang dilakukan saat serangan dan sebagainya. Seolah-olah jurnalis memposisikan diri sebagai kawan narasumber. Sikap bermusuhan atau antipati hanya merugikan sendiri.

Basa basi seperti ini membuktikan bahwa kita mendapat respon luar biasa dari mereka. Sehingga meskipun dalam kondisi psikologis yang tidak menguntungkan, minimal TNI, Polri dan GAM tidak bersikap resisten dan apalagi reaktif terhadap jurnalis. Kontak person paling efektif untuk memenangkan psikologi massa tentara adalah komandan. Dengan pola organisasi hirarki struktural, maka penerimaan komandan bermakna pada prajurit. Ini menggambarkan adanya logika hirarki yang bermain.

Pendekatan ini juga menjadi sangat relevan untuk membangun kondisi yang lebih akrab. Tidak bisa dipungkiri prajurit yang masih membung perasaan yang belum terbalaskan (need to revenge). Tak jarang keberadaan jurnalis di tengah-tengah mereka memunculkan sikap apriori dan kecurigaan. Mereka setidaknya akan mengajukan pertanyaan atau meminta identitas pers sampai KTP.

Berkomunikasi langsung dengan militer Indonesia ketika ke lokasi bukanlah cara yang tepat. Dengan melaporkan rencana liputan pada TNI, Polri secara tidak langsung tidak memperhatikan eksklusifitas narasumber AGAM atas dasar kerahasiaan yang mereka persyaratkan. Dampak lainnya langsung mengarah ke rencana liputan. Pertama, selain berakibat fatal karena akan ada lanjutan aksi spionase juga keselamatan jurnalis terancam bahkan tidak tertutup kemungkinan narasumber membatalkan agenda wawancara.

Dalam kasus peliputan pelepasan teknisi TVRI Stasiun Banda Aceh di Alue Nireh Peureulak Aceh Timur, sekitar 400 km arah timur laut Banda Aceh pada Oktober 2001, rombongan jurnalis sebelum ke lokasi bermalam di sebuah hotel di Langsa. Esoknya menjelang

ke lokasi, lima aparat yang dengan mudah diidentifikasi intel berputar-putar di penginapan. Dengan sedikit berkelit, akhirnya jurnalis bisa lolos dari intaian mereka.

Kontak langsung dengan sumber merupakan hal yang perlu diperhitungkan, biasanya sumber bakal memberi petunjuk lokasi, ciri-ciri penghubung dan jam pertemuan. Meliput secara beramai-ramai memang lebih aman ketimbang sendiri. Namun pahitnya, laporan itu tidak lagi eksklusif. Solusinya, berkolaborasi dengan media yang berbeda segmen. Mengajak jurnalis yang sejenis media, bisa lenyap eksklusif kecuali disepakati tanggal pemuatan yang sama.

Masyarakat di daerah konflik memiliki resistensi tinggi dan amat sensitif terhadap orang lain dari luar lingkungannya termasuk jurnalis. Malah, seringkali masyarakat merasa sukar memberi keterangan maupun kesaksiannya. Pasalnya, mereka memperhitungkan akibatnya. Sejumlah warga Cubo Lueng Putu Pidie yang menerima perlakuan kasar TNI pasca Panglima AGAM Teungku Abdullah Syafi'ie pada Januari 2002 tewas, seorang bapak menolak keras nama anaknya ditulis sebagai korban kekerasan.

Memang tidak elok mengeneralisasikan semua masyarakat seperti itu, namun realitas di lapangan demikian. Starting poin berhadapan dengan masyarakat adalah menghargai mereka dengan memberi salam dan etika lainnya. Dengan demikian, mereka sudah bisa didekati dan ini titik awal mendekat lebih lanjut.

Pastikan ketika mewawancarai narasumber atau korban tidak ada pihak lain yang mendampinginya. Lazimnya, jurnalis yang mengikuti rombongan militer Indonesia atau GAM, korban riskan berbicara sebebas-bebasnya. Pasalnya, di sebelah kiri dan kanan berdiri gagah militer Indonesia atau GAM yang menyimak ulasan korban.

Ajak korban ke tempat yang lebih steril atau tidak mengikuti rombongan. Bagaimana korban bisa menguraikan mendetil atau lebih jujur kalau terus diintai. Kalau ini kurang diwaspadai, jurnalis bisa tertipu oleh diri sendiri. Memang benar, jurnalis sudah ke lapangan tetapi kurang menghiraukan kenyamanan narasumber menyuarkan hati nuraninya secara bebas. Jika korban menuturkan sejujurnya, apakah ada jaminan korban tidak menderita untuk kedua kali setelah jurnalis meninggalkan lokasi.

Perhatikan jeli kontak mata atau bahasa tubuh, apakah korban membeberkan fakta atau fiksi? Selama di lapangan, kumpulkan sumber sebanyak. Tidak hanya ada satu atau dua saja apalagi dari kelompok yang sama. Carilah sumber yang dapat diandalkan (mewakili kelompok-kelompok yang bertikai). Selain menyodorkan tape rekaman, tak salah juga mencatat secara garis besar. Jika narasumber gugup karena sodoran tape rekaman, maka simpan kembali tape dan mulailah mencatat point-point saja seolah-olah sedang berbicara lepas saja.

Jaga posisi dan emosi. Selain harus berada dalam posisi yang dianggap paling aman, jurnalis juga harus memilih posisi netral di antara pihak yang berkonflik. Menjadi media yang netral tidaklah mudah. Namun hal itu harus dilakukan. Jangan larut dalam emosi ketika konflik sehingga membuyarkan sikap independen. Seorang reporter televisi ikut menetes air mata ketika mewawancarai seorang ibu yang tiga putranya tewas ditembak semalam. Praktis, wawancara itu terhenti. Alasannya, jurnalis itu tidak sanggup menahan perasaan terharu. Kisah ini terjadi di Peurelak Aceh Timur tahun 2002.

Etika Memfoto

Etika memotret atau merekam foto di lokasi GAM yakni menghindari rekaman narasumber yang berlatar belakang ada papan nama atau tulisan yang menjadi alibi militer Indonesia mengeledah ke sana. Demikian juga, memotret anggota militer Indonesia dan GAM, pinta izinlah kepadanya. Etika ini mutlak dilakukan di daerah konflik dengan alasan untuk media. Yang tidak ingin difoto seperti warga sipil atau militer GAM dipisahkan. Namun pada dimensi lain, bidik foto atau kamera secara rahasia. Jurus ini dilakukan bila berada pada kawasan yang lazim dilarang memotret seperti kompleks militer. Jika ketahuan, beralih belum mengetahui dan secepatnya minta maaf. Yang penting, foto tersebut sudah terekam di kamera.

Ada kisah penghubung GAM menyatakan kecewa dengan seorang fotografer. Foto yang dimuat di majalah terbitan Jakarta dengan teks foto, "Panglima GAM Teungku Abdullah

Syafi'ie dengan kader-kader GAM," di sana terpampang dia dan beberapa bocah. Artinya, foto itu membangun citra penghubung itu adalah GAM serta anak-anak usia sekolah itu adalah binaan GAM. Kalau kita sepakat, fotografer itu secara moral telah melanggar komitmen. Padahal, janji adalah mutlak dibutuhkan oleh seorang jurnalis untuk menuju akuntabilitas dan kredibilitasnya. Tidak ada gunanya rekayasa foto seperti bocah yang pulang sekolah disuruh menyandang senjata laras panjang M-16, disematkan topi berlogo dua singa - lambang GAM – atau gadis, ibu dijejerkan menggapit AK-47. Sebab, mereka bukan prajurit sungguhan walaupun senang menggendong senjata. Namun oleh fotografer ini dipersepsikan sebagai kader GAM.

Tugas utama jurnalis bukanlah sebagai juru damai. Jurnalis bisa mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan dengan mempublikasikan foto atau rekaman eksekusi kekerasan. Foto nestapa bayi, kakek nenek di kamp pengungsi bisa menyentuh relung-relung nurani daripada foto kehebatan militer Indonesia atau GAM yang memegang erat senjata berat. Tokoh teater Ratna Sarumpaet menyatakan kekesalan mendalam karena media cetak dan televisi berkali-kali menurunkan foto atau gambar kekerasan. Tampilan peristiwa konflik, kekerasan lewat foto atau tayangan televisi menimbulkan eksekusi-eksekusi baru yang justru semakin memicu intensitas konflik menjadi lebih luas lagi.

Salah satu tanggungjawab jurnalis adalah melindungi narasumber. Tidak ada artinya jurnalis memperoleh wawancara atau liputan hebat bila mereka tewas setelah laporan dimuat. Di sinilah, kami mengartikan jurnalis hati nurani. Tidak sekedar mementingkan oplah terdongkrak, prestise melangit, namun keselamatan narasumber terancam bahkan nyawa berpisah dengan tubuh.

3. Pemberitaan

Kini mengolah oleh-oleh lapangan dengan menuangkan dalam laporan. Mulailah menyisihkan investigasi yang layak diketahui oleh pembaca atau penonton. Yang tetap harus diingat jurnalis bukan jaksa, pembela atau hakim. Biarkan pembaca, penonton atau pendengar yang memutuskan siapa yang benar atau salah.

Diksi/Kata

Bahasa menunjukkan kepribadian. Pemilihan kata (dictum) perlu dikemas dengan hati-hati. Tidak melakukan reduksi makna atau membombasti kata. Membahasakan apa yang disaksikan, dirasakan dan didengar ke dalam tulisan, suara, visual dibutuhkan kewaspadaan untuk mencegah bias laporan. Penguasaan pembentukan kata menjadi persyaratan penting dalam penulisan dan pemakaian yang efektif. Misalnya tidak menggunakan kata-kata terlanjang seperti mata dicukil, usus terburai dan sebagainya.

Media massa punya kecenderungan *spinning of words* dalam menata bahasa jurnalisannya. Yaitu memelintir atau menggunakan bahasa sensasional, bombastis. Padahal dalam proses komunikasi, bahasa bukan sekedar sarana untuk dimuat pesan, tetapi diksi bahasa memiliki arti amat penting terhadap proses pemakaian. Bahasa tidak hanya untuk memfokuskan atau menarik perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi dan mengarahkannya untuk berpikir tertentu termasuk yang diyakini.

Diksi juga terkontrol dan taat asas. Misalnya, membedakan korban pemerkosaan dengan penzinaan. Istilah ini tidak dapat digunakan berganti-ganti karena membingungkan pembaca, pendengar atau penonton. Senada juga penggunaan kata pembunuhan dengan pembantai. Tragedi pembunuhan yang menimpa seorang tidaklah tepat menggunakan istilah pembantaian. Kata pembantai menelan korban lebih dari dua. Pemakaian kata halus (euphony) dan pemilihan angle (berita) termasuk salah satu memulihkan keadaan konflik. Ada kalanya pihak tertentu dengan bangga menulis dalam siaran pers atau percakapan dengan kata berhasil menewaskan lawan. Membunuh manusia apalagi karena berbeda ideologi negara atau agama bukanlah suatu prestasi.

Ada beberapa hal yang membuat jurnalis terjebak dalam pemakaian jargon. Juru bicara TNI, Polri dan GAM biasanya memproduksi stigma. AGAM mempopulerkan Serdadu Bandit Indonesia (SBI), julukan kepada TNI dan Polri. Oleh pers tanpa ada penyaringan dengan vulgar

menjadi bahasa yang direproduksi kembali. Sehingga idiom SBI dan beberapa gelar lainnya menjadi konsumsi publik. Sepatutnya praktik seperti itu dihindari oleh jurnalis. Di bagian lain, TNI dan Polri tak kalah serunya menciptakan simbol guna mengidentifikasi GAM. AGAM dilabelkan Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT), Gerakan Separatis bersenjata Aceh (GSBA) dan Gerakan Separatis Aceh (GSA). Stereotif bersifat negatif dengan tujuan merendahkan pihak lawan. Karena jurnalis bersifat netral, maka sebutlah mereka dengan nama yang mereka pakai sendiri.

Akurasi Data

Sebuah bom rakitan meledak di lapangan Blang Padang Banda Aceh pada upacara 17 Agustus 2002. Ada kecelakaan akurasi berita yang dilakukan oleh jurnalis media elektronik yang memberitakan 10 jiwa tewas akibat ledakan bom. Padahal, korban hanya luka-luka saja. Mungkin karena ingin mengejar eksklusifitas dan besarnya nilai berita membuat jurnalis tidak melakukan konfirmasi dengan aparat keamanan atau investigasi ke lapangan.

Tidak bisa dipungkiri, apa yang dilakukan oleh jurnalis media elektronik di atas merupakan kecelakaan akurasi yang amat serius. Merugikan sebelah pihak dan telah membuat sebuah konstruk situasi yang berlebihan atas realitas. Pendramatisasian kondisi seringkali menjadi menonjol ketika berita ledakan bom ditayangkan. Menghadirkan pentas medan ke halaman koran, majalah, radio, para jurnalis cenderung mendramatisasi peristiwa agar berita yang dibuat menarik publik. Dramatisasi menyebabkan fakta-fakta terdistorsi dan mendorong jurnalis untuk berbohong atas fakta. Jurnalis cenderung menginginkan kecepatan dan kehebatan berita dengan mengabaikan keakuratan data.

Ashadi Siregar, pengamat media menyatakan ketidakakuratan pemberitaan menyebabkan erosi kepercayaan terhadap profesionalisme jurnalis. Akurasi pemberitaan menurut Doug Newsome adalah 100 persen, berkurang sedikit saja merupakan kegagalan wartawan menjaga akurasi berita. Akurasi bagian dari kejujuran sebuah pemberitaan (fairness). Namun, akurasi pun sebenarnya belum menjamin sebuah berita itu disampaikan secara fair atau tidak. Ketidakuratan adalah kejahatan jurnalisme. Padahal akurasi + keseimbangan + kejelasan = kredibilitas. Aset terbesar jurnalisme yakni kredibilitas. Adalah sangat memalukan, korban yang masih hidup dikabarkan meninggal dunia. Ada kemungkinan, pembaca mencabut kepercayaan kepada media itu setelah mengetahui korban masih sehat wal afiat.

Etika Pemberitaan

Pekerjaan jurnalis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah fakta ini pantas dan patut diberitakan? Apakah cukup bertanggungjawab memberitakan sisi tertentu saja dari peristiwa dan seterusnya. Ini untuk menunjukkan bahwa etika muaranya adalah pada nurani. Kepantasan, kepatutan, tanggungjawab dan seterusnya bersumber pada hati nurani masing-masing. Pekerjaan dan hasil jurnalisme berkaitan dengan opini publik (public opinion). Pemberitaan dapat mempengaruhi sikap dan pemahaman seseorang atas suatu masalah.

Sebuah kisah di Amerika, seorang pengusaha bersalah. Lantas ia tidak mendapat rekanan dan bisnisnya hancur total. Dua tahun kemudian, pengadilan memutuskan dia tidak bersalah. Tapi sudah terlambat karena bisnisnya sudah hancur. Demikian juga, kasus anak perempuan yang tewas di Aceh Utara. Beberapa tahun kemudian, pelaku sebenarnya mengakui dirinya sebagai pembunuh pada waktu bersama pelaku yang divonis oleh hakim masih menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini hanya menunjukkan contoh tindakan dan perilaku jurnalis dibutuhkan kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Ada yang menyatakan tugas jurnalis yang paling utama melaporkan fakta. Kalau memang fakta ada kekerasan, tugas jurnalis memberitakannya. Adagium ini belum cukup. Pertanyaan adalah bagaimana fakta dilaporkan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Jurnalis kemanusiaan bukan tidak memberitakan kekerasan. Menyembunyikan kekerasan justru berdampak lebih buruk kemudian hari. Dalam suasana pers sekarang, apapun

dan siapapun bisa diberitakan. Tidak ada larangan bagi media dan wartawan untuk mengorek dan memberitakan apapun, kemudian dijual kepada konsumen.

Tetapi kebebasan ini kalau tidak direm bisa menimbulkan anarki. Dalam situasi konflik, media bisa memberitakan bahkan dengan mendramatisir supaya oplahnya naik. Tetapi apakah ini etis? Apakah sopan dan pantas menjual kematian dan konflik semata untuk menarik keuntungan? Apakah media bertanggung jawab kalau berita yang ditulis menimbulkan konflik lebih besar? Sejauhmana tanggung jawab media jika berita perang yang dipublikasikan justru mengobarkan semangat peperangan? Atmakusumah Astraatmadja, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo mengatakan, di daerah konflik pemberitaan harus lebih berhati-hati memberitakan. Gunakan etika profesi yang sesungguhnya sangat sederhana yakni obyektivitas, akurasi dan berimbang atau adil. Agaknya, ini menjadi standar dari jurnalisme hati nurani dan modal meliput ke daerah konflik Aceh.

Referensi

- Broder, S David, *Berita di Balik Berita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Heri Winarko, *Mendeteksi Bias Berita, panduan untuk pemula*. KlikR, Yogyakarta, Cetakan I Oktober 2000.
- Nur Zain Hae dkk, *10 Pelajaran untuk Wartawan*, Jakarta, LSPP, 2000
- Macnamara, Jim. *Strategi Jitu Menjinakkan Media*, Penerbit Mitra Media, Jakarta, 1999.
- Rusdi Marpaung dkk, *Jurnalisme Damai, Media Massa untuk Transformasi Sosial*, LSPP dan The British Council, Juni 2002.
- Wina Armadasa, *Menggugat Kebebasan Pers*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.